HARIAN ACEH INDONESIA

TEBAL
31 Hal
WWW.HARIANACEH.CO.ID

SELASA, 24 NOVEMBER 2026 | HARIANACEH.co.id | WWW.HARIANACEH.CO.ID · EDISI NO. 16

NASIONAL

AKBP Guntur Yayus Putra Ikut Dipecat Polri, Disuruh Brigjen Tedjo Kusumo Intai Pejabat

Oleh Redaksi · 24 Nov, 21.52 WIB



BANDA ACEH - Satu lagi anggota Polri dijatuhi sanksi pemecatan dalam pusaran kasus dugaan makar yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kali ini, anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror, AKBP Guntur Yayus Putra, dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) karena menjalankan perintah pembuntutan terhadap pejabat pemerintahan.AKBP Guntur Yayus Putra ikut dipecat dalam rangkaian perkara yang juga menyeret Brigjen Tedjo Kusumo. Saat masih bertugas di Densus 88, Guntur diketahui menjalankan perintah Tedjo untuk mengintai sejumlah sasaran yang tidak berkaitan dengan penanganan ancaman terorisme.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap Guntur.

"Sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," kata Trunoyudo di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (24/11/2026).

Selain PTDH, Guntur dijatuhi sanksi etik berupa pernyataan bahwa perbuatannya merupakan tindakan tercela. Ia juga telah menjalani penempatan khusus (patsus) selama 16 hari.

Meski demikian, Guntur tidak menerima begitu saja putusan tersebut.

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Anggota Brimob Bawa Senpi Laras Panjang Rampok Toko Emas di Aceh, Diduga Terlilit Utang



BANDA ACEH - Kasus percobaan perampokan Toko Emas Nikko di Jalan Nasional, Desa Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Selasa (24/11/2026), menghebohkan masyarakat.Pasalnya, salah seorang dari dua terduga pelaku diduga merupakan anggota aktif Korps Brigade Mobil (Brimob) yang bertugas di wilayah Nagan Raya.

Selengkapnya di halaman 23 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Anak Buah Eks Kapolri Listyo Disebut Sengaja Buat Isu Semua Polisi Jahat



BANDA ACEH - Geng mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo disebut sengaja menggiring isu bahwa seluruh Polisi adalah buruk.

Hal itu diungkapkan Bareskrim Polri dalam penetapan tersangka makar para petinggi Polri yang masuk ke dalam geng penyadapan Polri.

Selengkapnya di halaman 4 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

DALAM EDISI INI

NASIONAL 2
ACEH 23
Aneka Berita 27

NASIONAL

Pengamat Duga Listyo cs Siapkan Bungker Logistik buat Makar: Tak Terlalu Jauh dari Istana



BANDA ACEH - Pengamat Politik dan militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting menduga mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo cs menyiapkan bungker atau tempat penyimpanan logistik untuk mendukung upaya makar. Dugaan tersebut berkaitan dengan rangkaian upaya yang disebutnya bermula dari penyadapan.

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Soal Kaos dan Bendera One Peace Jadi Barbuk Makar, Ferry Irwandi: Mustahil Palsu



BANDA ACEH - Kemunculan barang bukti berupa kaos sablon hingga bendera bertuliskan "One Peace" dalam perkara dugaan makar memicu perdebatan tajam di media sosial. Alih-alih langsung diterima bulat-bulat, penetapan atribut tersebut sebagai barang bukti justru menuai tanda tanya publik.Aktivis sekaligus konten kreator Ferry Irwandi ikut melontarkan pandangan melalui …

Selengkapnya di halaman 3 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

43 BERITA

NASIONAL

AKBP Guntur Yayus Putra Ikut Dipecat Polri, Disuruh Brigjen Tedjo Kusumo Intai Pejabat

Oleh Redaksi · 24 Nov, 21.52 WIB



BANDA ACEH - Satu lagi anggota Polri dijatuhi sanksi pemecatan dalam pusaran kasus dugaan makar yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kali ini, anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror, AKBP Guntur Yayus Putra, dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) karena menjalankan perintah pembuntutan terhadap pejabat pemerintahan.AKBP Guntur Yayus Putra ikut dipecat dalam rangkaian perkara yang juga menyeret Brigjen Tedjo Kusumo. Saat masih bertugas di Densus 88, Guntur diketahui menjalankan perintah Tedjo untuk mengintai sejumlah sasaran yang tidak berkaitan dengan penanganan ancaman terorisme.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap Guntur.

"Sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," kata Trunoyudo di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (24/11/2026).

Selain PTDH, Guntur dijatuhi sanksi etik berupa pernyataan bahwa perbuatannya merupakan tindakan tercela. Ia juga telah menjalani penempatan khusus (patsus) selama 16 hari.

Meski demikian, Guntur tidak menerima begitu saja putusan tersebut. Ia menyatakan banding atas sanksi pemecatan yang dijatuhkan majelis sidang etik.

Diperintah Brigjen Tedjo Buntuti Pejabat

Satu Lagi Jenderal Polisi Dipecat di Kasus Makar Listyo Sigit, Kini Brigjen Tedjo Kusumo!

Dalam persidangan etik, majelis menemukan bahwa Guntur saat menjabat Kepala Unit (Kanit) 2 Subdirektorat Tindak Direktorat Penindakan Densus 88 Antiteror telah melaksanakan perintah Brigjen Tedjo Kusumo untuk melakukan kegiatan surveillance atau pembuntutan.

Namun, sasaran pengintaian tersebut tidak memiliki kaitan dengan tugas penanganan ancaman terorisme. Polri menyebut pihak yang dibuntuti justru merupakan pejabat pemerintahan.

Temuan itu menjadi salah satu dasar majelis menjatuhkan sanksi PTDH kepada Guntur.

Sidang etik terhadap Guntur digelar bersamaan dengan sidang terhadap Brigjen Tedjo Kusumo, yang juga dijatuhi sanksi pemecatan pada Selasa (24/11/2026).

Dalam sidang Tedjo, majelis menemukan adanya permufakatan terkait kegiatan pembuntutan terhadap sasaran di luar tugas antiteror. Tedjo juga menyatakan banding atas putusan PTDH tersebut.

Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Tedjo diduga melakukan pemantauan terhadap sejumlah calon Kapolri, pejabat negara, hingga tokoh partai Politik.

"Terkait dengan konstruksi hukum bagi TK ya, Brigjen TK. Itu dalam konteks tindak pidana makar masuk dalam perbuatan permulaan perbuatan di mana …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Pengamat Duga Listyo cs Siapkan Bungker Logistik buat Makar: Tak Terlalu Jauh dari Istana

Oleh Redaksi · 24 Nov, 20.45 WIB



BANDA ACEH - Pengamat Politik dan militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting menduga mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo cs menyiapkan bungker atau tempat penyimpanan logistik untuk mendukung upaya makar. Dugaan tersebut berkaitan dengan rangkaian upaya yang disebutnya bermula dari penyadapan.

Selamat tak menampik tempat penyimpanan tersebut bisa saja berisi amunisi. Menurutnya, logistik merupakan salah satu unsur yang dibutuhkan dalam upaya makar. Dia pun menyinggung dua peristiwa makar yang terjadi pada 1948 dan 1965 sebagai pembanding.

Dia menjelaskan, pada 1948 terdapat tempat penyimpanan senjata yang dikelola Menteri Pertahanan saat itu, Amir Sjarifuddin. Sementara pada 1965, terdapat penyimpanan senjata di kawasan Lubang Buaya, Jakarta.

"Tentu kalau bicara makar ada logistik. Logistik bisa uang, bisa benda yang lain, bisa juga kemudian amunisi, bisa seperti itu. Karena itu ini sudah dalam mata rantai yang akan ditelisik, dicari," kata Selamat dalam program Rakyat Bersuara bertajuk Ada 'Kurir Boyolali' di Kasus Sadap? di iNews, Selasa (24/11/2026).

Lebih lanjut, Selamat menduga tempat-tempat penyimpanan logistik tersebut berada di wilayah Jakarta. Bahkan, dia memperkirakan lokasinya tidak terlalu jauh dari Istana Kepresidenan.

"Maka sama dengan kalau peristiwa sekarang ya kemungkinan tidak terlalu jauh dari Istana, artinya ada di Ibu Kota," lanjut dia.

Selamat menyebut dugaan tersebut juga didasarkan pada sejumlah pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang beberapa kali menyinggung adanya pihak-pihak yang menyimpan uang hingga amunisi.

"Jadi itu sinyal-sinyal dari Presiden Prabowo, kalau kita lihat loh kok beberapa kali ada sinyal-sinyal dari beliau bahwa akan ada. Jadi kami tahu kalau ada yang menyimpan uang, amunisi dan lain-lain," kata dia.

Menurut Selamat, pernyataan tersebut mengindikasikan Presiden Prabowo telah memperoleh informasi intelijen mengenai dugaan tersebut.

"Itu kan sinyal berarti Presiden Prabowo sudah mendapatkan informasi dari intelijen negara. Itu yang saya baca," sambungnya.

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta akses ilegal.

Dalam pengembangannya, Bareskrim Polri kembali menetapkan enam tersangka dalam pidana makar di kasus penyadapan Presiden. Selain empat orang yang disebutkan di atas, terdapat tambahan Brigjen Tedjo Kusumo dan Kombes Iman Imanuddin.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Beredar Pernyataan Komjen Pol Marthinus Hukom Siap Periksa Jokowi

Oleh Redaksi · 23 Nov, 22.13 WIB

BANDA ACEH - Sebuah unggahan status yang dikaitkan dengan mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Marthinus Hukom, tengah menjadi sorotan publik.Dalam narasi yang beredar di X, Marthinus dikabarkan menyatakan kesiapannya untuk memeriksa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebelum dirinya memasuki masa purna tugas dari kepolisian.

Berdasarkan tangkapan layar unggahan status yang beredar pada Senin (23/11/2026), tertulis pernyataan yang menyebut bahwa pemeriksaan tersebut akan menjadi bentuk pengabdian terakhirnya sebelum pensiun.

"Kalau khusus memeriksa dia, SAYA SIAAAP. Mumpung belum pensiun, saya ingin melakukan pengabdian terakhir demi menyelamatkan Bangsa dan Negara," demikian bunyi kutipan dalam unggahan status yang dikaitkan dengan Marthinus Hukom tersebut.

Kabar mengenai kesiapan pemeriksaan tersebut muncul menyusul pemberitaan media Tempo terkait pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra.Dalam keterangannya, Yusril menyebutkan bahwa penyidik memiliki peluang untuk memeriksa Joko Widodo apabila dalam proses pengembangan kasus ditemukan fakta hukum serta alat bukti yang memadai.

Pernyataan ini berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal dan indikasi tindak pidana makar terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turut menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Komjen Pol. Dr. Marthinus Hukom, S.I.K., M.Si. merupakan perwira tinggi Polri lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Koalisi Kompak Terima Amran dan Sugiono Cawapres, Pengamat Ungkap Fakta di Balik Layar!

Oleh Redaksi · 23 Nov, 22.05 WIB

BANDA ACEH - Pengamat Politik Adi Prayitno mengungkapkan alasan tidak adanya penolakan dari partai-partai Politik di dalam koalisi pemerintah terhadap dua nama calon wakil presiden (cawapres) yang diajukan Presiden Prabowo Subianto kepada pimpinan MPR RI pada Senin sore (23/11/2026).Adi meyakini bahwa Prabowo telah mempertimbangkan pilihannya secara matang serta berkomunikasi dengan partai-partai koalisi sebelum mengajukan Andi Amran Sulaiman dan Sugiono sebagai dua cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Listyo Sigit Cs Terancam Pidana Hukuman Mati

Oleh Redaksi · 23 Nov, 20.52 WIB

BANDA ACEH -Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto yang semuanya berasal dari internal Polri.

“Penyidik telah menetapkan enam orang tersangka dalam dugaan tindak pidana makar,” kata Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam jumpa pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Senin malam, 23 November 2026.

Enam tersangka makar tersebut adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Slamet Uliandi, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Brigjen Tedjo Kusumo, dan Kombes Iman Imanuddin.

“Pertama tersangka LSP, kedua SU, tiga EH, keempat ASN, kelima TK, dan keenam tersangka II,” kata Asep.

Perkara dugaan makar dipastikan berbeda dengan kasus penyadapan ilegal nomor handphone Presiden Prabowo Subianto yang ditangani Direktorat …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Soal Kaos dan Bendera One Peace Jadi Barbuk Makar, Ferry Irwandi: Mustahil Palsu

Oleh Redaksi · 24 Nov, 20.25 WIB



BANDA ACEH - Kemunculan barang bukti berupa kaos sablon hingga bendera bertuliskan "One Peace" dalam perkara dugaan makar memicu perdebatan tajam di media sosial. Alih-alih langsung diterima bulat-bulat, penetapan atribut tersebut sebagai barang bukti justru menuai tanda tanya publik.Aktivis sekaligus konten kreator Ferry Irwandi ikut melontarkan pandangan melalui media sosial menanggapi keraguan warganet.

Sebelumnya, dalam konferensi pers di Mabes Polri pada Senin, 23 November 2026, Bareskrim Polri memaparkan sejumlah barang bukti terkait penyidikan kasus dugaan makar dan penyadapan yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama lima tersangka lainnya. Di antara barang bukti yang disorot publik adalah kaos sablon dan bendera "One Peace".

Berdasarkan paparan kepolisian, aparat menyita 250 kaos hitam bersablon tulisan "All Cops Are Bastard" serta 251 kaos hitam bertuliskan "sadar dipalak, sadar dibakar, sadar dimiskinkan" lengkap dengan ilustrasi salam tiga jari dan tagar #Indonesiasadar.

Selain itu, polisi juga mengamankan 20 bendera bertuliskan "One Peace"—ejaan yang diduga memplesetkan judul anime Jepang One Piece—sebagai bagian dari barang bukti.

Kepolisian menyebut ratusan kaos dan puluhan bendera tersebut diduga dipersiapkan sebagai atribut penyusupan massa sekaligus pemantik provokasi demonstrasi pada tahap permulaan dugaan makar.

Meski narasi resmi telah disampaikan, skeptisisme publik belum mereda. Banyak pengguna media sosial mempertanyakan relevansi langsung antara kaos sablon dan bendera plesetan tersebut dengan tuduhan makar yang berat.

Menanggapi gelombang keraguan itu, Ferry Irwandi menyampaikan pendapatnya lewat utas di akun Threads pribadinya. Ia berargumen bahwa kecil kemungkinan barang bukti tersebut direkayasa secara palsu mengingat konteks situasi Politik yang sedang berjalan.

"Dengan situasi politik seperti ini, yang mana negara sedang membutuhkan stabilitas dan kasus adalah kasus makar, rasanya mustahil untuk membuat barang bukti palsu," tulis Ferry dalam unggahan di akun @irwandiferry, yang dikutip pada Selasa, 24 November 2026.

Ia menambahkan bahwa pihak kepolisian telah memberikan keterangan bahwa atribut-atribut itu dibuat para tersangka untuk menunggangi gerakan masyarakat, sembari mengapresiasi penjelasan terbuka dari aparat.

Ferry juga mengajak publik untuk lebih cermat memilah antara dugaan makar dan ekspresi kritik dalam iklim demokrasi.

"Gue cuma mau ngomong satu hal, Jangan buru-buru bilang semua aksi adalah gerakan Makar dan jangan buru-buru bilang polisi menggunakan barang bukti palsu," tegasnya.

NASIONAL

Penyadapan Listyo Sigit Cs Ibarat G30S/PKI

Oleh Redaksi · 24 Nov, 20.38 WIB



BANDA ACEH - Kasus dugaan makar terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto bukanlah persoalan biasa.

Perkara tersebut memiliki dimensi Politik, kekuasaan, bahkan kemungkinan keterlibatan kepentingan asing.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengibaratkan dinamika penyadapan tersebut dengan peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI).

Menurutnya, terdapat kemiripan dalam hal perhitungan politik dan faktor yang tidak diperkirakan oleh pihak yang menjalankan operasi.

“Persoalannya berbeda tipis dengan G30S/PKI. Kalau G30S/PKI sudah terjadi, sedangkan penyadapan ini belum sampai pada tahap yang lebih jauh karena sudah terungkap dan dilakukan penindakan,” kata Amir kepada wartawan, Selasa 24 November 2026.

Ia mengingatkan, dalam peristiwa 1965, kelompok yang terlibat tidak memperhitungkan keberadaan Kostrad yang kemudian menjadi faktor penting bagi Jenderal Soeharto untuk mengambil langkah strategis.

Dalam dugaan operasi penyadapan saat ini, Amir melihat adanya faktor yang tidak diperhitungkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan lima petinggi Polri lainnya, yakni keberadaan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Menurutnya, Sjafrie memiliki posisi strategis dalam pemerintahan Prabowo, termasuk keterlibatannya dalam Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Keberadaan Sjafrie dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam perubahan peta kekuatan dan pengamanan negara.

Amir juga mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto diduga telah mengetahui adanya aktivitas penyadapan sejak sekitar setahun sebelumnya.

Namun, persoalan itu disebut tidak langsung diselesaikan karena pertimbangan stabilitas pemerintahan.

“Prabowo sudah tahu ada penyadapan selama setahun, tetapi dibiarkan dengan pertimbangan stabilitas. Sekarang persoalannya menjadi kegaduhan karena tidak segera diselesaikan,” kata Amir.

Dalam kasus ini, penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan enam tersangka, yakni Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Slamet Uliandi, Brigjen Tedjo Kusumo, dan Kombes Iman Imanuddin.

Enam tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 191 KUHP dan/atau Pasal 193 KUHP dan/atau Pasal 196 KUHP Jo, Pasal 160 KUHP Jo Pasal 20 huruf a, b, c, dan d KUHP Jo UU 1/2026 tentang Penyesuaian Tindak Pidana dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup penjara.

NASIONAL

Yusril Ihza Mahendra: Kalau Diperlukan, Penyidik Bisa Periksa Jokowi

Oleh Redaksi · 23 Nov, 21.57 WIB

BANDA ACEH - Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan penyidik bisa saja memeriksa mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pengembangan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.Pernyataan itu disampaikan Yusril dalam wawancara dengan Tempo di kantornya di Trinity Tower, Jakarta, pada Rabu, 18 November 2026.

Menurut Yusril, pemeriksaan terhadap Jokowi tetap harus didasarkan pada temuan pemeriksaan dan bukti yang sudah dihimpun penyidik.

“Ya. Bisa saja penyidik memeriksa Jokowi kalau diperlukan. Tentunya ini harus dilakukan berdasarkan temuan hasil pemeriksaan dan bukti yang sudah dihimpun. Jadi penyidik memerlukan suatu klarifikasi atau penjelasan dari Jokowi,” kata Yusril.

Yusril mengungkapkan, Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus penyadapan tersebut. Salah satunya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang diduga menjadi penerima manfaat penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

Ia menyebut, polisi kini tengah mengembangkan kasus penyadapan itu ke arah dugaan tindak pidana makar. Polri disebut telah menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dugaan makar.

“Setelah menetapkan mantan Kepala Polri, Listyo Sigit, sebagai tersangka penyadapan, polisi memeriksa sejumlah saksi untuk pengembangan kasus. Dari mereka, polisi menemukan bukti atau petunjuk mengenai adanya dugaan makar,” ujar Yusril.

Menurut Yusril, salah satu isi penyadapan yang terungkap berkaitan dengan penggantian Kapolri. Polisi disebut telah menemukan bukti-bukti bagaimana Presiden Prabowo kesulitan mengganti Kapolri pada waktu itu.

“Soal membuat Presiden Prabowo tidak berdaya serta tidak mampu menjalankan tugasnya, buktinya sudah ada, yakni soal penggantian Kapolri,” kata Yusril.

Ia menjelaskan, makar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di antaranya adalah membunuh presiden, membuat presiden menjadi lumpuh atau tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, menggulingkan pemerintah, serta memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun, Yusril menegaskan, apakah perbuatan tersebut sudah bisa dikategorikan makar masih harus menunggu hasil pemeriksaan penyidik.

“Tunggu hasil pemeriksaan,” ujarnya.

Yusril juga menyebut ada informasi Listyo Sigit cs menggerakkan massa dalam sejumlah unjuk rasa yang memprotes pemerintah.

“Ada informasi seperti itu,” kata Yusril.

Ketika ditanya tujuannya, Yusril menjawab singkat.

“Membuat kerusuhan. Detailnya saya enggak tahu. Yang jelas ada program Prabowo yang dihambat kegiatannya,” ujarnya.

Salah satu program yang disebutnya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Yusril, polisi sedang menyelidiki bagaimana program Prabowo banyak …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Ternyata Ini Alasan Prabowo Usulkan Sugiono dan Amran Jadi Cawapres

Oleh Redaksi · 23 Nov, 19.31 WIB

BANDA ACEH - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan mengusulkan Sugiono dan Andi Amran Sulaiman sebagai calon Wakil Presiden (cawapres) kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dia menilai keduanya memiliki prestasi, pengabdian, dan kesetiaan kepada negara.

Prabowo menyampaikan pertimbangan tersebut setelah menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/11/2026).

“Pertimbangannya adalah semata-mata prestasi, ya, pengabdian, kesetiaan kepada negara, dan ya, keyakinan saya bahwa mereka akan bekerja sebaik-baiknya. Saya ingin tekankan, tidak berarti hanya dua orang ini yang memenuhi syarat,” ujar Prabowo kepada awak media, Senin (23/11/2026).

Prabowo mengatakan, Indonesia memiliki banyak putra-putri terbaik yang layak menjadi calon wakil presiden. Namun, konstitusi hanya memperbolehkan dirinya mengusulkan dua nama.

“Banyak yang baik, tapi konstitusi kita menetapkan saya hanya boleh mengusulkan dua nama, dan saya diberi waktu yang sangat terbatas. Saya tidak bisa terlalu lama konsultasi. Saya sudah konsultasi dengan partai koalisi pengusung yang ada di parlemen,” katanya.

Dia juga mengaku telah berkonsultasi dengan partai-partai koalisi pemerintah dan Dewan Pembina Partai Gerindra sebelum menentukan dua nama tersebut.

“Saya sudah berkonsultasi dengan Dewan Pembina Partai Gerindra. Dan ini keputusan saya, ya. Saya yakin mereka dua-duanya akan bekerja sebaik-baiknya untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia,” katanya.

Sebelumnya, Prabowo menyerahkan langsung dua nama tersebut kepada Ketua MPR Ahmad Muzani. Dua nama yang diusulkan yakni Sugiono dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman

NASIONAL

Anak Buah Eks Kapolri Listyo Disebut Sengaja Buat Isu Semua Polisi Jahat

Oleh Redaksi · 24 Nov, 18.53 WIB



Pihak kepolisian menggelar konferensi pers untuk menunjukkan barang bukti terkait kasus tindak pidana tertentu.

BANDA ACEH - Geng mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo disebut sengaja menggiring isu bahwa seluruh Polisi adalah buruk.

Hal itu diungkapkan Bareskrim Polri dalam penetapan tersangka makar para petinggi Polri yang masuk ke dalam geng penyadapan Polri.

Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik menyita 39 barang bukti elektronik berupa telepon genggam, laptop, CPU, dan hard disk.

Polisi juga mengamankan 250 kaus bertuliskan "All Cops Are Bastards" (ACAB) atau yang diartikan “Seluruh Polisi adalah Bajingan”.

Selain itu disita juga 251 kaus bertuliskan "Sadar Dipalak, Sadar Dibakar, Sadar Dimiskinkan", 20 bendera One Piece, satu buku catatan analisis dan evaluasi satgas, serta uang tunai Rp735 juta.

Penyidik telah melakukan penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) di 14 lokasi.

Lima di antaranya diduga digunakan sebagai posko aktivitas para tersangka, yakni di kawasan Jalan Goa di Kebayoran Baru, Pondok Karya di Mampang Prapatan, Sambas di Kramat Pela, Cipete Utara, serta Cibinong, Kabupaten Bogor.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan pihak yang menyiapkan kaos penghinaan terhadap Polisi adalah anak buah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo Kombes Iman Imanuddin.

Sedangkan Iman diduga memerintahkan pembuatan konten yang menyerang Polri serta memesan 500 kaus bermotif salam tiga jari untuk kegiatan demonstrasi.

"Barang bukti lainnya berupa satu buku catatan hasil analisis dan evaluasi (anev) satgas berwarna biru, 20 bendera One Piece, serta uang tunai sebesar Rp735 juta," tutur Asep.

Susatyo mengatakan dokumen itu menjadi salah satu barang bukti penting dalam penyidikan kasus tersebut.

"Ini ada kesimpangsiuran, meluruskan bahwa ditemukan bendera One Piece tulisannya berbeda, ada kaus dan sebagainya," tutur Susatyo, Selasa (24/11/2026).

"Perlu kami sampaikan bahwa barang bukti pada permufakatan itu adalah sebuah dokumen kurang lebih ada 14 poin yang telah dirapatkan oleh para kelompok ini," tambahnya.

Adapun sejumlah barang bukti lain yang menjadi perhatian publik di antaranya bendera One Piece dengan tulisan “One Peace” dan kaus hitam bergambar salam tiga jari.

Pada kaus tersebut terdapat tulisan “Sadar Di palak, Sadar Di bakar, Sadar Di miskinkan” serta tagar #Idonesiasadar yang diduga salah ketik dari #Indonesiasadar.

Susatyo menegaskan, spanduk dan kaus tersebut ditemukan langsung di tempat kejadian perkara (TKP).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Menko Polkam Dukung Kasus KM 50 Dibuka Kembali: Mumpung Kapolrinya Baru dan lagi Bersih-Bersih

Oleh Redaksi · 24 Nov, 18.42 WIB



BANDA ACEH - Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mendukung pembukaan kembali kasus KM 50 yang menewaskan enam anggota Front Pembela Islam (FPI). Dia bahkan menyatakan siap mundur dari jabatannya jika terbukti secara hukum terlibat dalam peristiwa tersebut.

Dudung mengatakan, pembukaan kembali kasus KM 50 harus memenuhi persyaratan dan mekanisme hukum yang berlaku. Hal itu termasuk adanya dasar hukum yang kuat serta fakta atau bukti baru yang relevan.

“Saya sama sekali tidak keberatan, bahkan mendukung dan mendorong apabila kasus KM 50 dibuka kembali, sepanjang terdapat dasar hukum yang kuat, fakta atau bukti baru yang relevan, serta memenuhi persyaratan dan mekanisme hukum yang berlaku,” kata Dudung.

Pernyataan itu disampaikan Dudung saat memberikan keterangan kepada awak media di VIP Room Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa (24/11/2026) sore. Dia merespons desakan masyarakat di media sosial agar kasus KM 50 kembali diusut, termasuk tuduhan keterlibatan dirinya yang saat itu menjabat Pangdam Jaya.

“Mumpung Kapolrinya baru dan sedang melaksanakan bersih-bersih, silakan kalau mau dibuka lagi,” ujar Dudung.

Menurutnya, pembukaan kembali kasus tersebut dapat menjadi kesempatan untuk menjawab pertanyaan masyarakat melalui proses hukum yang objektif, transparan dan akuntabel. Namun, proses tersebut tetap harus menghormati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dudung juga membantah dirinya maupun jajaran Kodam Jaya terlibat secara khusus dalam perencanaan, penyelidikan, maupun penindakan operasi kepolisian yang dilakukan Polda Metro Jaya terkait peristiwa KM 50.

Dia menjelaskan, kehadirannya dalam konferensi pers saat itu hanya untuk memenuhi undangan dalam kapasitas sebagai unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Sebagai bentuk keterbukaan, Dudung menyatakan siap memberikan keterangan sebagai saksi apabila dibutuhkan aparat penegak hukum. Dia juga bersedia mengundurkan diri dari jabatan Menko Polkam apabila keterlibatannya dalam peristiwa KM 50 terbukti secara hukum.

Dudung menegaskan menghormati aspirasi masyarakat, terutama keluarga korban, yang menginginkan kejelasan dan keadilan. Dia mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan secara independen oleh institusi berwenang.

“Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, tetapi juga tidak boleh ada pihak yang dituduh tanpa fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Dudung

NASIONAL

Diusulkan Prabowo Jadi Cawapres, Ini Profil dan Rekam Jejak Sugiono

Oleh Redaksi · 23 Nov, 19.20 WIB

BANDA ACEH -Profil Sugiono menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto mengusulkan namanya sebagai calon wakil presiden (cawapres), bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Sugiono saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI setelah diangkat Prabowo pada 1 Oktober 2026.

Nama Sugiono belakangan masuk dalam bursa calon pengganti Gibran Rakabuming Raka yang berhenti dari jabatannya pada 12 November 2026. Sosok politikus Partai Gerindra tersebut memiliki rekam jejak panjang, mulai dari karier militer hingga menduduki sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan partai Politik.

Lantas, bagaimana profil Sugiono, termasuk riwayat pendidikan dan perjalanan kariernya?

Profil dan Riwayat Pendidikan Sugiono

Dikutip dari laman resmi Partai Gerindra yang diakses pada Senin (23/11/2026), Sugiono lahir dan besar di Aceh. Ia mengawali pendidikan formal di SDN 1 Takengon, kemudian melanjutkan sekolah di SMPN 3 Banda Aceh.

Setelah itu, Sugiono diterima di SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah. Selepas menyelesaikan pendidikan menengah, Sugiono melanjutkan studi ke Amerika Serikat. Ia meraih gelar Bachelor of Science di bidang Computer Science dari Norwich University.

Sugiono juga disebut pernah menempuh pendidikan di Norwich Military Academy, Amerika Serikat. Ia diketahui sempat tinggal dan bekerja di Rhode Island.

Selain pendidikan sipil, Sugiono mengikuti pendidikan calon perwira TNI melalui Sekolah Perwira Prajurit Karier (Semapa PK) di Akademi Militer, Magelang. Ia menyelesaikan pendidikan tersebut pada 2002 dan dilantik sebagai Letnan Dua di Korps Infanteri.

Rekam Jejak Karier Sugiono

Sebelum terjun ke dunia politik, Sugiono mengawali perjalanan kariernya di militer. Ia pernah bertugas sebagai perwira Infanteri di Komando Pasukan Khusus (Kopassus) pada periode 2002–2004.

Setelah meninggalkan dinas militer, Sugiono menjadi sekretaris pribadi Prabowo Subianto. Kedekatan tersebut kemudian membawanya terlibat dalam proses awal pendirian Partai Gerindra pada 2008.

Sugiono menjadi salah satu kader yang mengikuti perjalanan partai sejak awal pembentukannya. Pada 2014, ia dipercaya menduduki posisi Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Bareskrim Tetapkan 6 Tersangka Kasus Makar, Listyo Sigit hingga Iman Imanuddin

Oleh Redaksi · 23 Nov, 21.04 WIB

BANDA ACEH - Polri mengungkap perkembangan terkini kasus dugaan tindak pidana makar terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Bareskrim Polri menetapkan enam orang sebagai tersangka.

Hal itu disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Senin (23/11/2026).

“Penyidik Dittipidum Bareskrim Polri telah menentapkan enam orang sebagai tersangka,” kata Asep.

Adapun, keenam tersangka dugaan makar di antaranya eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN) , Irjen Eko Hadi Santoso (EH), Irjen Slamet Uliandi (SU), Brigjen Tedjo Kusumo (TK), dan Kombes Iman …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

MPR Tetapkan Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Digelar Dua Sesi

Oleh Redaksi · 23 Nov, 19.13 WIB

BANDA ACEH -MPR RI menyepakati jadwal pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa untuk pemilihan dan penetapan Wakil Presiden pada Jumat, 11 Desember 2026.

Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI bersama pimpinan fraksi-fraksi dan Kelompok DPD di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 23 November 2026.

"Tadi dengan masukan banyak pakar tata negara, kajian ahli, dan lain sebagainya, MPR mendengar. Kemudian tadi diputuskan mengubah jadwal semula tanggal 9 menjadi tanggal 11 Desember," jelas Sekretaris Fraksi PKS MPR RI, Johan Rosihan.

Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) I itu menjelaskan sidang paripurna MPR pada 11 Desember akan dibagi menjadi dua sesi.

“Sesi pertama adalah rapat paripurna MPR untuk mengesahkan rancangan keputusan berupa tata cara pemilihan kepada semua anggota MPR,” ungkapnya.

Sedangkan sesi kedua dilanjutkan dengan proses pemilihan dan penetapan calon Wakil Presiden yang diajukan Presiden.

Dengan adanya penyesuaian jadwal dan tahapan tersebut, proses pemilihan Wakil Presiden diharapkan dapat berlangsung secara tertib, transparan, dan memiliki dasar konstitusional yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perubahan jadwal juga menjadi pengingat pentingnya ketelitian dalam menafsirkan ketentuan konstitusi sekaligus kesediaan lembaga negara untuk mendengarkan kritik dan masukan publik

NASIONAL

Polemik Suket Ijazah Gibran, Notulensi Rapat KPU Tak Cantumkan Usulan Pengecualian Lulusan Luar Negeri

Oleh Redaksi · 24 Nov, 15.56 WIB



BANDA ACEH - Notulensi rapat penyusunan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 ternyata tidak secara eksplisit memuat usulan pengecualian persyaratan ijazah SMA bagi calon presiden dan wakil presiden yang telah lulus perguruan tinggi di luar negeri. Hal itu terungkap dalam sidang dugaan pelanggaran etik Ketua dan Anggota KPU periode 2019-2024 di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Selasa (24/11/2026).

Dalam persidangan tersebut, ASN Sekretariat Jenderal KPU, Dewi Mayangsari menjelaskan, perubahan aturan bermula dari rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga pada 15 September 2023. Setelah rapat, dia mengaku kembali menghubungi perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui WhatsApp.

Koordinasi lanjutan itu membahas penyempurnaan redaksional norma dalam rancangan PKPU.

"Pada saat rapat koordinasi kementerian lembaga tanggal 15 September, kami melakukan diskusi pasca kegiatan tersebut. Lalu setelah diskusi di internal KPU, saya menghubungi kementerian Dikdasmen tersebut yang hadir pada kegiatan itu," ujar Dewi di ruang sidang.

Ketua Majelis DKPP Ratna Dewi Pettalolo kemudian menggali keterangan Dewi mengenai usulan penambahan norma yang mengecualikan kewajiban melampirkan ijazah SMA bagi peserta Pilpres 2024 yang telah memiliki ijazah perguruan tinggi dari luar negeri.

Dewi mengakui notulensi rapat yang menjadi rujukan tidak secara eksplisit menyebutkan ketentuan mengenai lulusan perguruan tinggi luar negeri.

"Izin, Yang Mulia. Ini merupakan bahasa kutipan yang kami ambil dari notulensi, memang tidak membunyikan secara eksplisit luar negeri," kata Dewi.

Ratna kemudian memastikan apakah tidak tercantumnya ketentuan tersebut berarti tidak ada usulan konkret mengenai pengecualian bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri dalam notulensi rapat.

"Ya, itu diakui aja enggak ada kan. Nah, berarti secara konkret pun tidak ada usulan itu. Ya? Benar enggak? Biar jelas nih," tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengakui pernah dimintai pendapat oleh KPU terkait rancangan ketentuan pengecualian persyaratan ijazah SMA bagi calon presiden dan wakil presiden yang telah memiliki ijazah perguruan tinggi luar negeri.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, dalam sidang DKPP pada Selasa (24/11/2026). Dia menyebut KPU meminta pendapat melalui pesan WhatsApp pada 17 September 2023.

"Kemudian pada tanggal 17 September 2023, melalui pesan pada aplikasi WhatsApp, kami diminta pendapat oleh KPU terkait rencana pencantuman satu ayat dalam …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Bareskrim Polri Buka Suara Soal Salah Ketik Bendera One Piece dan Kaos ACAB Barbuk Makar

Oleh Redaksi · 24 Nov, 16.07 WIB



BANDA ACEH - - Barang bukti kasus dugaan makar menjadi sorotan publik. Terutama salah ketik pada kaos dan spanduk yang ditunjukkan oleh Bareskrim Polri dalam konferensi pers pada Senin malam (23/11).

Atas kekeliruan yang memicu kegaduhan di media sosial (medsos) tersebut, Bareskrim Polri buka. Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menjelaskan kekeliruan tersebut.

”Ini ada kesimpangsiuran, meluruskan bahwa ditemukan bendera One Piece tulisannya berbeda (menjadi One Peace), ada kaos, dan sebagainya,” kata Susatyo pada Selasa (24/11).

Susatyo menegaskan kembali, kaos dan bendera yang ditunjukkan dalam konferensi pers adalah bagian dari kumpulan barang bukti lain. Secara keseluruhan penyidik membagi barang bukti itu dalam 14 kelompok. Termasuk diantaranya sejumlah barang bukti elektronik.

Susatyo memastikan, barang bukti bendera dan kaos turut diamankan karena penyidik menemukannya di lokasi penggeledahan. Salah tik pada beberapa tulisan seperti One Piece menjadi One Peace dan #Indonesiasadar menjadi #Idonesiasadar, dia menyebut, tulisan itu sudah ada saat barang bukti ditemukan.

”Terkait dengan spanduk, kaos, itu adalah murni ditemukan di TKP. Ditemukan di TKP,” tegasnya.

Tidak hanya barang bukti fisik, Bareskrim Polri turut mengantongi barang bukti berupa data digital dalam kasus dugaan makar yang menyeret Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo tersebut. Data-data itu sudah diambil oleh petugas dari Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkap hal itu kepada awak media dalam konferensi pers di di Jakarta pada Senin malam (23/11). Dia menyampaikan bahwa data-data digital tersebut diperlukan untuk memperkuat pembuktian dalam penanganan kasus tersebut.

”Guna memperkuat pembuktian dalam penanganan perkara ini, penyidik telah melakukan penarikan data digital dari berbagai peralatan elektronik oleh Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri,” kata dia.

Asep memastikan, data-data digital tersebut akan digunakan untuk membuktikan telah terjadinya perbuatan makar yang diduga dilakukan oleh para tersangka. Selain barang bukti digital tersebut dilengkapi berbagai barang bukti lain seperti laptop, CPU, hard disk, hingga handphone atau telepon genggam.

”Penyidik telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang terkait dengan perkara tersebut, antara lain 39 unit barang bukti elektronik yang meliputi handphone, laptop, CPU, dan hard disk,” ucap Asep.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Tiga Skenario Makar Listyo Sigit dan 5 Petinggi Polri

Oleh Redaksi · 23 Nov, 21.46 WIB

BANDA ACEH -- Bareskrim Polri mengungkap konstruksi perkara dugaan tindak pidana makar menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan lima perwira menengah polisi lainnya sebagai tersangka. Dugaan makar tersebut terdiri atas tiga tahapan, yakni permufakatan, persiapan, dan permulaan pelaksanaan.Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan, tahap pertama berupa permufakatan diduga berlangsung melalui rapat pada 3 Oktober 2024, ketika Presiden Prabowo Subianto belum dilantik. Rapat tersebut dipimpin tersangka SU dan dihadiri EH, ASN, TK, serta sejumlah anggota tim lainnya.

Dalam rapat itu, dibahas sejumlah pointer disusun atas perintah tersangka ASN. Materinya mencakup analisis arah pemerintahan ke depan serta pemetaan tokoh-tokoh dinilai berpengaruh. Penyidik juga menemukan sejumlah dokumen dalam laptop milik seorang saksi diduga berkaitan dengan hasil rapat tersebut.

Dokumen itu memuat analisis krisis, analisis pemakzulan atau impeachment, analisis isu kebijakan pemerintah, analisis calon Kapolri, hingga dokumen berjudul atau bertema cap makar. Selain itu, ditemukan analisis mengenai peristiwa krisis 1998, termasuk mekanisme kejadian dan proses mundurnya Presiden Soeharto.

"Kami temukan ya dalam melakukan pemeriksaan saksi serta alat bukti dan petunjuk, ditemukan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2024, saat presiden terpilih belum dilantik, dilaksanakan rapat yang dipimpin oleh SU dengan dihadiri oleh EH, ASN, dan TK beserta tim lainnya," kata Asep dalam konferensi pers di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (23/11/2026).

Tahap kedua adalah persiapan. Menurut Asep, tahap ini merupakan tindak lanjut dari arahan yang dibahas dalam rapat permufakatan pada 3 Oktober 2024.

Dalam tahap tersebut, diduga dilakukan penyadapan terhadap sejumlah tokoh yang sebelumnya telah dipetakan. Kegiatan penyadapan disebut berlangsung sejak masa jabatan Kabagmon dijabat oleh EH hingga ASN.

Asep mengungkapkan, tersangka ASN diduga menentukan target penyadapan. Target tersebut kemudian diserahkan kepada personel untuk diolah dan dianalisis menggunakan sistem LIMS, PLX, dan DFS.

Hasil pengolahan tersebut selanjutnya menjadi produk analisis yang digunakan dalam rangkaian kegiatan berikutnya.

Tahap ketiga merupakan permulaan pelaksanaan. Asep menyebut, hasil penyadapan diduga ditindaklanjuti dengan kegiatan surveillance atau pengawasan terhadap sejumlah pejabat negara, pimpinan lembaga negara, dan tokoh …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Ternyata Mabes Polri Belum Pastikan Jadwal Sidang Etik Listyo Sigit

Oleh Redaksi · 23 Nov, 19.36 WIB

BANDA ACEH -Mabes Polri belum menetapkan jadwal pasti pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Listyo Sigit Prabowo selaku terduga pelanggar dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, kepastian tanggal pelaksanaan hingga susunan majelis sidang KKEP masih dalam tahap finalisasi internal.

“Terkait jadwalnya, seperti minggu lalu sudah kami sampaikan. Penyampaian kami adalah pekan depan atau minggu ini. Secara pasti sama-sama nanti kita menunggu untuk kepastian, mulai dari tanggal, pelaksanaan harinya, dan siapa majelisnya,” kata Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 23 November 2026.

Merujuk pada Pasal 59 Peraturan Kepolisian (Perpol) tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, kehadiran terduga pelanggar dalam persidangan bersifat wajib.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Peta Politik Wapres Bisa Merembet ke Kursi Ketum Golkar, Bahlil Terancam Dimunaslubkan?

Oleh Redaksi · 24 Nov, 15.36 WIB



BANDA ACEH - Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Saiful Mujani, memberikan pandangan terkait dinamika politik pasca-usulan nama Sugiono dan Andi Amran Sulaiman sebagai calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.Menurut Saiful, langkah Presiden Prabowo Subianto tersebut memiliki implikasi luas terhadap konstelasi internal partai politik, khususnya Partai Golkar.

Dalam analisisnya, Saiful menilai bahwa pemilihan cawapres oleh anggota MPR RI tidak dapat dilihat dari satu dimensi semata.

Mengingat sebagian besar anggota MPR merupakan kader partai politik, posisi wakil presiden dinilai memiliki pengaruh signifikan terhadap pergeseran kekuatan elite partai di tingkat nasional.

Saiful membandingkan latar belakang kedua tokoh yang diusulkan tersebut:

- Sugiono: Menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra yang memiliki basis struktural partai.

- Andi Amran Sulaiman: Tidak berstatus sebagai petinggi partai politik.

Menurut Saiful, dinamika ini berpotensi memengaruhi stabilitas kepemimpinan di Partai Golkar sebagai salah satu partai politik terbesar di Indonesia.

Ia menarik garis sejarah pada peristiwa tahun 2004, ketika Jusuf Kalla (JK) yang terpilih menjadi Wakil Presiden mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhasil mengambil alih kursi Ketua Umum Partai Golkar dari Akbar Tandjung.

Saiful mengemukakan sejumlah kemungkinan skenario politik yang dapat terjadi di tubuh Partai Golkar akibat perubahan konstelasi tersebut:

- Skenario Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub): Perubahan peta politik mutakhir dinilai berpotensi memicu wacana Munaslub terhadap Ketua Umum Partai Golkar saat ini, Bahlil Lahadalia, sehingga membuka peluang perebutan kursi pimpinan partai.

- Jika Andi Amran Sulaiman Terpilih: Amran dinilai memiliki peluang untuk masuk ke dalam struktur Partai Golkar, serupa dengan langkah politik yang ditempuh Jusuf Kalla pada tahun 2004.

- Jika Sugiono Terpilih: Perebutan posisi pimpinan di Partai Golkar diprediksi akan berlangsung di antara para elite internal partai itu sendiri.

"Apakah anggota MPR akan memilih Sugiono atau Amran? Anggota MPR itu sebagian besar anggota partai. Apakah posisi Wapres berpengaruh pada peta elite partai? Siapa yang berpeluang mengambil partai? Pimpinan partai mana yang bisa terancam?" ungkap Saiful dalam keterangannya.

Begini uraian dari Saiful Mujani:

"Pimpinan partai mana yang bisa terancam? Ingat peristiwa Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung ditaklukkan oleh Jusuf Kalla ketika Jusuf Kalla menjadi …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Usai Ditangkap Polda Metro Jaya, Eks Kader PSI Cakra Adi Negara Minta Maaf ke Dasco

Oleh Redaksi · 24 Nov, 16.03 WIB



BANDA ACEH - Mantan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Cakra Adi Negara, menyampaikan permintaan maaf kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Permohonan maaf tersebut disampaikan melalui unggahan video yang ditujukan langsung kepada politikus Partai Gerindra tersebut.

Dalam video yang diunggah ke dalam media sosial Facebook, Cakra mengakui sejumlah tulisan yang pernah dibuatnya mengenai Dasco sangat keliru. Dia juga menyadari bahwa informasi yang disampaikan dalam tulisan-tulisan tersebut belum terbukti kebenarannya.

"Halo, perkenalkan saya Cakra Adi Negara. Di video kali ini saya tujukan kepada Bapak Dasco. Saya ingin meminta maaf atas apa yang sudah saya lakukan selama ini kepada Bapak," kata Cakra dalam video tersebut, Selasa (24/11).

Cakra yang sempat ditangkap oleh Polda Metro Jaya, pada Jumat (20/11) dini hari itu kemudian secara khusus menyinggung sejumlah tulisan yang pernah dibuatnya mengenai Dasco. Cakra mengakui, tulisan-tulisan tersebut tidak sepenuhnya didasarkan pada informasi yang telah terverifikasi.

"Saya akui beberapa tulisan saya tentang Bapak itu keliru dan belum terbukti kebenarannya," tegasnya.

Cakra merasa menyesal atas perbuatannya tersebut. Ia juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari.

"Oleh karena itu, sekali lagi, dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi-nya lagi," ucapnya.

Cakra juga berharap hubungan ke depan dapat terjalin lebih baik. Dia pun menginginkan adanya sinergi dan solidaritas setelah menyampaikan permintaan maaf kepada Dasco.

"Semoga ke depannya kita bisa saling bersinergi dan menjunjung tinggi rasa solidaritas. Terima kasih," jelasnya.

Polda Metro Tegaskan Penangkapan Cakra Adi Negara Tak Berkaitan dengan Dasco

Polda Metro Jaya sebelumnya memberikan penjelasan terkait penangkapan mantan kader PSI, Cakra Adi Negara, yang juga dikenal sebagai pemilik akun Facebook Cakra Adi Negara (Chakz). Polisi memastikan, penanganan tersebut tidak berkaitan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Kepolisian juga menegaskan, dugaan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan Cakra Adi Negara ditindaklanjuti berdasarkan laporan masyarakat, bukan karena adanya kepentingan pihak tertentu.

"Penanganan perkara ini tidak memiliki keterkaitan dengan pejabat pemerintah maupun tokoh publik sebagaimana isu yang berkembang di ruang publik terhadap sosok Pak Sufmi Dasco," ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Minggu (22/11).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Kasus Makar, Bareskrim Sita 20 Bendera One Piece hingga Ratusan Kaus Hitam

Oleh Redaksi · 23 Nov, 20.59 WIB

BANDA ACEH - Bareskrim Polri menyita sejumlah barang bukti dalam penanganan kasus dugaan makar yang dikaitkan dengan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Barang bukti tersebut di antaranya 20 bendera One Piece, ratusan kaus hitam, perangkat elektronik, hingga uang tunai Rp735 juta.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengatakan, penyitaan dilakukan penyidik sebagai bagian dari proses penanganan perkara tersebut.

"Penyidik telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti dan terkait dengan perkara tersebut," kata Asep dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (23/11/2026).

Asep merinci, penyidik menyita 39 barang bukti elektronik yang terdiri atas telepon genggam, laptop, CPU, dan hard disk.

Selain itu, polisi menyita 250 kaus hitam bergambar senjata api dengan tulisan 'All Cops Are Bastard'. Ada pula 251 kaus hitam bertuliskan 'Sadar Dipalak, Sadar Dibakar, Sadar Dimiskinkan'.

"251 pcs kaus warna hitam yang bertuliskan 'Sadar Dipalak, Sadar Dibakar, Sadar Dimiskinkan' bergambar salam tiga jari dengan tagar Indonesia Sadar," kata dia.

Barang bukti lainnya berupa satu buku catatan hasil analisis dan evaluasi (anev) satgas berwarna biru, 20 bendera One Piece, serta uang tunai senilai Rp735 juta.

Sebelumnya, Polri menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan makar yang dikaitkan dengan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mereka yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi, Slamet Uliandi, Tedjo Kusumo, dan Iman Imanuddin.

Dalam perkembangan perkara lainnya, sejumlah perwira tinggi Polri juga disebut menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Tiga di antaranya, yakni Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta, disebut telah ditahan di Rutan Mako Brimob. Sementara Slamet Uliandi tidak ditahan.

Terbaru, Eko Hadi disebut menyusul Ahrie Sonta yang lebih dahulu dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Polri. Putusan PTDH terhadap Ahrie dibacakan pada Selasa (10/11/2026)

NASIONAL

Respons Dasco usai Namanya Tak Diusulkan Jadi Cawapres oleh Prabowo

Oleh Redaksi · 23 Nov, 19.24 WIB

BANDA ACEH - Wakil Ketua DPRSufmi Dasco Ahmad buka suara setelah namanya tidak masuk dalam daftar usulan calon wakil presiden (cawapres) yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada MPR.

Dasco menegaskan, sejak awal dirinya tidak memosisikan diri untuk mengikuti kontestasi pencalonan wakil presiden. Karena itu, dia tidak mempermasalahkan namanya yang tidak tercantum dalam daftar tersebut.

"Sebenarnya kan saya sudah sampaikan bahwa saya tidak dalam kapasitas untuk ikut dalam bursa cawapres," ujar Dasco saat menjawab pertanyaan awak media di …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Motif Dugaan Makar Listyo Sigit Cs: Ternyata Pertahankan Jabatan Kapolri

Oleh Redaksi · 23 Nov, 20.55 WIB

BANDA ACEH -Bareskrim Polri mengungkap dugaan motif enam tersangka makar, yakni Listyo Sigit Prabowo (LSP), Slamet Uliandi (SU), Eko Hadi (EH), Ahrie Sonta (ASN), Tedjo Kusumo (TK), dan Iman Imanuddin (II).

Motif dari keenam tersangka adalah mempertahankan jabatan Kapolri melalui upaya melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Demikian dikatakan Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Senin malam, 23 November 2026.

”Para tersangka diduga telah melakukan permufakatan persiapan dan permulaan pelaksanaan makar dengan motif mempertahankan jabatan Kapolri untuk tujuan konstelasi Politik dengan cara melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Asep.

Dalam menjalankan aksinya, Listyo didampingi dan didukung oleh lima orang tersangka lainnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Pamer Salam Perlawanan 3 Jari, Kenapa Anies Baswedan?

Oleh Redaksi · 24 Nov, 15.17 WIB



BANDA ACEH - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, membagikan refleksi pemikiran mendalam mengenai dinamika gerakan anak muda dan kualitas demokrasi di Indonesia bertajuk "Takut Belum Pergi, Percaya Belum Tiba".Tulisan itu diunggah di akun X-nya dengan latar gambar 'salam 3 jari', sebuah tanda simbol perlawanan anak muda yang viral pada beberapa waktu terakhir.

Dalam tulisannya yang dikutip pada Senin (23/11/2026), Anies menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban mutlak untuk menjamin rasa aman warga dalam bersuara serta memastikan aspirasi publik benar-benar didengar dalam proses pengambilan kebijakan.

Anies mengawali refleksinya dengan membandingkan dua peristiwa Politik besar pada 2024, yakni pembatalan status darurat militer di Seoul, Korea Selatan pada Desember 2024, serta gelombang demonstrasi "Peringatan Darurat" di Gedung DPR RI, Senayan, pada Agustus 2024.

Menurutnya, kedua peristiwa tersebut memperlihatkan daya dorong "segitiga emas abad ke-21", yakni kolaborasi antara anak muda, teknologi digital, dan demokrasi. Namun, ia menilai di Indonesia pilar demokrasi masih terhambat karena belum tumbuhnya rasa percaya publik akibat masih bercokolnya rasa takut.

Intimidasi Digital dan Tekanan di Ruang Nyata

Anies menyoroti bahwa meskipun teknologi digital telah mematahkan rasa kesendirian dan mempercepat konsolidasi gerakan anak muda, seperti pada aksi Agustus 2024 maupun gelombang protes Agustus 2025, rasa takut belum sepenuhnya hilang dari ruang publik Indonesia.

Ia merujuk pada maraknya pengakuan warganet di Threads pada pertengahan November 2026 mengenai tekanan untuk menghapus unggahan kritis, termasuk pengalaman seorang pekerja media yang didatangi pihak tak dikenal.

Ia juga mengutip catatan SAFEnet sepanjang 2025 yang merekam 907 serangan digital dan insiden keamanan, mulai dari ancaman pesan pribadi hingga penyebaran data pribadi (doxing).

Sementara di ruang nyata, Anies menyoroti data kepolisian terkait unjuk rasa pada 25–31 Agustus 2025 yang mencatat 3.195 orang diamankan, dengan 959 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk 295 anak di bawah umur serta temuan tim pencari fakta dari enam lembaga negara mengenai 11 korban jiwa dalam rangkaian peristiwa tersebut.

"Berbeda dengan Seoul yang tiba-tiba mengumumkan darurat militer, rasa takut di negeri kita datang tanpa pengumuman terbuka, melainkan lewat DM (direct message), ketukan dini hari di pintu rumah, dan surat panggilan untuk diperiksa. Sebagian datang berseragam, sebagian tanpa identitas dan surat perintah," tulis Anies.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Zulhas Sentil Era Reformasi: Dulu Tambang Dikuasai Orang Per Orang, Negara Cuma Dapat Sedekah

Oleh Redaksi · 23 Nov, 17.58 WIB

BANDA ACEH -- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai pengelolaan kekayaan alam Indonesia, khususnya sektor pertambangan, kini mulai diarahkan agar lebih berpihak kepada negara dan kepentingan rakyat.

Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, menyebut selama 28-30 tahun era reformasi, penguasaan sumber daya alam dinilai lebih banyak dinikmati oleh kepentingan perorangan dan pemilik modal. Sementara itu, negara disebut belum memperoleh manfaat optimal dari kekayaan alam yang dimilikinya.

Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas dalam acara Grand Launching dan Kuliah Umum Pertanian Industrial Berkelanjutan di Aruna Universitas Jember, Sabtu (21/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Zulhas menggambarkan adanya perubahan arah kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam. Ia menilai, jika sebelumnya pengelolaan tambang lebih banyak berada di tangan kepentingan pribadi, kini pemerintah berupaya memperkuat peran negara.

"Dulu tambang punya perorangan, negara disedekahi. Sekarang dikuasai negara," ujar Zulhas.

Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena menyentuh persoalan mendasar mengenai penguasaan dan distribusi manfaat kekayaan alam Indonesia.

Menurut Zulhas, perubahan arah kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan kekayaan nasional memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Ia juga mengaitkan kebijakan tersebut dengan agenda pemerintah dalam memperkuat kemandirian ekonomi, terutama melalui program swasembada pangan dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.

Dorong Kemandirian Pangan dan Ekonomi Desa

Zulhas mengatakan, keberpihakan negara kepada rakyat tidak cukup hanya diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah juga perlu memperkuat sektor-sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.

Salah satunya melalui swasembada pangan yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.

Selain itu, pemerintah mendorong pembangunan Koperasi Desa Merah Putih sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa.

Melalui program tersebut, pemerintah berharap aktivitas ekonomi desa dapat berkembang dan masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap kegiatan usaha serta distribusi barang kebutuhan pokok.

Singgung Penyadapan dan Kasus Keracunan MBG

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Buni Yani Desak Gibran Kembalikan Gaji dan Fasilitas Negara Selama Menjabat

Oleh Redaksi · 24 Nov, 14.34 WIB



BANDA ACEH - Pegiat media sosial sekaligus akademisi Buni Yani menyoroti polemik keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan oleh Mahkamah Agung (MA), tetapi harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap konsekuensi hukum dan keuangan negara.Buni Yani merujuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 70 ayat (3) serta Pasal 20 ayat (4), (5), dan (6).

Menurut Buni Yani, apabila keputusan pengangkatan Gibran sebagai pejabat pemerintahan terbukti tidak sah dan menimbulkan konsekuensi keuangan negara, maka harus ada pertanggungjawaban atas seluruh fasilitas dan pembayaran yang telah diterima.

“Gibran harus mengembalikan semua gaji dan fasilitas yang telah diterima karena ijazahnya tidak sah. Jangan sampai negara dan rakyat dirugikan akibat persoalan persyaratan administrasi yang mendasar,” kata Buni Yani di akun X miliknya, Selasa (24/11/2026).

Pernyataan tersebut muncul setelah MA mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026. MA menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 dan memerintahkan pemerintah mencabut dokumen tersebut.

Dalam pertimbangannya, MA menyebut tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat di luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan SMA atau sederajat.

Putusan ini menjadi persoalan serius karena dokumen tersebut berkaitan dengan persyaratan pendidikan dalam pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

Selain persoalan Gibran, Buni Yani juga menyinggung perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah petinggi Polri.

Ia menilai munculnya pertanyaan mengenai siapa pengguna akhir atau pihak yang menerima manfaat dari hasil penyadapan merupakan bagian penting yang harus dijawab penyidik.

“Jokowi jadi tersangka? Kabar burung ini memang sangat masuk akal karena hipotesis awal pengguna akhir sadapan mengarah ke dia. Tekanan publik semakin kuat agar memeriksa dan mentersangkakan dia. Hampir semua ahli hukum yang lurus berpendapat sama,” demikian pernyataan Buni Yani.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan dan dugaan Buni Yani. Hingga kini, belum ada keterangan resmi penyidik yang menetapkan Joko Widodo sebagai tersangka ataupun mengonfirmasi keterlibatannya sebagai pengguna akhir hasil penyadapan.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Wali Nanggroe Bertemu Konjen Singapura, Jajaki Kerja Sama Pendidikan, Investasi hingga Energi Terbarukan

Oleh Redaksi · 23 Nov, 21.39 WIB

BANDA ACEH, MEDAN – Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, melakukan pertemuan dengan Konsul Jenderal Republik Singapura di Medan Dr. Edmund Chia, Senin 23 November 2026.

Kabag Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe Zulfikar Idris mengatakan, pertemuan lanjutan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya itu membahas langkah-langkah penguatan kerja sama di sejumlah sektor strategis.

Setidaknya ada empat fokus utama yang dibahas, yakni pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, investasi dan sektor keuangan, energi terbarukan, serta pengembangan sistem digital.

“Dalam bidang pendidikan, pembahasan diarahkan pada peluang kerja sama perguruan tinggi, peningkatan kapasitas …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Mulai Berjarak dengan Prabowo, Seskab Teddy Bakal Kena Reshuffle?

Oleh Redaksi · 24 Nov, 15.39 WIB



BANDA ACEH - Posisi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya kembali menjadi sorotan. Pegiat media sosial Jhon Sitorus menduga Teddy berpotensi terkena reshuffle kabinet setelah muncul isu pemeriksaan terkait kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Melalui akun X miliknya, Jhon juga menilai Teddy belakangan terlihat tidak lagi sedekat sebelumnya dengan Presiden, bahkan tidak selalu berada di sisi Prabowo seperti yang biasa terlihat.

"Seskab Teddy dikabarkan bakal kena reshuffle. Setelah kasus penyadapan Presiden dan diisukan sempat 'diperiksa', Teddy memang terlihat agak berjarak alias tidak nempel ke Presiden seperti sebelum-sebelumnya," tulisnya di akun X, dikutip Selasa (24/11/2026).

Jhon kemudian mencontohkan kunjungan Prabowo ke Cina. Menurut pengamatannya, jarak antara Teddy dan Presiden terlihat lebih jauh dibandingkan sebelumnya. Ia juga menyinggung ekspresi wajah Teddy yang dinilainya tampak berbeda.

"Saat kunjungan ke Cina misalnya, jarak Teddy terlihat cukup jauh dari presiden Prabowo. Belum lagi dengan ekspresi wajah Teddy yang terlihat murung dan 'menahan sakit' makin menimbulkan pertanyaan," ujar dia.

Perubahan yang ia amati itu membuat Jhon melontarkan sejumlah pertanyaan mengenai hubungan Teddy dan Prabowo, termasuk kemungkinan adanya perombakan posisi di kabinet.

"Apa Presiden Prabowo akan mendepak Teddy? Apakah Prabowo mulai menjauhi Teddy? Apakah Teddy tak sejalan lagi dengan Presiden?" lanjutnya.

Di luar dugaan reshuffle, Jhon juga menyoroti persoalan aturan terkait status kedinasan militer Teddy.

"Lagipula, Teddy sudah seharusnya di-reshuffle jika memang ingin tetap mempertahankan dinas militernya karena ini melanggar UU No. 34 tahun 2004 dan UU No. 3 tahun 2025 tentang TNI," ungkap Jhon.

Ia mengingatkan agar pelanggaran administratif tidak dianggap sebagai hal biasa hanya demi kepentingan pribadi. Menurutnya, pemerintah juga harus memberikan contoh kepatuhan terhadap hukum, bukan justru mempertontonkan pelanggaran aturan dalam jangka panjang.

"Jangan sampai kita menormalisasi pelanggaran-pelanggaran administratif demi kepentingan pribadi. Jangan sampai pemerintah mempertontonkan pelanggaran UU bertahun-tahun yang berkesan menginjak-injak hukum. Penguasa harus taat hukum, bukan hanya rakyat yang dipaksa taat hukum," lanjutnya.

"Jika memang Teddy harus dipertahankan, ya segera pensiun dini. Toh, semua anggota kabinet menganggapnya sebagai menteri kok, bukan pejabat 'eselon 2' yang kesannya seperti 'ngeles' saja. Lagipula, mana ada Letkol yang mau jadi eselon 2?" pungkasnya.

NASIONAL

PDIP Soroti Karakter Amran Sulaiman: Cocok Jadi Eksekutor, tetapi Bisa Jadi Beban Prabowo

Oleh Redaksi · 24 Nov, 15.45 WIB



BANDA ACEH - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus menilai karakter kepemimpinan Andi Amran Sulaiman lebih cocok untuk menjalankan kebijakan teknis daripada membangun konsensus Politik. Menurutnya, karakter tersebut justru berpotensi menyulitkan apabila Amran terpilih menjadi Wakil Presiden di tengah situasi politik dan ekonomi yang penuh tantangan."Amran Sulaiman itu lebih cocok sebagai eksekutor kebijakan atau program, bukan sebagai solidarity maker consensus builder," kata Deddy kepada wartawan, Selasa (24/11/2026).

Deddy menjelaskan karakter Amran yang keras dan dominan dapat menjadi kelebihan ketika menjalankan pengelolaan teknis atau operasional. Namun, pendekatan tersebut dinilainya belum tentu tepat ketika pemerintah harus menghadapi konflik dengan tensi politik tinggi.

"Karakter yang keras dan dominan sangat baik untuk micro management tetapi cenderung akan menyulitkan dalam situasi 'konflik' dengan tensi tinggi di bidang politik, ekonomi dan kondisi geopolitik saat ini," jelasnya.

Ia pun mengingatkan karakter kepemimpinan tersebut perlu dimoderasi agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi pemerintahan Prabowo. Deddy bahkan menilai karakter Amran berpotensi menjadi beban tambahan bagi Presiden apabila tidak dikelola dengan baik.

"Kalau karakter tersebut tidak dimoderasi malah akan berpotensi menjadi beban baru bagi presiden," ujarnya.

Penilaian tersebut menjadi salah satu alasan Deddy menganggap Amran belum menjadi figur paling ideal untuk mengisi posisi Wakil Presiden. Secara pribadi, ia menilai kedua kandidat yang diusulkan Prabowo, yakni Amran dan Sugiono, belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan bangsa saat ini.

"Secara pribadi saya menganggap mereka berdua bukan calon yang paling ideal dalam kondisi sekarang," katanya.

Selain karakter kepemimpinan, Deddy juga menyinggung aktivitas bisnis Amran yang menurutnya dapat menjadi titik lemah apabila menjabat sebagai Wapres. Ia menilai persoalan tersebut perlu diperhatikan karena posisi Wakil Presiden juga berkaitan dengan kepercayaan publik dan investor.

Deddy menambahkan, kemampuan menjalankan kebijakan saja belum cukup untuk mengisi posisi tersebut. Sosok Wapres, menurutnya, juga perlu mampu membangun komunikasi dan konsensus ketika pemerintah menghadapi persoalan politik maupun ekonomi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengusulkan nama Andi Amran Sulaiman dan Sugiono kepada MPR sebagai calon Wakil Presiden. Kedua nama tersebut akan menjalani proses verifikasi sebelum dipilih dalam Sidang MPR RI pada 11 Desember 2026.

NASIONAL

Guntur Tuding Zulhas Bohong soal Nol Keracunan MBG Usai Penyadapan Dibongkar: Logika Anda Berbahaya!

Oleh Redaksi · 23 Nov, 17.53 WIB

BANDA ACEH – Politikus PDI Perjuangan M Guntur Romli melontarkan kritik keras terhadap Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas.

Ia menuding Zulhas menyampaikan informasi yang tidak benar ketika mengklaim tidak ada lagi kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama tiga pekan terakhir pascaterbongkarnya skandal penyadapan ilegal oleh Listyo Sigit Cs.

Guntur Romli, menuding pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut sebagai kebohongan publik bahkan kebohongan besar.

Menurut Guntur fakta di lapangan menunjukkan kasus dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG masih terjadi di sejumlah daerah, meski kasus penyadapan sudah dibongkar.

Kritik itu disampaikan Guntur Romli melalui video dan unggahan di akun media sosial X miliknya, @GunRomli, Senin (23/11/2026).

Dalam unggahannya, Romli secara khusus membantah klaim Zulhas yang mengaitkan meredanya kasus keracunan MBG dengan terbongkarnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

"Kebohongan Zulhas: 'Tidak Ada Keracunan MBG Setelah Penyadapan Listyo Sigit Terbongkar'. Benarkah? Tentu tidak benar. Alias omongan Pak Zulhas bohong. Masih ada keracunan MBG. Mari kita cek," tulis Guntur Romli.

Melalui video tersebut, Romli membeberkan sejumlah kejadian dugaan keracunan MBG yang menurutnya masih berlangsung setelah kasus penyadapan mencuat ke publik.

Bagi Romli, klaim bahwa tidak ada lagi keracunan MBG tidak bisa begitu saja diterima ketika laporan kejadian di sejumlah daerah masih bermunculan.

Zulhas Kaitkan Meredanya Keracunan MBG dengan Kasus Penyadapan

Sebelumnya, Zulhas menjadi sorotan setelah menyampaikan pernyataan mengenai perkembangan program MBG dalam sebuah acara di Universitas Jember, Jawa Timur, Sabtu (21/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Zulhas mengaku merasakan situasi yang lebih tenang karena selama dua hingga tiga pekan terakhir tidak lagi mendengar laporan keracunan MBG.

Menariknya, ia menyandingkan kondisi tersebut dengan terbongkarnya kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah jenderal Polri.

"Beberapa minggu ini, 2-3 minggu ini agak enak setelah adanya penyadapan agak enak rasanya. Betul kan? Nggak ada lagi yang keracunan MBG, Pak," kata Zulhas.

Ketua Umum PAN itu mengaku heran karena sebelumnya laporan keracunan MBG kerap muncul dengan jumlah korban mencapai ratusan orang.

"Saya juga heran. Dulu setiap hari 100, 200 banyak betul ini yang keracunan. 200, 300 sekarang alhamdulillah sudah 3 minggu nggak ada, Pak. Aman," ujarnya

NASIONAL

Weton Pasangan Prabowo-Sugiono vs Prabowo-Amran Sulaiman, Mana yang Lebih Cocok?

Oleh Redaksi · 23 Nov, 18.38 WIB



BANDA ACEH - Di tengah proses usulan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, yakni Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menko PMK Sugiono, muncul sudut pandang budaya Jawa melalui perhitungan weton. Perhitungan ini didasarkan pada hari dan pasaran kelahiran menurut kalender Jawa (Primbon), yang sering digunakan untuk menafsirkan karakter dan kecocokan hubungan. Perlu digarisbawahi bahwa tafsir weton bersifat budaya tradisional, bukan penentu kelayakan Politik atau kepastian masa depan.

• Prabowo Subianto (17 Oktober 1951): Weton Rabu Pon, neptu 14 (Rabu = 7 + Pon = 7).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Plus-Minus Amran Sulaiman dan Sugiono sebagai Calon Wakil Presiden Prabowo

Oleh Redaksi · 23 Nov, 18.53 WIB

BANDA ACEH – Presiden Prabowo Subianto resmi menyerahkan dua nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, yaitu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono. Sidang Paripurna MPR untuk memilih salah satu dari keduanya dijadwalkan 11 Desember 2026, setelah Gibran mengundurkan diri pada 12 November karena alasan pribadi serta dinamika publik terkait persyaratan pencalonan.Nasional.kompasPrabowo menekankan pertimbangan prestasi, pengabdian, kesetiaan kepada negara, serta keyakinan bahwa keduanya mampu bekerja dengan baik. Ia juga menegaskan bahwa banyak nama lain memenuhi syarat, namun konstitusi hanya mengizinkan pengusulan dua nama dengan waktu terbatas setelah konsultasi dengan partai koalisi dan Dewan Pembina Gerindra.

Berikut analisis plus-minus masing-masing figur jika terpilih sebagai wapres sisa masa jabatan 2024-2029.

Plus:

Amran (lahir 27 April 1968 di Bone, Sulawesi Selatan) memiliki rekam jejak panjang di sektor pertanian.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Rekam Jejak Kedekatan Amran Sulaiman dan Jokowi di Tengah Bursa Cawapres

Oleh Redaksi · 24 Nov, 13.33 WIB



BANDA ACEH – Penunjukan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai salah satu dari dua kandidat calon wakil presiden (cawapres) yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Senin (23/11/2026) kembali menyoroti rekam jejak Politik dan profesionalnya. Selain dikenal sebagai pembantu presiden di Kabinet Merah Putih, Amran memiliki sejarah hubungan kerja yang panjang dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Berawal dari Kabinet Kerja 2014

Menurut catatan pemberitaan Bacaini.id dan Kompas.com, relasi profesional antara Amran Sulaiman dan Jokowi bermula pada awal pemerintahan Kabinet Kerja pada Oktober 2014. Saat itu, Jokowi menunjuk Amran—yang berlatar belakang pengusaha asal Sulawesi Selatan dan pemimpin Tiran Group—untuk menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2014–2019.

Meskipun sempat tidak masuk dalam susunan awal kabinet pada periode kedua pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, kepercayaan Jokowi terhadap Amran kembali terlihat menjelang akhir masa jabatannya. Pada 25 Oktober 2023, Jokowi melantik kembali Amran sebagai Menteri Pertanian untuk menggantikan Syahrul Yasin Limpo. Sebelum pelantikan tersebut, iNews.id juga mencatat bahwa Amran beberapa kali bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan meski saat itu ia sudah tidak menjabat di kabinet.

Pandangan Pengamat Politik

Terkait diusulkannya nama Amran ke MPR bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono untuk mengisi posisi wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, sejumlah pengamat turut menyoroti faktor kedekatan Amran dengan Jokowi.

Dilansir dari Kontan.co.id, pengamat politik menilai bahwa publik selama ini kerap mengaitkan sosok Amran sebagai bagian dari lingkaran dekat Jokowi. Namun, pengamat tersebut berpendapat bahwa keputusan Prabowo memilih Amran dan Sugiono lebih didasarkan pada pertimbangan kapasitas kerja untuk membantu jalannya pemerintahan hingga akhir masa jabatan 2029, bukan semata-mata faktor kedekatan politik dengan presiden sebelumnya.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto dalam keterangannya di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (23/11/2026), menegaskan bahwa usulan kedua nama tersebut didasarkan pada pertimbangan prestasi, pengabdian, dan kesetiaan kepada negara.

Respons Jokowi dan Amran

Menanggapi dinamika pencalonan yang menyeret nama mantan menterinya tersebut, Jokowi memilih untuk tidak ikut campur. Dikutip dari Tribunnews, saat menerima kunjungan relawan di Solo pada Senin (23/11/2026), Jokowi menyatakan menghormati penuh hak prerogatif Presiden Prabowo dalam menentukan kandidat wakil presiden dan berpesan agar para relawan tetap menjaga kondusivitas serta mengawal …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Profil Andi Amran Sulaiman, Mentan yang Diusulkan Jadi Cawapres Prabowo

Oleh Redaksi · 23 Nov, 19.16 WIB

BANDA ACEH -Profil Andi Amran Sulaiman menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto mengusulkan namanya sebagai salah satu calon wakil presiden (cawapres) kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Saat ini, Amran menjabat sebagai Menteri Pertanian (Mentan) dalam Kabinet Merah Putih.

Andi Amran Sulaiman dikenal memiliki latar belakang pendidikan di bidang pertanian serta pengalaman panjang sebagai pengusaha dan pejabat pemerintahan. Ia juga pernah menduduki posisi Menteri Pertanian pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum kembali dipercaya mengisi jabatan tersebut pada pemerintahan Prabowo.

Profil dan Biodata Andi Amran Sulaiman

Andi Amran Sulaiman lahir di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, pada 27 April 1968. Ia menempuh pendidikan tinggi di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, dengan mengambil bidang Ilmu Pertanian.

Amran meraih gelar sarjana (S1) pada 1993. Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang magister (S2) yang diselesaikan pada 2003 dan doktor (S3) pada 2012 di universitas yang sama.

Selain memiliki latar belakang akademis di bidang pertanian, Amran juga memperoleh sejumlah penghargaan atas kiprahnya di sektor pertanian dan kewirausahaan. Pada 2007, ia menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan di Bidang Wirausaha Pertanian dari Presiden RI.

Empat tahun kemudian, Amran memperoleh FKPTPI Award pada 2011 di Bali.

Karier dan Bisnis Andi Amran Sulaiman

Di luar aktivitasnya sebagai akademisi dan pejabat pemerintahan, Andi Amran Sulaiman dikenal sebagai pengusaha. Ia membangun dan mengembangkan 14 perusahaan yang tergabung dalam holding Tiran Group.

Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di berbagai sektor usaha, mulai dari pertambangan emas dan nikel, pabrik gula, distribusi semen, produksi pestisida, perkebunan kelapa sawit, hingga stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Amran juga diketahui memiliki hubungan keluarga dengan pengusaha Haji Isam, pemilik PT Jhonlin Agro Raya.

Pengalaman di bidang pertanian dan kewirausahaan menjadi salah satu latar belakang yang mengantarkan Amran ke pemerintahan. Pada 2014, Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Menteri Pertanian dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019.

Perjalanan Jabatan Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian

Jabatan Menteri Pertanian yang pernah diemban Amran pada periode 2014-2019 kemudian dilanjutkan oleh Syahrul Yasin Limpo pada pemerintahan Jokowi periode berikutnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Brigjen Tedjo Kusumo Dipecat dari Polri Buntut Kasus Makar

Oleh Redaksi · 24 Nov, 20.42 WIB



BANDA ACEH - Polri menjatuhkan putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Brigjen Tedjo Kusumo dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) pada kasus dugaan tindak pidana makar terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, hari ini, Selasa (24/11/2026).

"Sanksi administratif yaitu, patsus selama 16 hari sudah dijalani. PTDH sebagai anggota Polri," ucap Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Propam Polri, Jakarta, Selasa (24/11/2026).

Dalam sidang itu, Tedjo diketahui saat bertugas di Densus 88 Antiteror Polri telah lakukan pemufakatan kegiatan pembuntutan sasaran yang tidak ada kaitannya dengan tugas.

Adapun majelis komisi dalam sidang ini adalah Ketua Komisi KKEP Irjen M Zulkarnain, Brigjen Sugeng Putut Wicaksono selaku Wakil Ketua Komisi dan untuk anggota komisi diisi Brigjen Farman,

Trunoyudo sebelumnya menyebut bahwa, Brigjen Tedjo di sidang etik lantaran tidak profesional menjalankan tugasnya.

"Dugaan penyalahgunaan wewenang, tidak profesional serta tidak prosedural pelaksanaan tugas," katanya.

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta ilegal akses.

Dalam pengembangannya, Bareskrim Polri kembali menetapkan enam tersangka dalam pidana makar di kasus penyadapan Presiden.

Mereka adalah, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi, Brigjen Tedjo Kusumo dan Kombes Iman Imanuddin.

Dalam perjalanan kasus ini, Mabes Polri telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik, Selasa 10 November 2026.

Kemudian, Polri juga memecat Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik, Selasa 17 November 2026.

ISLAM

Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Jadi Ajang Kompetisi

Oleh rutyuyun · 23 Nov, 20.36 WIB

EMENDAGRI berpendapat, bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan daerah.

Untuk mendorong peningkatannya, pemerintah daerah (pemda) perlu terus berinovasi, mengoptimalkan potensi wilayah, serta menciptakan iklim usaha yang mampu menarik investasi dan membuka lapangan kerja.

Untuk itu, Kemendagri mendorong terciptanya iklim kompetitif antarpemda melalui pemberian penghargaan dan insentif bagi daerah berprestasi.

Upaya ini diharapkan dapat memacu daerah untuk meningkatkan kinerja, termasuk dalam mengembangkan potensi ekonomi masing-masing.

Tujuan pemberian insentif menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian adalah menciptakan persaingan positif antardaerah, sekaligus mendorong daerah lain agar bekerja lebih keras meningkatkan capaian pembangunan.

Intinya, daerah yang belum beruntung karena belum berprestasi harus bekerja lebih keras lagi.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Raden Gani Muhamad menyebut inovasi harus menjadi bagian dari cara pemerintah bekerja.

Inovasi yang didukung ekosistem adaptif, inklusif, dan berkelanjutan dapat membantu daerah merespons perubahan serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Di antaranya, pengembangan inovasi sektor pertanian, pengolahan hasil pertanian, UMKM, dan pariwisata.

Pada Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III Regional Sumatera, Pemkot Pekanbaru Riau, yang berhasil meraih Juara I kategori Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam dan berhak memperoleh bantuan pemerintah sebesar Rp 2 miliar.

Hal itu karena pertumbuhan ekonomi kota Pekan Baru mencapai 7,3 persen. Realisasi investasi sepanjang Januari-September 2026 tercatat sebesar Rp 9,28 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 8.534 orang.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Prabowo Usulkan Amran dan Sugiono Jadi Cawapres, Ray Rangkuti: Bisa Jadi Ada yang Difavoritkan

Oleh Redaksi · 24 Nov, 12.55 WIB



BANDA ACEH - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menduga Presiden Prabowo Subianto telah memiliki sosok favorit untuk mengisi posisi calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Dugaan itu muncul setelah Presiden mengirimkan dua nama kandidat cawapres kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Kedua nama tersebut yakni Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono.

Ray memperkirakan, salah satu nama akan mendapat penekanan khusus dari Prabowo untuk menjadi bahan pertimbangan MPR dalam proses pemilihan. Nama tersebut juga dinilai berpotensi menjadi acuan bagi partai-partai koalisi pemerintah.

"Siapakah di antara keduanya yang akan favorit? Saya tidak tahu, tapi dapat diduga presiden sendiri memiliki nama favorit. Istilah saya kemungkinan adalah nama ini yang distabilo oleh presiden sebagai nama favorit yang diserahkan kepada MPR, yang diharapkan menjadi acuan bagi MPR untuk dipilih, termasuk kepada partai koalisi presiden," ujar Ray kepada iNews.id, Selasa (24/11/2026).

Ray menyebut setidaknya ada tiga faktor yang kemungkinan menjadi pertimbangan Prabowo dalam menentukan sosok pendampingnya.

Faktor pertama adalah keamanan Politik. Menurut Ray, Prabowo kemungkinan mempertimbangkan figur yang tidak berpotensi berkembang menjadi kekuatan politik baru atau pesaing bagi dirinya. Aspek hubungan personal dan kedekatan dalam struktur kepemimpinan juga dinilai menjadi pertimbangan.

"Pertama, orang yang dirasa aman bagi presiden. Aman itu ada banyak aspek. Salah satunya adalah orang yang kemungkinan tidak akan lahir sebagai bintang baru. Atau aman dalam relasi hubungan. Hubungan seperti anak buah dan ketua," jelasnya.

Faktor kedua berkaitan dengan keberlanjutan kekuasaan. Ray menilai, Prabowo kemungkinan mempertimbangkan sosok yang tidak berpotensi menjadi pesaing politik atau memutus hubungan politik dengannya pada masa mendatang.

"Kedua, soal kelanjutan kekuasaan. Kelanjutan ini dapat dimaknai sebagai bukan bakal saingan politik, atau tidak akan meninggalkannya di masa depan. Penting mengingat bahwa setidaknya dalam dua kali pemilihan presiden kita itu terjadi perpisahan politik. Misalnya Pak SBY dengan Ibu Mega lalu Jokowi dengan Ibu Mega. Saya kira Pak Prabowo belajar dari pengalaman ini. Prabowo sendiri sering mengalami hal seperti ini," tuturnya.

Sementara faktor ketiga adalah penerimaan keluarga Prabowo terhadap sosok yang dipilih. Ray menilai, faktor tersebut berkaitan dengan keberlanjutan kepemimpinan dan pewarisan Partai Gerindra agar tetap berada dalam kendali keluarga …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Penampakan Brigjen Tedjo Kusumo usai Jalani Sidang Etik terkait Kasus Makar

Oleh Redaksi · 24 Nov, 18.34 WIB



BANDA ACEH - Polri rampung menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Brigjen Tedjo Kusumo terkait kasus dugaan tindak pidana makar penyadapan ilegeal terhadap Presiden Prabowo Subianto, hari ini, Selasa (24/11/2026).

Tedjo keluar dari ruang sidang di Gedung Divpropam Polri sekitar pukul 18.05 WIB. Tedjo tampak mengenakan topi, masker dan pakaian tahanan berwarna biru bernomor 04.

Tangannya juga terlihat diborgol dan dikawal ketat oleh Brimob bersenjata lengkap. Tak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya dan langsung masuk ke dalam mobil Rantis Brimob.

Sementara, belum diketahui hasil sidang KKEP. Pasalnya, awak media masih menunggu konferensi pers resmi dari pihak Polri yang sampai saat ini belum dimulai.

Adapun majelis komisi dalam sidang ini adalah Ketua Komisi KKEP Irjen M Zulkarnain, Brigjen Sugeng Putut Wicaksono selaku Wakil Ketua Komisi dan untuk anggota komisi diisi Brigjen Farman,

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkapkan bahwa, Brigjen Tedjo di sidang etik lantaran tidak profesional menjalankan tugasnya.

"Dugaan penyalahgunaan wewenang, tidak profesional serta tidak prosedural pelaksanaan tugas," ujar Trunoyudo.

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta ilegal akses.

Dalam pengembangannya, Bareskrim Polri kembali menetapkan enam tersangka dalam pidana makar di kasus penyadapan Presiden.

Mereka adalah, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi, Brigjen Tedjo Kusumo dan Kombes Iman Imanuddin.

Dalam perjalanan kasus ini, Mabes Polri telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik, Selasa 10 November 2026.

Kemudian, Polri juga memecat Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik, Selasa 17 November 2026

LIFESTYLE

Harta Amran Sulaiman Jauh Lebih Kaya dari Sugiono

Oleh Redaksi · 23 Nov, 19.09 WIB

BANDA ACEH -Presiden Prabowo Subianto resmi mengusulkan dua nama kandidat Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Senin, 23 November 2026.

Dua nama yang diusulkan tersebut adalah Andi Amran Sulaiman yang saat ini menjabat Menteri Pertanian dan Sugiono yang saat ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Usulan itu disampaikan langsung Prabowo kepada MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Bersama ini saya mengusulkan dua calon Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu, Satu, Andi Amran Sulaiman. Dua, Sugiono. Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengharapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dapat menindaklanjuti usulan dimaksud," kata Ketua MPR, Ahmad Muzani, membacakan surat dari Presiden Prabowo.

Dari sisi harta kekayaan, penelusuran RMOL di website Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Amran tercatat memiliki kekayaan jauh lebih besar dibandingkan Sugiono.

Berdasarkan LHKPN periodik 2025, kekayaan Amran mencapai Rp1.721.413.658.505 (Rp1,72 triliun). Sementara itu, total kekayaan Sugiono tercatat sebesar Rp13.153.336.184 (Rp13,15 miliar). Dengan demikian, terdapat selisih kekayaan keduanya sebesar Rp1.708.260.322.321 atau sekitar Rp1,7 triliun. Kekayaan Amran tercatat sekitar 130 kali lipat dibandingkan Sugiono.

Berdasarkan data LHKPN KPK, Amran menyampaikan laporan periodik 2025 pada 14 Maret 2026. Laporan tersebut berstatus verifikasi administratif lengkap dan mencatat jabatannya sebagai Menteri Pertanian.

Harta kekayaan Amran terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp304.120.937.750 (Rp304,12 miliar), alat transportasi dan mesin Rp18.664.760.000 (Rp18,66 miliar), harta bergerak lainnya Rp2.814.812.500 (Rp2,81 miliar), surat berharga Rp1.113.894.000.000 (Rp1,11 triliun), kas dan setara kas Rp595.749.878.155 (Rp595,74 miliar), serta harta lainnya Rp38.520.100 (Rp38,52 juta).

Dalam laporan tersebut, Amran juga mencatat utang sebesar Rp313.869.250.000 (Rp313,86 miliar). Setelah dikurangi utang, total kekayaan bersihnya mencapai Rp1.721.413.658.505 (Rp1,72 triliun).

Dari 60 bidang tanah dan bangunan yang dilaporkan, sejumlah aset bernilai besar berada di Jakarta Selatan dan Makassar. Di antaranya tanah seluas 7.000 meter persegi di Jakarta Selatan senilai Rp62.817.371.863 (Rp62,81 miliar), tanah seluas 3.275 meter persegi di Makassar senilai Rp49,125 miliar, serta tanah seluas 460.000 meter persegi di Makassar senilai Rp23 miliar.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Kapolres Aceh Selatan Raih Penghargaan Kementerian Kehutanan atas Perlindungan Kawasan Konservasi

Oleh Redaksi · 23 Nov, 23.51 WIB

BANDA ACEH, TAPAKTUAN – Kapolres Aceh Selatan AKBP T. Ricki Fadlianshah menerima piagam penghargaan dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, atas peran aktif dan kontribusinya dalam mendukung penegakan hukum serta perlindungan kawasan konservasi di Kabupaten Aceh Selatan, Senin, 23 November 2026.

Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah atas komitmen dan dukungan jajaran Polres Aceh Selatan dalam menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya kawasan hutan konservasi yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

Piagam penghargaan itu diberikan atas kontribusi Kapolres Aceh Selatan dalam mendukung penegakan hukum terkait kasus perambahan kawasan dan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di Suaka Margasatwa Rawa Singkil, Kabupaten Aceh Selatan, pada 2026. Penghargaan tersebut diterbitkan di Jakarta pada 28 Oktober 2026 dan ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal KSDAE, Dr. Ir. Mahfudz.

Penyerahan piagam penghargaan disampaikan melalui Kepala Seksi Konservasi Wilayah II BKSDA Aceh, Darwin. Pemberian penghargaan ini sekaligus mencerminkan pentingnya sinergi antara Polri dan jajaran BKSDA dalam menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam.

Kolaborasi lintas instansi tersebut diharapkan terus diperkuat untuk mencegah perambahan hutan serta melindungi kawasan konservasi dari berbagai aktivitas yang dapat mengancam kelestarian lingkungan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Jejak Langkah Hukum Amran Sulaiman Menghadapi Kritik Kembali Disorot di Tengah Bursa Cawapres

Oleh Redaksi · 24 Nov, 13.40 WIB



BANDA ACEH - Munculnya nama Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, sebagai salah satu kandidat calon wakil presiden (cawapres) yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Senin (23/11/2026) membawa kembali diskursus publik mengenai gaya kepemimpinannya. Di balik catatan kinerjanya di sektor pangan, rekam jejak Amran dalam merespons kritik melalui jalur hukum—baik terhadap media massa maupun pengamat—turut menjadi sorotan tajam menjelang Sidang Paripurna MPR pada 11 Desember 2026 mendatang.Pengusulan nama Amran bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono dilakukan untuk mengisi kekosongan kursi wakil presiden guna menyelesaikan sisa masa jabatan hingga 2029. Seiring menguatnya bursa pencalonan tersebut, berbagai kalangan masyarakat sipil dan pemerhati demokrasi meninjau kembali sejumlah langkah hukum yang pernah ditempuh Amran saat menjabat di kabinet.

Gugatan Ratusan Miliar terhadap Media Massa

Salah satu catatan yang paling menyita perhatian publik adalah kecenderungan Amran membawa sengketa pemberitaan ke ranah gugatan perdata bernilai fantastis. Pola ini tercatat terjadi dalam dua periode kepemimpinannya di Kementerian Pertanian:

• Gugatan Rp 200 Miliar kepada Tempo (2025): Pada September 2025, Amran melayangkan gugatan perdata senilai Rp 200 miliar terhadap Majalah Berita Mingguan Tempo terkait penerbitan artikel dan sampul bertajuk "Poles-poles Beras Busuk". Gugatan tersebut menuai kecaman luas dari organisasi pers seperti Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan koalisi masyarakat sipil yang menilainya sebagai ancaman terhadap kebebasan pers serta upaya membungkam kritik melalui tekanan finansial. Pada November 2025, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya memutuskan tidak menerima gugatan tersebut (niet ontvankelijke verklaard) dengan pertimbangan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara sengketa pers sebelum rekomendasi Dewan Pers dijalankan sepenuhnya.

• Gugatan Rp 100 Miliar Lebih pada Era Kabinet Kerja (2019): Langkah serupa pernah terjadi di penghujung masa jabatan pertamanya pada November 2019. Saat itu, Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Amran menggugat Tempo dengan nilai ganti rugi lebih dari Rp 100 miliar menyusul terbitnya laporan investigasi berjudul "Swasembada Gula Cara Amran dan Isam".

Pelaporan Pidana terhadap Pengamat

Selain berhadapan dengan institusi media, Amran juga tercatat pernah menggunakan instrumen pidana untuk merespons kritik dari kalangan akademisi dan pengamat kebijakan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Profil Komjen Hendro Pandowo yang Akan Pimpin Sidang Etik Listyo Sigit

Oleh Redaksi · 24 Nov, 20.34 WIB



BANDA ACEH - Polri telah menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Kamis (26/11). Komjen Hendro Pandowo ditunjuk sebagai ketua majelis sidang KKEP tersebut.Lalu ada Komjen Pol Rudi Darmoko sebagai wakil ketua. Anggotanya terdiri dari Komjen Pol Dadang Hartanto, Komjen Pol Dedi Kusuma Bakti, dan Komjen Pol Dwiyono.

Sosok Komjen Hendro cukup familiar karena kerap memegang peranan penting di Polri. Lulusan Akpol 1991 ini memang berpengalaman di bidang reserse. Saat ini ia menjabat sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Umum Bareskrim Polri.

Pria kelahiran 12 Januari 1969 tersebut sudah beberapa kali mengemban jabatan penting di Polri. Di antaranya Kapolres Jakarta Pusat (2014), Kapolres Bandung (2016), Karo Provos Divpropam Polri (2018).

Ia lalu menjadi Wakapolda Metro Jaya sejak 3 Maret 2020 hingga 2023. Setelah itu Hendro dimutasi sebagai Staf Ahli Sosial Budaya (Sahlisosbud) Kapolri hingga 2024, lalu Kapolda Bangka Belitung hingga 2025. Setelah itu ia mendapat penugasan di luar struktur yakni sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Hukum pada 2025 hingga Oktober 2026.

Brigjen Hendro beberapa kali menangani serangkaian aksi teror yang skalanya cukup besar. Tidak hanya itu, ia juga sering turun langsung saat penggerebekan kasus-kasus menonjol.

Beberapa di antaranya adalah penggerebekan markas FPI Petamburan pada 2014, ikut melumpuhkan teroris saat Bom Thamrin/Bom Sarinah pada 14 Januari 2016, menangani kasus ledakan bom di Taman Pendawa Bandung, 27 Februari 2017, hingga sejumlah penangkapan dan pemberantasan narkoba di sejumlah daerah.

EDUKASI

Pengalaman 27 Tahun, Dr. Mukhsinuddin Maju Calon Ketua STAIN Meulaboh

Oleh Biro Meulaboh · 23 Nov, 17.57 WIB



Calon Ketua STAIN Meulaboh, Dr. H. Mukhsinuddin, S. Ag. M.M,FOTO/ist

MEULABOH – Dr. H. Mukhsinuddin, S.Ag., M.M., resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh untuk periode 2027–2031. Berkas pendaftarannya diterima panitia seleksi pada Senin (23/11/26) di Meulaboh, Aceh Barat.

Pencalonan tersebut dilakukan menjelang berakhirnya masa jabatan Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh periode 2023–2027 pada Februari 2027 mendatang.

Mukhsinuddin mengatakan, pencalonannya didasarkan pada komitmen untuk membawa kampus tersebut semakin maju melalui tiga visi utama, yakni membangun kampus bermutu, berdaya saing, serta berkarakter dengan landasan iman dan takwa (imtaq) serta ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

"Saya ingin membangun kampus yang bermutu, berdaya saing dengan perguruan tinggi lainnya, serta memiliki karakter yang berlandaskan imtaq dan iptek," ujarnya saat diwawancarai di Meulaboh.

Ia mengaku telah mengabdi di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh selama lebih dari 27 tahun. Sepanjang pengabdiannya, Mukhsinuddin pernah menjabat Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan, serta kini dipercaya sebagai Ketua Program Studi Magister …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

HIBURAN

Bagaimana Animasi Digital Mengubah Cara Orang Menikmati Hiburan Online

Oleh Redaksi · 23 Nov, 18.30 WIB

Hiburan online saat ini terlihat sangat berbeda dibandingkan dengan beberapa tahun lalu. Dahulu, situs web lebih banyak mengandalkan gambar statis, video sederhana, dan grafis dasar. Kini, animasi digital menghadirkan gerakan, karakter interaktif, serta efek visual kreatif di berbagai platform hiburan.

Perubahan ini bukan hanya tentang membuat tampilan layar menjadi lebih menarik. Animasi digital juga memengaruhi cara orang berinteraksi dengan konten, memahami informasi, dan menikmati aktivitas online. Mulai dari layanan streaming hingga game seluler, fitur animasi semakin menjadi bagian penting dari pengalaman digital sehari-hari.

Animasi digital memungkinkan situs web dan aplikasi memberikan respons visual terhadap tindakan pengguna. Alih-alih hanya menampilkan gambar diam, platform dapat menghadirkan elemen bergerak, latar belakang yang berubah, serta respons animasi yang interaktif.Detail kecil tersebut membantu pengguna memahami apa yang sedang terjadi di layar mereka. Selain itu, animasi dapat membuat aktivitas digital terasa lebih alami dan menyenangkan.

Bayangkan ketika seseorang membuka game di ponsel. Karakter mungkin melambaikan tangan, tombol berubah bentuk, atau rangkaian animasi memperkenalkan level berikutnya.Efek serupa juga dapat ditemukan dalam berbagai bentuk hiburan digital, seperti:

• Platform streaming dengan menu dan pratinjau animasi.

• Game seluler yang menampilkan karakter bergerak dan lingkungan interaktif.

• Aplikasi pendidikan yang menjelaskan konsep melalui contoh animasi.

• Situs hiburan online yang menggunakan efek visual untuk menggambarkan berbagai aktivitas.

Perbedaan utamanya adalah animasi memberikan umpan balik visual secara langsung sehingga pengguna tidak perlu menebak apakah tindakan mereka berhasil dilakukan.

Game online merupakan salah satu bidang yang sangat bergantung pada animasi digital. Pengembang menggabungkan grafis bergerak, efek suara, dan elemen interaktif untuk menciptakan pengalaman bermain yang lebih responsif.Animasi juga membantu menyampaikan petunjuk permainan, menunjukkan tindakan yang telah selesai, serta membedakan berbagai tahapan permainan.

Dalam banyak game online, animasi memiliki fungsi praktis yang lebih luas daripada sekadar mempercantik tampilan.Sebagai contoh, gerakan karakter dapat menunjukkan arah yang perlu diikuti pemain. Simbol yang berubah mungkin menandakan bahwa suatu tindakan telah selesai, sementara tutorial animasi membantu menjelaskan kontrol permainan yang belum dikenal.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

PDIP Kritik Pilihan Cawapres Prabowo, Amran dan Sugiono Dinilai Belum Ideal

Oleh Redaksi · 24 Nov, 13.07 WIB



BANDA ACEH - PDI Perjuangan merespons dua nama calon wakil presiden (cawapres) yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto ke MPR RI, pada Senin (23/11). Kedua kandidat cawapres itu yakni, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menilai, kedua kandidat cawapres belum menjadi sosok paling ideal untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai wakil presiden. Namun, ia memahami keputusan pengusulan kandidat cawapres merupakan hak prerogatif presiden.

"Siapapun yang diusulkan, itu hak prerogatif presiden, tinggal kita melihat apakah akan bermanfaat dalam mengurangi beban yang dihadapi pemerintahan ke depan," kata Deddy kepada wartawan, Selasa (24/11).

Deddy berpandangan, Amran maupun Sugiono bukan figur yang paling ideal untuk mengisi posisi orang nomor dua di pemerintahan dalam situasi saat ini. Dia menilai, masing-masing memiliki karakter dan kapasitas yang perlu dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan pemerintahan.

Menurut Deddy, Amran lebih tepat ditempatkan sebagai pelaksana kebijakan atau program pemerintah. Karakter Amran yang keras dan dominan dinilai memiliki kelebihan untuk menjalankan pengawasan serta pengendalian program secara langsung. Namun, karakter tersebut belum tentu layak untuk menghadapi dinamika Politik yang membutuhkan kemampuan membangun kesepakatan.

"Amran Sulaiman itu lebih cocok sebagai eksekutor kebijakan atau program, bukan sebagai solidarity maker consensus builder. Karakternya yang keras dan dominan sangat baik untuk micro management tetapi cenderung akan menyulitkan dalam situasi "konflik" dengan tensi tinggi di bidang politik, ekonomi dan kondisi geopolitik saat ini," ujarnya.

Dia mengingatkan, karakter tersebut justru berpotensi menambah persoalan bagi Presiden apabila tidak diimbangi dengan kemampuan meredam ketegangan. Selain itu, Deddy menyoroti keterlibatan Amran dalam sejumlah aktivitas bisnis yang dinilai masih menjadi pertanyaan publik maupun investor.

"Kalau karakter tersebut tidak dimoderasi malah akan berpotensi menjadi beban baru bagi presiden. Keterlibatan Amran dalam berbagai aktivitas bisnis yang dipertanyakan publik dan investor juga akan menjadi titik lemah Amran sebagai Wapres," tegasnya.

Sementara itu, Deddy menilai sosok Sugiono juga memiliki sejumlah keterbatasan untuk menjalankan peran sebagai wakil presiden. Dia menyoroti faktor usia, pengalaman, serta kapasitas kepemimpinan yang dinilai belum cukup untuk mengonsolidasikan berbagai kekuatan di pemerintahan, birokrasi, politik, maupun kalangan pelaku ekonomi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

SPORT

Wali Kota Sabang Hadiri Pembukaan Kapolres Cup 2026, Dorong Pembinaan Bakat Sepak Bola

Oleh Redaksi · 23 Nov, 23.35 WIB

BANDA ACEH, SABANG – Turnamen sepak bola Kapolres Cup 2026 resmi dibuka oleh Kapolres Sabang AKBP Ahmad Faisal Pasaribu, di Lapangan Sepak Bola Gampong Iboih. Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam, turut menghadiri pembukaan turnamen yang menjadi wadah bagi para pemain untuk mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga sepak bola.

Pembukaan turnamen turut dihadiri unsur Forkopimda Kota Sabang, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Ketua KONI Sabang, Ketua PSSI Sabang, para undangan, panitia, serta peserta turnamen. Prosesi pembukaan ditandai dengan tendangan bola pertama oleh Wali Kota Sabang bersama Kapolres Sabang sebagai tanda dimulainya kompetisi.

Atas nama Pemerintah Kota Sabang, Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Sabang beserta panitia pelaksana atas penyelenggaraan turnamen tersebut. Menurutnya, kompetisi seperti ini menjadi ruang positif bagi generasi muda untuk menyalurkan minat, mengasah kemampuan, sekaligus membuka peluang lahirnya pemain-pemain potensial dari Kota Sabang.

“Turnamen ini bukan hanya tentang mengejar kemenangan dan prestasi, tetapi juga menjadi sarana membangun karakter, kedisiplinan, kebersamaan, sportivitas, serta semangat persatuan. Kita berharap melalui kompetisi ini lahir bibit-bibit atlet sepak bola yang mampu membawa nama baik Sabang di berbagai ajang,” kata Zulkifli, Senin (23/11) sore.

Wali Kota Sabang juga mengingatkan seluruh tim yang bertanding agar menjaga sportivitas, menghormati wasit dan sesama pemain, serta menerima hasil pertandingan dengan lapang dada. Menurutnya, kompetisi harus menjadi ruang mempererat silaturahmi dan persaudaraan, bukan menimbulkan permusuhan.

“Saya mengajak seluruh masyarakat dan suporter untuk memberikan dukungan secara positif, menjaga ketertiban, serta bersama-sama menciptakan suasana pertandingan yang aman dan kondusif. Semoga Kapolres Cup 2026 dapat menjadi hiburan yang sehat bagi masyarakat sekaligus menumbuhkan semangat olahraga di Kota Sabang,” ujarnya.

Pemerintah Kota Sabang mendukung kegiatan olahraga yang turut mendorong pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berkarakter, disiplin, dan berprestasi. Kapolres Cup 2026 diharapkan berlangsung lancar serta memberikan manfaat bagi perkembangan sepak bola dan kebersamaan masyarakat Kota Sabang.

Sementara itu, Kapolres Sabang AKBP Ahmad Faisal Pasaribu menyampaikan bahwa turnamen tersebut diharapkan menjadi wadah bagi para pemain untuk menunjukkan kemampuan, mengembangkan potensi, dan berkompetisi secara sehat.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Penetapan 6 Tersangka Makar Jangan Sampai hanya jadi Puncak Gunung Es

Oleh Redaksi · 24 Nov, 12.43 WIB



BANDA ACEH -Penetapan enam tersangka dugaan makar dengan menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo harus menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan yang lebih luas.

Direktur Eksekutif Adidaya Institute, Rahman Toha berpandangan, apabila memang terdapat skenario sistematis untuk melemahkan pemerintahan yang sah, penyidikan tidak semestinya hanya menyasar aktor internal kepolisian, melainkan juga mendalami kemungkinan keterlibatan aktor eksternal beserta infrastruktur gerakannya.

“Apakah tersangka makar memang hanya enam orang atau sementara ini baru enam orang? Jika konstruksi perkara berhenti pada enam personel kepolisian, pengungkapan kasus ini terkesan minimalis dan berisiko prematur dalam membangun konstruksi pembuktian makar,” ujar Rahman, Selasa, 24 November 2026.

Rahman mendorong penyidik menelusuri secara komprehensif alur pendanaan, koordinator lapangan, hingga pengendali operasi media sosial yang berpotensi terhubung dengan jaringan para tersangka.

Selain itu, Adidaya Institute meminta aparat mendalami kemungkinan adanya penunggangan aksi-aksi masyarakat sipil maupun pemanfaatan simbol perlawanan di ruang publik, seperti bendera One Piece hingga salam tiga jari oleh aktor tertentu tanpa disadari peserta aksi.

“Harus dibedakan antara aspirasi masyarakat yang legitimate dalam demokrasi dengan kemungkinan operasi Politik terselubung yang memanfaatkan aspirasi tersebut. Simbol perlawanan, kritik terhadap pemerintah, maupun demonstrasi bukanlah bukti makar dengan sendirinya,” sambungnya.

Rahman pun mengingatkan masyarakat agar kritis dan tidak mudah terbawa arus penggunaan simbol yang berpotensi disusupi narasi melawan hukum terhadap pemerintahan yang sah.

Lebih jauh, ia mengusulkan agar penyidik menguji secara objektif apakah berbagai gejolak sosial-politik sebelumnya, termasuk demonstrasi berujung kerusuhan pada akhir Agustus 2025 hingga kampanye negatif terorganisasi terhadap program strategis nasional berdiri sendiri atau memiliki benang merah sebagai prakondisi dugaan makar.

“Ini merupakan hipotesis yang harus diuji melalui bukti, bukan sekadar asumsi politik,” ungkap Rahman.

Kendati demikian, Rahman mengingatkan bahwa pembuktian perkara makar menuntut konstruksi hukum yang kokoh dengan menghubungkan motif, aktor, pendanaan, komunikasi, serta tindakan konkret yang memenuhi unsur pidana, sembari tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan kebebasan sipil.

“Jangan sampai skenario besar dibuktikan dengan konstruksi perkara yang terlalu kecil. Namun, jangan pula membangun tuduhan besar dengan bukti yang kecil. Pada akhirnya, seluruh konstruksi tersebut harus mampu dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan,” pungkasnya.

ACEH

Bupati Tarmizi Janjikan Solusi bagi Korban Kebakaran di Blang Beurandang

Oleh Biro Meulaboh · 23 Nov, 18.21 WIB

MEULABOH– Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM, bersama Kepala Dinas Sosial, BPBD, dan Baitul Mal mengunjungi sekaligus menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran rumah di Kompleks Caritas, Desa Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Senin (23/11/26).

Kebakaran yang terjadi pada Minggu (22/11/26) malam itu menghanguskan dua unit rumah warga hingga mengalami rusak berat. Seluruh harta benda milik korban dilaporkan tidak berhasil diselamatkan.

Bupati Tarmizi mengatakan, pemerintah daerah melalui BPBD, Dinas Sosial, dan Baitul Mal telah menyalurkan bantuan kebutuhan sandang dan pangan untuk memenuhi kebutuhan mendesak para korban.

“Tidak ada satu pun harta benda yang dapat diselamatkan. Hari ini pemerintah menyalurkan bantuan sandang dan pangan lengkap untuk kebutuhan masa panik,” kata Tarmizi.

Ia menyebutkan, pemerintah daerah juga akan mengupayakan solusi jangka panjang, termasuk kemungkinan membantu …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Paradoks Kasus Makar: Tersangka Perintahkan Buat Konten Serang Polri yang Notabene Institusinya Sendiri

Oleh Redaksi · 24 Nov, 10.55 WIB



BANDA ACEH — Penetapan enam tersangka kasus dugaan makar oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyisakan tanda tanya besar di ruang publik. Salah satu detail yang menyita perhatian adalah peran Kombes Pol Iman Imanuddin (II)—yang berlatar belakang perwira menengah Polri dan sebelumnya menjabat Kapolres Bogor—yang disebut memerintahkan pembuatan konten yang menyerang institusi kepolisian sendiri.Bagi sebagian masyarakat, langkah oknum aparat kepolisian yang justru mengarahkan serangan narasi terhadap institusinya tampak paradoks. Namun, berdasarkan keterangan resmi yang disampaikan Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers pada Senin (23/11/2026) malam, peran tersebut dipandang penyidik sebagai bagian dari skenario yang lebih luas untuk memengaruhi opini dan situasi Politik.

Motif Utama: Konstelasi Politik dan Pelemahan Kepercayaan Publik

Dalam pemaparannya, Kabareskrim menyebut bahwa para tersangka diduga melakukan permufakatan persiapan dan permulaan makar dengan motif utama mempertahankan jabatan Kapolri untuk kepentingan konstelasi politik. Caranya, menurut polisi, adalah dengan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam konteks strategi mobilisasi opini dan aksi massa, serangan narasi terhadap institusi negara maupun aparat penegak hukum kerap digunakan untuk memantik sentimen publik, memperkeruh suasana, dan mendorong eskalasi protes. Penyidik menyebut Iman Imanuddin tidak hanya memerintahkan pembuatan konten yang menyerang Polri, tetapi juga memesan 500 kaus bermotif salam tiga jari yang direncanakan dipakai dalam kegiatan demonstrasi, sementara sejumlah barang bukti lain seperti kaus bertuliskan "ACAB" juga ditemukan dalam rangkaian pengusutan.

Pembagian Peran Enam Tersangka

Kasus dugaan makar ini merupakan pengembangan dari penyidikan dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik yang sebelumnya menjerat sejumlah petinggi dan mantan pejabat Polri. Dalam perkara dugaan makar ini, Bareskrim menetapkan enam tersangka yang berasal dari lingkungan kepolisian, yakni:

• Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP)
• Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN)
• Irjen Eko Hadi Santoso (EH)
• Irjen Slamet Uliandi (SU)
• Brigjen Tedjo Kusumo (TK)
• Kombes Pol Iman Imanuddin (II)

Masing-masing tersangka diduga memiliki peran berbeda—mulai dari rapat permufakatan, surveilans lapangan, penggalangan pihak eksternal dan dana operasional, penghapusan jejak digital, penggerakan massa demonstrasi, hingga produksi konten serangan terhadap Polri dan perlengkapan aksi.

Jerat Hukum dan Proses Berjalan

Atas dugaan perbuatan tersebut, para tersangka dijerat pasal-pasal terkait tindak pidana makar dan penghasutan/penyertaan dalam KUHP baru serta Undang-Undang …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Terungkap! Uang Rp735 Juta di Kasus Makar Berasal dari Para Tersangka

Oleh Redaksi · 24 Nov, 09.36 WIB



BANDA ACEH - Bareskrim Polri mengungkap sumber dan pengelolaan uang Rp735 juta dalam kasus dugaan makar terkait penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebut uang tersebut berasal dari para tersangka dan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional.

Komjen Asep menjelaskan, salah satu tersangka berinisial ASN menerima uang dari tersangka lainnya. Dana tersebut kemudian digunakan untuk mendukung kegiatan operasional kelompok yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

"Terkait dengan sumber dana, ya. Tadi atau sekarang kita bisa saksikan ada uang di depan, itu memang tersangka ASN itu mendapatkannya dari tersangka yang lainnya," kata Komjen Asep dikutip Selasa (24/11/2026).

Menurut Asep, temuan tersebut sesuai dengan barang bukti yang disita penyidik. Polisi mengamankan uang tunai sebesar Rp735 juta yang disimpan dalam pecahan Rp100.000.

"Ya, itu mereka untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya. Operasionalnya mereka didukung oleh tersangka yang lain tersebut. Ya, aliran dananya kepada ASN untuk kegiatan operasionalnya. Yang sementara yang kami dapatkan seperti itu," ujarnya.

Meski demikian, penyidik masih mendalami sumber dan aliran dana dari para tersangka.

Komjen Asep mengatakan, pengungkapan perkara ini tidak mudah karena para tersangka diduga bergerak dalam kelompok kecil dan tidak memberikan pengakuan saat menjalani pemeriksaan.

"Antara satu dengan yang lainnya, ya, kalau kita tanya dan lakukan pemeriksaan tentunya mereka tidak pernah ada yang menyampaikan pengakuan," ucapnya.

Dia menambahkan, penyidik mengungkap aliran dana tersebut berdasarkan keterangan saksi, petunjuk, serta barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan dan pemeriksaan digital forensik terhadap perangkat milik para tersangka.

"Tapi kami mendapatkannya dari saksi-saksi, kemudian petunjuk, dan bukti-bukti yang sudah kita dapatkan, baik pada saat penggeledahan maupun pada saat melakukan digital forensik dari device para tersangka yang sudah kami sita," katanya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan sejumlah nama sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.

Dalam pengembangan penyidikan, Bareskrim kembali menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan makar terkait kasus penyadapan tersebut.

Mereka yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Slamet Uliandi, Brigjen Tedjo Kusumo, dan Kombes Iman Imanuddin.

Dalam proses penanganan perkara ini, Mabes Polri juga menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EKONOMI

Affordable Digital PR and Media Placements: How Businesses Can Build Visibility Without Overspending

Oleh Redaksi · 23 Nov, 19.43 WIB

In today's competitive digital landscape, businesses need more than a well-designed website to establish their presence online. Building brand awareness, earning credibility, and reaching the right audience require a consistent marketing strategy. Digital PR and media placements have become valuable tools for companies looking to strengthen their online visibility and connect with potential customers. However, high-quality media placements can often come with expensive pricing, making them difficult to access for startups, small businesses, marketing agencies, and growing brands. This is where affordable digital PR solutions can make a meaningful difference.

NextFlow PR is a newly established digital PR agency focused on making media placements and promotional opportunities more accessible to businesses through competitive pricing, a broad publisher network, and customized promotional solutions

Digital PR is an important part of a company's online marketing strategy. By securing placements on relevant publications and media platforms, businesses can introduce their products, services, and expertise to audiences who may not otherwise discover their brandMedia coverage can support several marketing objectives, including brand recognition, referral traffic, reputation building, and search engine visibility. Publishing content on established websites also gives businesses opportunities to communicate their expertise and create a stronger digital footprint.

For companies operating in competitive industries, strategic media placements can help differentiate their brand from competitors. Rather than relying exclusively on paid advertisements or social media campaigns, businesses can expand their reach through relevant editorial and sponsored content opportunities.

One of the biggest challenges businesses face when investing in digital PR is the cost of premium publications. Established media websites often charge substantial fees for sponsored articles, editorial collaborations, and promotional placements. For small businesses and startups, these expenses can quickly exceed their marketing budgets.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LIFESTYLE

Alasan Memilih Atap UPVC di Jakarta untuk Berbagai Kebutuhan

Oleh Redaksi · 23 Nov, 19.34 WIB

Cuaca Jakarta sepanjang 2026 mengalami perubahan ekstrem. Pada akhir April, BMKG mencatat suhu mencapai 35–36 °C di Jakarta Utara dan sekitarnya. Memasuki penghujung tahun, BMKG justru memperingatkan potensi hujan ekstrem hingga awal 2027. Dan kondisi cuaca seperti ini diprediksi terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan. Kondisi ini membuat pemilik bangunan perlu mempertimbangkan material atap yang mampu menghadapi paparan panas dan hujan. Bagi Anda yang sedang mencari atap upvc Jakarta, penting untuk memahami karakteristik material sebelum membeli. Ecoroof menawarkan dua tipe atap UPVC, yaitu single layer dan double layer, yang dapat dipertimbangkan untuk berbagai kebutuhan bangunan.

BMKG memprediksi awal musim hujan 2026/2027 mundur di 529 zona musim atau 61,08 persen wilayah Indonesia.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Listyo Sigit Cs Ternyata Sudah Merancang Makar Sejak Era Jokowi

Oleh Redaksi · 24 Nov, 09.11 WIB



BANDA ACEH -Kasus dugaan makar dengan tersangka Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo serta lima tersangka lainnya dilakukan sejak Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) masih menjabat.

Tepatnya pada Kamis, 3 Oktober 2024, beberapa hari sebelum Presiden Prabowo dilantik.

Hal ini terungkap berdasarkan konstruksi perkara melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan.

”Kami temukan dalam melakukan pemeriksaan saksi serta alat bukti dan petunjuk, ditemukan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2024, saat presiden terpilih belum dilantik, dilaksanakan rapat yang dipimpin oleh SU (Irjen Slamet Uliandi) dengan dihadiri oleh EH (Irjen Eko Hadi Santoso), ASN (Irjen Ahrie Sonta Nasution), dan TK (Brigjen Tedjo Kusumo), beserta tim lainnya,” terang Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada Senin malam, 23 November 2026.

Adapun isi dalam rapat tersebut yakni analisis arah pemerintahan ke depan, rencana pemetaan tokoh-tokoh yang berpengaruh saat Presiden Prabowo mulai memerintah, lalu ada dokumen yang memuat analisis krisis, analisis impeachment, analisis isu kebijakan pemerintah, analisis calon kapolri, cap makar, sampai dengan analisis krisis 1998 yang terkait dengan mekanisme kejadian sampai proses mundurnya Presiden Soeharto.

”Kami dalam proses pemeriksaan terhadap saksi itu menemukan dokumen hasil rapat di tanggal 3 Oktober tahun 2024 yang tadi saya jelaskan,” jelas Asep.

Dugaan makar yang dilakukan kelompok ini semakin kuat dengan adanya tahap persiapan dilakukan untuk menindaklanjuti arahan dalam rapat tahap permufakatan dengan melakukan penyadapan terhadap tokoh-tokoh yang sudah dipetakan.

”Tersangka ASN menentukan target penyadapan dan menyerahkannya kepada personel untuk diolah dan dianalisis melalui LIMS, PLX, dan DFS menjadi produk analisis,” ungkapnya.

Kemudian dugaan makar berlanjut ke tahap ketiga yak i permulaan pelaksanaan. Hasil penyadapan ditindaklanjuti dengan kegiatan surveillance oleh tersangka Tedjo Kusumo atas perintah Ahrie Sonta. Penyadapan ini menyasar ke sejumlah pejabat negara, pimpinan lembaga negara, dan tokoh Politik lainnya.

Terakhir, kelompok ini melakukan serangan udara melalui media sosial atau cyber troop dan serangan darat melalui beberapa kegiatan pergerakan massa.

Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis yakni Pasal 191 KUHP dan/atau Pasal 193 KUHP dan/atau Pasal 196 KUHP Jo, Pasal 160 KUHP Jo Pasal 20 huruf a, b, c, dan d KUHP Jo UU 1/2026 tentang Penyesuaian Tindak Pidana dengan ancaman pidana …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

HIBURAN

Link Video Budhe Brondong Viral, Ternyata Ada ‘Saudara Nginep 2’ di YouTube

Oleh Redaksi · 23 Nov, 21.33 WIB

BANDA ACEH - Nama “Budhe Brondong” mendadak memiliki dua makna berbeda di jagat digital. Di satu sisi, julukan itu ramai dikaitkan dengan kasus dugaan produksi konten pornografi yang menyeret Ce Crystine, perempuan asal Blitar, Jawa Timur. Di sisi lain, istilah serupa muncul dalam serial animasi komedi Saudara Nginep 2 di kanal YouTube Rizky Riplay. Di tengah perburuan tautan video oleh warganet, masyarakat perlu membedakan kedua konten tersebut sekaligus mewaspadai ancaman penipuan digital atau phishing.Fenomena ini memperlihatkan bagaimana satu istilah dapat berkembang menjadi kata kunci populer dengan konteks yang sangat berbeda. Pencarian “Budhe Brondong”, “Ce Crystine”, hingga “link video full” ramai diperbincangkan di media sosial, terutama X, TikTok, dan Instagram.

Padahal, tidak semua hasil pencarian yang menggunakan istilah tersebut mengarah pada konten yang sama.

Nama Ce Crystine merujuk pada perempuan berinisial K, 38, asal Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar. Sosok tersebut menjadi sorotan setelah dikaitkan dengan dugaan produksi dan pemasaran konten bermuatan pornografi melalui layanan berlangganan berbayar.

Dalam perkara tersebut, K bersama suaminya berinisial PEK, 40, diamankan Satreskrim Polres Blitar Kota di sebuah rumah kos di Denpasar, Bali.

Pengungkapan kasus bermula dari patroli siber kepolisian yang menemukan materi bermuatan asusila di internet. Hasil penelusuran kemudian mengarah pada dugaan aktivitas produksi konten di sebuah penginapan di Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar.

Pasangan tersebut diduga menjalankan bisnis konten eksklusif sejak Maret 2025 hingga November 2026.

Dari aktivitas itu, keduanya diperkirakan memperoleh pendapatan Rp 20 juta hingga Rp 30 juta per bulan. Akumulasi keuntungan yang dilaporkan mencapai sekitar Rp 400 juta.

Informasi inilah yang kemudian membuat nama Ce Crystine semakin ramai dicari warganet.

Selain mencari identitas Ce Crystine, sebagian pengguna media sosial juga memburu informasi mengenai klaim video yang disebut memiliki tiga bagian atau three parts.

Isu tersebut berkembang melalui berbagai unggahan di X dan platform lainnya.

Namun, hingga informasi yang tersedia, belum ada konfirmasi resmi yang memastikan bahwa video yang ramai dibicarakan benar-benar terdiri atas tiga bagian seperti klaim sejumlah akun.

Warganet perlu membedakan informasi yang berasal dari pengungkapan kepolisian dengan rumor yang berkembang di media sosial.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Amran Sulaiman Sosok Ideal Dampingi Prabowo

Oleh Redaksi · 24 Nov, 09.07 WIB



BANDA ACEH -Nextgen Organizer Academy (NOA) menyampaikan dukungan terhadap Andi Amran Sulaiman sebagai figur yang dinilai layak dipertimbangkan untuk mengisi posisi Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Founder Nextgen Organizer Academy (NOA), Mitra Fakhrudin, menilai Andi Amran Sulaiman memiliki karakter kepemimpinan yang dibutuhkan untuk memperkuat pemerintahan ke depan. Menurutnya, Amran merupakan sosok religius, pekerja keras, sederhana, serta memiliki orientasi pengabdian yang kuat terhadap bangsa dan negara.

“Pak Andi Amran adalah sosok yang religius, tidak banyak gimmick, dan lebih memilih menunjukkan kerja nyata. Beliau merupakan figur yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Artinya, energi, waktu, dan kapasitas yang dimilikinya benar-benar dicurahkan untuk bekerja dan memberikan manfaat bagi negeri,” kata Mitra kepada wartawan di Jakarta, Senin, 23 November 2026.

Selain karakter kepemimpinannya, Mitra juga menilai kinerja Andi Amran Sulaiman selama menjabat sebagai Menteri Pertanian menunjukkan dedikasi dan keseriusan dalam memperkuat sektor pangan nasional. Berbagai upaya dalam mendorong peningkatan produksi pertanian, memperkuat ketahanan pangan, serta mengakselerasi program swasembada pangan menjadi bagian dari kerja nyata yang patut diapresiasi.

“Beliau bukan hanya sosok yang memiliki etos kerja tinggi, tetapi juga menunjukkan kesungguhan melalui kebijakan dan kerja konkret di sektor pertanian. Persoalan pangan adalah persoalan strategis bangsa, dan kita membutuhkan pemimpin yang memahami bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi penting bagi kemandirian dan kedaulatan negara,” ungkap Mitra.

Mitra menambahkan, etos kerja Andi Amran Sulaiman menjadi salah satu alasan kuat mengapa dirinya dinilai memiliki kapasitas untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Kepemimpinan yang berorientasi pada hasil, keberanian mengambil langkah, serta konsistensi dalam bekerja merupakan karakter penting dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Indonesia membutuhkan pendamping Presiden yang tidak sekadar hadir secara simbolis, tetapi benar-benar mampu bekerja, mengambil peran strategis, dan memastikan agenda-agenda pembangunan berjalan. Dalam pandangan kami, Andi Amran memiliki karakter tersebut. Beliau adalah pekerja keras yang bekerja untuk negeri dengan etos pengabdian yang luar biasa,” ujarnya.

NOA, kata Mitra, berpandangan bahwa perpaduan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dengan figur wakil presiden yang memiliki karakter pekerja, berintegritas, religius, dan berorientasi pada hasil dapat menjadi kekuatan dalam mempercepat agenda pembangunan nasional.

Sebagai wadah pengembangan kapasitas dan kepemimpinan generasi muda, NOA berharap wacana kepemimpinan nasional ke depan semakin mengedepankan rekam jejak, kapasitas …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EKONOMI

Pendaftaran CPNS 2026 Direncanakan Mulai 27 November, Kebutuhan ASN Capai 167.113

Oleh Van · 23 Nov, 18.01 WIB

JAKARTA — Pendaftaran CPNS 2026 direncanakan mulai 27 November 2026. Pemerintah menetapkan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) tahun ini sebanyak 167.113 orang.

Rencana tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 23 November 2026.

Rini menjelaskan, proses pengadaan ASN telah memasuki tahap koordinasi melalui Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Penetapan formasi CPNS akan dilakukan setelah pembahasan pleno.

"Untuk tahun 2026, kebutuhan ASN ditetapkan sejumlah 167.113. Kebutuhan ini juga mempertimbangkan pendapat dari Menteri Keuangan berdasarkan surat tanggal 21 April tahun 2026," ungkap Rini.

Jadwal Seleksi CPNS 2026

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Terungkap! Pemufakatan Makar Listyo Sigit Cs Dimulai sebelum Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Oleh Redaksi · 24 Nov, 09.31 WIB



BANDA ACEH - Bareskrim Polri mengungkap dugaan pemufakatan makar yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah dilakukan sebelum Prabowo Subianto dilantik sebagai presiden. Penyidik menemukan tiga tahapan yang diduga dijalankan para tersangka, mulai dari pemufakatan, persiapan hingga pelaksanaan.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan, tahap pertama berupa pemufakatan yang berlangsung pada 3 Oktober 2024. Saat itu, Prabowo masih berstatus sebagai presiden terpilih dan belum dilantik.

“Yang pertama, tahap permufakatan. Kami temukan ya dalam melakukan pemeriksaan saksi serta alat bukti dan petunjuk ya, ditemukan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2024, saat presiden terpilih belum dilantik, dilaksanakan rapat yang dipimpin oleh SU dengan dihadiri oleh EH, ASN, dan TK beserta tim lainnya,” kata Komjen Asep, Senin (23/11/2026).

Asep mengatakan, rapat tersebut dipimpin Irjen Slamet Uliandi dan dihadiri Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta Nasution serta Brigjen Tedjo Kusumo.

“Dalam rapat tersebut disampaikan beberapa pointer yang disusun atas perintah tersangka ASN yang memuat analisis terhadap arah pemerintahan ke depan serta rencana pemetaan tokoh-tokoh yang berpengaruh,” ujarnya.

Dalam penyidikan, polisi menemukan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan rapat tersebut. Dokumen itu ditemukan dari laptop milik salah satu saksi.

“Dari laptop milik saksi juga ditemukan dokumen yang memuat analisis krisis, kemudian analisis impeachment, analisis isu kebijakan pemerintah, analisis calon Kapolri, kemudian cap makar, kemudian serta analisis krisis '98 terkait mekanisme kejadian dan proses mundurnya Presiden Soeharto,” katanya.

Komjen Asep menjelaskan, tahap kedua merupakan persiapan sebagai tindak lanjut dari hasil rapat pada 3 Oktober 2024. Pada tahap ini, para tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap sejumlah tokoh yang sebelumnya telah dipetakan.

“Tahap persiapan, untuk menindaklanjuti arahan dalam rapat yang tahap permufakatan tadi, dilakukan penyadapan terhadap tokoh-tokoh yang telah dipetakan. Penyadapan tersebut dilakukan sejak masa jabatan Kabagmon dijabat oleh EH hingga ASN,” katanya.

Tahap ketiga merupakan pelaksanaan. Menurut Komjen Asep, hasil penyadapan kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan pengawasan atau surveillance terhadap sejumlah pejabat negara dan tokoh Politik.

Kegiatan surveillance tersebut diduga dilakukan oleh Brigjen Tedjo Kusumo atas perintah Irjen Ahrie Sonta Nasution.

“Selain itu dilakukan serangan udara ya melalui media sosial atau cyber troop dan serangan darat melalui beberapa kegiatan pergerakan massa,” ucapnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

5 Jenderal Bintang 3 Jadi Hakim Sidang Etik Listyo Sigit, Dipimpin Teman Seangkatan Akpol 1991

Oleh Redaksi · 24 Nov, 12.48 WIB



BANDA ACEH - Polri telah menetapkan lima jenderal bintang tiga sebagai pimpinan dan anggota majelis sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sidang etik yang berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto dan tindak pidana makar itu akan dipimpin Komjen Hendro Pandowo, teman seangkatan Listyo Sigit di Akademi Kepolisian (Akpol) 1991.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, sidang KKEP terhadap Listyo Sigit dijadwalkan berlangsung pada Kamis (26/11/2026) pukul 09.00 WIB.

"Kemudian pada hari Kamis, 26 November 2026 pukul 09.00, akan dilaksanakan sidang KKEP terhadap terduga pelanggar LSP," kata Brigjen Trunoyudo, Selasa (24/11/2026).

Komjen Hendro Pandowo ditunjuk sebagai ketua komisi merangkap anggota. Hendro merupakan rekan satu angkatan Listyo Sigit saat menempuh pendidikan di Akpol 1991.

"Komjen Hendro Pandowo selaku Ketua Komisi merangkap anggota," ujar Trunoyudo.

Selain Hendro, majelis sidang etik tersebut juga diisi empat jenderal bintang tiga lainnya.

Mereka yakni Kalemdiklat Polri Komjen Rudi Darmoko sebagai wakil ketua merangkap anggota, Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto sebagai anggota, Kabaintelkam Polri Komjen Dedi Kusuma Bakti sebagai anggota, serta Sekjen KP2MI Komjen Dwiyono sebagai anggota.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit Prabowo bersama tiga perwira tinggi Polri lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.

Ketiga perwira tinggi tersebut yakni Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.

Dalam pengembangan penyidikan, Bareskrim kembali menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan makar yang merupakan pengembangan kasus penyadapan tersebut.

Mereka yakni Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso, Ahrie Sonta, Slamet Uliandi, Brigjen Tedjo Kusumo, dan Kombes Iman Imanuddin.

Penanganan perkara ini juga berlanjut ke proses etik. Mabes Polri sebelumnya menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Ahrie Sonta melalui sidang etik pada Selasa (10/11/2026).

Selanjutnya, Polri juga menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Eko Hadi Santoso dalam sidang etik pada Selasa (17/11/2026)

NASIONAL

Ternyata Ini Peran 6 Tersangka Makar Listyo Sigit Cs, dari Penyadapan hingga Gerakkan Aksi Demo

Oleh Redaksi · 24 Nov, 09.20 WIB



BANDA ACEH - Bareskrim Polri mengungkap peran enam tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana makar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu tersangka, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, diduga memerintahkan sekaligus menerima laporan hasil penyadapan dan pemantauan sejumlah tokoh.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengatakan, penetapan enam tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dan kecukupan alat bukti. Bukti tersebut meliputi keterangan saksi, barang bukti, bukti elektronik, keterangan ahli, hingga rekomendasi hasil gelar perkara.

"Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah menetapkan enam orang tersangka dalam dugaan tindak pidana makar. Yang pertama adalah tersangka LSP, yang kedua tersangka SU, yang ketiga tersangka EH, yang keempat tersangka ASN, yang kelima tersangka TK, dan yang keenam tersangka II," ujar Komjen Asep kepada wartawan, Senin (23/11/2026).

Menurut Asep, para tersangka diduga melakukan permufakatan jahat berupa persiapan dan permulaan pelaksanaan makar. Motifnya diduga untuk mempertahankan jabatan Kapolri demi kepentingan konstelasi Politik dengan cara melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo.

Komjen Asep kemudian membeberkan peran masing-masing tersangka dalam perkara tersebut dari hasil penyidikan.

Peran 6 Tersangka Makar:

1. Listyo Sigit Prabowo (LSP)

Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diduga berperan memerintahkan sekaligus menerima laporan hasil penyadapan dan pemantauan atau surveillance dari tersangka lainnya.

Peran tersebut diketahui berdasarkan pemeriksaan saksi, keterangan para tersangka, serta barang bukti dan petunjuk yang ditemukan penyidik.

2. Ahrie Sonta Nasution (ASN)

Irjen Ahrie Sonta Nasution diduga memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan operasi di lapangan. Dia menyusun arahan atau pointer rapat yang kemudian diserahkan kepada tersangka SU.

Selain itu, Ahrie diduga menentukan target penyadapan, memerintahkan pelaksanaannya, menerima laporan harian, serta memerintahkan surveillance kepada tersangka TK.

Ahrie juga diduga menggerakkan aksi demonstrasi sesuai tema yang telah ditentukan melalui agen lapangan atau agent action. Dia turut memerintahkan penggalangan pihak eksternal, mencari dana operasional, hingga memerintahkan penghapusan data pada server untuk menghilangkan jejak digital.

3. Slamet Uliandi (SU)

Irjen Slamet Uliandi diduga memimpin rapat permufakatan awal. Dia juga ikut menentukan target penyadapan dan memerintahkan penyadapan terhadap personel berinisial MC.

Selain itu, Slamet diduga menerima laporan harian hasil penyadapan dan surveillance dari para pelaku lapangan.

4. Eko Hadi Santoso (EH)

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Bareskrim Tetapkan Warga Sipil Berinisial NE Jadi Tersangka Penyadapan

Oleh Redaksi · 24 Nov, 20.35 WIB



BANDA ACEH -Bareskrim Polri menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, yakni dari pihak sipil berinisial NE.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro menjelaskan bahwa sosok NE diketahui berperan dalam kasus ini usai penyidik melakukan penggeledahan di rumah Kombes Iman Imanuddin (II) di kawasan Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

"Peran tersangka II merencanakan melakukan serangan. Serangan menurut ahli bisa fisik, bisa juga nonfisik. Maka rekan-rekan sekalian, kami menemukan dari saksi NE yang saat ini menjadi tersangka di siber," kata Susatyo kepada wartawan di Mabes Polri pada Selasa, 24 November 2026.

Adapun peran NE terlibat dalam kasus penyadapan dan diperintahkan oleh tersangka Iman Imanuddin untuk mencetak baju bergambar ACAB dan senjata dengan tulisan huruf Arab.

"NE itu sipil ditangani di Siber, tapi itu menjadi bagian daripada kami. Jadi tindak pidana makar ini dilakukan ada tindak pidana sadap ilegal kepada lingkar istana, berlanjut kemudian kepada perbuatan makar," kata Susatyo.

Dalam kasus ini, Bareskrim Polri menetapkan total enam orang sebagai tersangka.

Empat di antaranya juga tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Di antaranya mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Slamet Uliandi, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso.

Sementara dua tersangka lainnya yakni mantan Direktur Penindakan Densus 88 Anti Teror Polri Brigjen Tedjo Kusumo dan mantan Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin.

NASIONAL

Bambang Pacul: Tidak Ada Debat Cawapres di Tatib MPR dan UUD 1945

Oleh Redaksi · 24 Nov, 18.56 WIB



Wakil Ketua MPR sekaligus Ketua Tim Ad Hoc MPR Pemilihan Wakil Presiden, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Mekanisme Debat calon Wakil Presiden (Cawapres) tidak diatur dalam Tata Tertib (Tatib) MPR maupun Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Demikian disampaikan Wakil Ketua MPR sekaligus Ketua Tim Ad Hoc MPR Pemilihan Wakil Presiden, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 November 2026.

"Kalau di tatib, di Undang-Undang Dasar (UUD) nggak dimuat itu," kata Pacul.

Namun begitu, Pacul tidak dalam kapasitas bisa memastikan tidak ada debat antarkandidat.

Menurutnya, wacana tersebut masih menjadi bahan pembahasan internal Tim Ad Hoc MPR.

"Saya tidak mengatakan nggak perlu, kami masih brainstorming. Nanti biar diputusin rapat panitia adhoc," tandas Pacul.

Diketahui ada dua nama kandidat Wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

NASIONAL

Deddy Sitorus Sebut Cawapres Yang Diusulkan Akan Timbulkan Masalah

Oleh Redaksi · 24 Nov, 09.41 WIB



BANDA ACEH - Politisi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus menilai, dua nama calon wakil presiden yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto, yakin Andi Amran Sulaiman dan Sugiono bukan calon yang ideal. Keduanya akan menimbulkan masalah bagi Prabowo Subianto.

“Secara pribadi saya menganggap mereka berdua bukan calon yang paling ideal dalam kondisi sekarang,” kata Deddy Sitorus kepada monitorindonesia.com, Selasa (24/11/2026).

Menurut dia, Andi Amran Sulaiman lebih cocok sebagai eksekutor kebijakan atau program, bukan sebagai solidarity maker consensus builder.

“Karakternya yang keras dan dominan sangat baik untuk mikro management tetapi cenderung akan menyulitkan dalam situasi "konflik" dengan tensi tinggi di bidang Politik, ekonomi dan kondisi geopolitik saat ini. Kalau karakter tersebut tidak dimoderasi malah akan berpotensi menjadi beban baru bagi Presiden,” kata Deddy.

Keterlibatan Amran dalam berbagai aktivitas bisnis yang dipertanyakan publik dan investor juga akan menjadi titik lemah Amran sebagai Wapres. Kecuali memang Amran dimaksudkan untuk berperan dalam eksekusi kebijakan pemerintah dan memastikan pendanaan bagi pemilu 2029.

“Tetapi hal itu bisa menimbulkan potensi masalah baru ketika Wapres terlalu aktif dalam eksekusi dan penggalangan dana,” ungkapnya.

Sementara dari sosok Sugiono, sambung Deddy, mungkin akan kesulitan untuk berkontribusi besar karena usia, pengalaman dan leadership yang kurang memadai. Sulit membayangkan Sugiono mampu memobilisasi elit pemerintahan, birokrasi, elit politik dan para pelaku ekonomi. Juga sulit berharap dia bisa berperan sebagai mitra diskusi yang setara bagi presiden.

“Kecuali memang perannya hanya diharapkan sebagai ban serap dan jangkar bagi keleluasaan manuver politik presiden hingga pilpres tang akan datang,” sebut Deddy.

Meski demikian, kata anggota Komisi II DPR RI itu, siapapun yang diusulkan, merupakan hak prerogatif presiden, tinggal melihat apakah akan bermanfaat dalam mengurangi beban yang dihadapi pemerintahan ke depan.

“Tetapi apapun itu saya kira adalah pilihan politik presiden, tinggal kita melihat bagaimana reaksi publik dan dinamika pemilihan di MPR. Siapapun yang terpilih nanti tentu harus ikut berpikir soal kepentingan rakyat, bangsa dan negara,” pungkas Deddy Sitorus.

Kemarin, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan nama Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dan Menko PMK, Sugiono sebagai cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka. Rencana penetapan cawapres menjadi wapres akan dilakukan MPR RI tanggal 11 Desember 2026.

NASIONAL

Persoalan Gibran di Dua Tahun Menjabat Wapres Tetap Harus Diproses

Oleh Redaksi · 24 Nov, 12.39 WIB



BANDA ACEH -Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden, tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan penelusuran berbagai persoalan yang muncul selama dirinya menduduki posisi tersebut.

Hal itu disampaikan akademisi dan pengamat pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie, dalam podcast bersama Refly Harun yang tayang di YouTube, pada Minggu kemarin, 22 November 2026.

Menurut Connie, keputusan mundur Gibran patut dihargai karena menunjukkan adanya kesadaran untuk mengutamakan kepentingan nasional, dibandingkan mempertahankan jabatan.

"Dia sebagai orang nomor dua di Indonesia, akhirnya sadar dengan kesalahan yang dia buat, termasuk berkhianat kepada partai, kemudian akhirnya mengundurkan diri. Oke, menurut aku ya sudah, kita harus appreciate itu," kata Connie.

Meski demikian, apresiasi terhadap keputusan pengunduran diri tidak berarti seluruh persoalan sebelumnya harus dilupakan. Connie menegaskan, proses yang mengantarkan Gibran ke kursi Wakil Presiden, termasuk polemik konstitusional yang menyertainya, tetap perlu menjadi perhatian publik.

"Tapi bahwa, dulu naiknya seperti apa, sejarahnya kita bagaimana berteriak supaya jangan sampai naik, jangan sampai konstitusi tabrak-tabrak, ya itu harus kita suarakan," tuturnya.

Dia juga mempertanyakan bagaimana jabatan Wakil Presiden digunakan selama dua tahun terakhir, termasuk kemungkinan adanya kepentingan keluarga atau pihak tertentu yang perlu ditelusuri.

Menurut Connie, publik tidak boleh berhenti hanya pada fakta bahwa kursi Wakil Presiden telah ditinggalkan. Berbagai persoalan yang terjadi sebelumnya harus tetap mendapatkan perhatian.

"Jangan berhenti seolah-olah kursi kekuasaan sudah dikembalikan, atau sudah dikosongkan, lalu kemudian apa yang terjadi kemarin seperti dilupakan, dari mulai terjadinya konstitusi diacak-acak sampai selama dua tahun pemerintahan. Itu kita harus lihat," tegasnya.

Connie juga menyinggung sejumlah isu yang menurutnya perlu mendapat penjelasan lebih lanjut, termasuk dugaan persoalan yang berkaitan dengan kepentingan keluarga dan pemeriksaan saham.

"Pengunduran diri Gibran merupakan satu hal yang patut dihargai, tetapi pertanggungjawaban atas berbagai persoalan selama masa jabatan tetap menjadi hal berbeda yang tidak boleh diabaikan," demikian Connie menambahkan.

NASIONAL

Dua Kreator Protes Desain Kaosnya Jadi Barbuk Kasus Makar Listyo cs, Padahal Belum Rilis

Oleh Redaksi · 24 Nov, 10.24 WIB



BANDA ACEH - Dua kreator konten mempersoalkan kemunculan desain kaus yang diklaim sebagai karya mereka dalam pemberitaan barang bukti penyidikan dugaan tindak pidana makar oleh Bareskrim Polri. Keduanya menyoroti bahwa desain yang tampil di publik disebut belum dirilis resmi maupun berbeda dengan versi revisi yang mereka miliki. Keluhan pertama disampaikan pemilik akun Threads @santrimanstudio yang menyoroti kemunculan desain kaus bertuliskan ACAB. Ia menyatakan keberatan karena merasa karyanya digunakan tanpa sepengetahuannya.

"Yang kreatif sedikit dong, Pak Pol. Desain kausku kamu curi, benar-benar tidak masuk akal. Kausnya saja belum aku rilis, kemarin baru sekadar cek ombak di Threads, ternyata sudah ada yang mencuri!" tulis pemilik akun @santrimanstudio pada Senin (24/11/2026).

Ia menegaskan bahwa rancangan tersebut masih berbentuk berkas Corel dan membantah memiliki niat melakukan penyadapan, makar, maupun keterkaitan dengan pihak mana pun dalam perkara tersebut. Berdasarkan penelusuran Beritasatu.com, akun @santrimanstudio sempat mengunggah desain kaus ACAB bernomor 1312 dalam aksara Arab disertai gambar senjata dan tulisan ACAB pada 12 November 2026 untuk menawarkan pemesanan kepada warganet.

Keberatan serupa diungkapkan pemilik akun @politaikdoodle terkait desain kaus bertuliskan "Sadar Dipalak", "Sadar Dibakar", dan "Sadar Dimiskinkan". Menurut dia, desain yang muncul memiliki kesamaan konsep dengan karyanya,namun terlihat perbedaan pada jenis huruf serta kesalahan penulisan.

"Kaus kita sebelahan, tetapi pas dilihat-lihat, font-nya memang beda banget, terus ada typo lagi," tulisnya melalui kolom komentar unggahan @santrimanstudio.

Desain tersebut memuat tulisan "Sadar Dipalak", "Sadar Dibakar", dan "Sadar Dimiskinkan" lengkap dengan ilustrasi salam tiga jari serta frasa "For The Forest", "For The Animals", dan "For The People" berpagar #IndonesiaSadar.Pemilik akun @politaikdoodle menyebut desain aslinya telah lama diperbarui dengan menghilangkan spasi, meski unggahan lama di salah satu akun e-commerce masih menampilkan versi terdahulu.

Rincian Barang Bukti dan Penggeledahan di 14 Lokasi

Sebelumnya, Bareskrim Polri mengamankan beragam barang bukti dalam penyidikan kasus dugaan makar yang berkaitan dengan pengembangan perkara penyadapan ilegal (illegal tapping), penghapusan data, serta akses ilegal.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menjelaskan penyidik telah memeriksa 71 saksi dari internal maupun eksternal Polri serta meminta keterangan ahli hukum pidana dan tata negara.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Terkuak! Kombes Iman Imanuddin Suruh Warga Sipil NE Bikin Hoaks buat Ciptakan Kerusuhan

Oleh Redaksi · 24 Nov, 18.39 WIB



BANDA ACEH -Bareskrim Polri megungkap adanya instruksi Kombes Iman Imanuddin kepada warga sipil berinisial NE untuk membuat informasi bohong atau hoaks terkait kasus dugaan makar penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

NE merupakan tersangka yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Sementara, Kombes Iman tersangka di kasus dugaan makar yang diusut Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.

"Keterangan NE, TSK II (Kombes Iman) menuliskan perintah untuk dikerjakan membuat hoaks oleh NE di foto, dari poin tersebut baru dua yang dikerjakan. Tulisan itu diakui oleh TSK II," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro, Selasa (24/11/2026).

Menurut Susatyo, instruksi Iman Imanuddin ke NE itu sebagai upaya menciptakan kondisi (cipkon) untuk membuat kerusuhan.

"Perintah itu untuk cipkon dalam rangka menciptakan kerusuhan," ujar Susatyo.

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta akses ilegal.

Dalam pengembangannya, Bareskrim Polri kembali menetapkan enam tersangka dalam pidana makar di kasus penyadapan Presiden. Selain empat orang yang disebutkan di atas, terdapat tambahan Brigjen Tedjo Kusumo dan Kombes Iman Imanuddin.

Mabes Polri telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik Selasa 10 November 2026. Kemudian, Polri memecat Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik, Selasa 17 November 2026.

NASIONAL

Tersangka Makar Listyo Sigit Cs Diduga Terlibat Aksi Demo Besar, Polri Ungkap Temuan Mengejutkan

Oleh Redaksi · 24 Nov, 09.26 WIB



BANDA ACEH - Bareskrim Polri mengungkap dugaan keterlibatan para tersangka kasus makar dalam sejumlah aksi unjuk rasa besar di Indonesia. Penyidik kini menelusuri demonstrasi lain yang diduga mendapat dukungan atau ditunggangi para tersangka, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Asep Safrudin mengatakan, sejumlah tersangka diduga memiliki keterkaitan dengan aksi demonstrasi besar yang pernah berlangsung di Tanah Air.

"Apakah kegiatan kegiatan unjuk rasa yang besar besar itu ada hubungannya dengan para tersangka yang sekarang kita jerat dengan Pasal pidana makar? ada beberapa yang masuk ada beberapa yang mereka terlibat," kata Komjen Asep Safrudin kepada wartawan, Senin (23/11/2026).

Komjen Asep mengatakan, penyidik masih mendalami bentuk keterlibatan para tersangka dalam berbagai kegiatan tersebut. Polri juga belum berhenti menelusuri kemungkinan adanya aksi lain yang berkaitan dengan perkara dugaan makar.

"Namun terus kami dalami, kegiatan-kegiatan mana lagi yang ada hubungannya dengan tersangka yang ada. Kami tidak berhenti, kami terus menelusuri kegiatan apa yang mereka support, kegiatan apa yang mereka tunggangi dan lain sebagainya," ujarnya.

Dalam kasus dugaan makar ini, Bareskrim Polri menetapkan enam orang sebagai tersangka. Mereka yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), Irjen Slamet Uliandi (SU), Brigjen Tedjo Kusumo (TK), dan Kombes Iman Imanuddin (II).

Penetapan enam tersangka tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam perkara penyadapan, Polri sebelumnya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, Eko Hadi, dan Slamet Uliandi.

Untuk perkara dugaan penyadapan tersebut, Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi disebut telah menjalani proses penahanan di Rutan Mako Brimob. Sementara itu, Slamet Uliandi tidak dilakukan penahanan.

Kepercayaan terhadap Prabowo

Di sisi lain, Polri juga menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap sejumlah perwira tinggi yang terseret kasus tersebut.

Setelah Ahrie Sonta lebih dulu dijatuhi sanksi PTDH melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada 10 November 2026, Irjen Eko Hadi Santoso juga menyusul menerima putusan serupa.

Polri masih terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap keterkaitan para tersangka dengan sejumlah kegiatan lain.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Curhat Dugaan Pelecehan Fisik Eks Manajer Payung Teduh Picu Spekulasi

Oleh Redaksi · 24 Nov, 15.53 WIB



BANDA ACEH -- Nama Mohammad Istiqamah Djamad alias Is Pusakata mendadak ramai dibahas warganet.Semua bermula dari unggahan mantan manajer Payung Teduh, Marsya Ditia, di Threads.

Lewat platform tersebut, Marsya mengungkap dugaan pelecehan fisik dari seseorang yang pernah bekerja dengannya.

Ia mengaku kejadian itu meninggalkan luka batin yang dalam.

Saking beratnya, Marsya sampai harus berkonsultasi ke psikiater.

Dalam salah satu unggahannya, Marsya meluapkan kekesalan soal respons orang lain saat ia mengungkit kejadian tersebut.

"Pas gw ingetin kejadian itu ke salah satu orang bisa bisanya dia nanya 'Mana buktinya? Mana gw tahu cerita lo bener apa ngga?'" tulis Marsya.

Ia juga menegaskan tidak mungkin mengarang kisah yang melelahkan dan traumatis seperti itu.

Petunjuk Netizen dan Catatan Penting

Tak butuh waktu lama, kolom komentar pun penuh spekulasi.

Sejumlah netizen mulai menghubungkan petunjuk dalam unggahan Marsya dengan sosok vokalis Payung Teduh.

Dari situlah nama Is ikut terseret dalam perbincangan.

Di sisi lain, muncul pula pengguna Threads lain yang mengaku pernah mengalami kejadian serupa.

Diskusi pun kian melebar ke mana-mana.

Meski begitu, ada satu hal penting yang perlu dicatat.

Marsya tidak pernah menyebut identitas orang yang dimaksud secara gamblang dalam unggahannya.

Hingga kini, belum ada konfirmasi apa pun yang memastikan kebenaran tuduhan maupun spekulasi tersebut.

Warganet pun diminta tetap berhati-hati membaca informasi yang beredar di media sosial.

NASIONAL

Aceh Tamiang Raih Juara Harapan LMSI Nasional 2026, Harumkan Nama Aceh

Oleh Hamdani · 24 Nov, 09.13 WIB



Tim PKK/Forikan Kabupaten Aceh Tamiang berfoto bersama usai meraih Juara Harapan Kategori Menu Keluarga pada Grand Final Lomba Masak Serba Ikan (LMSI) Tingkat Nasional 2026 di Jakarta International Velodrome, Minggu (22/11/2026). Prestasi tersebut mengharumkan nama Provinsi Aceh di tingkat nasional

JAKARTA – Kabupaten Aceh Tamiang kembali mengharumkan nama Provinsi Aceh di tingkat nasional. Mewakili Aceh pada Grand Final Lomba Masak Serba Ikan (LMSI) Tingkat Nasional 2026, Tim Penggerak PKK/Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Kabupaten Aceh Tamiang berhasil meraih Juara Harapan Kategori Menu Keluarga.

Kompetisi tersebut berlangsung di Jakarta International Velodrome, Jakarta, Minggu (22/11/2026), dalam rangka puncak peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) 2026. Keikutsertaan Aceh Tamiang merupakan hasil prestasi di tingkat Provinsi Aceh yang mengantarkan kabupaten tersebut menjadi wakil Aceh pada ajang nasional.

Capaian ini mendapat apresiasi dari Bupati Aceh Tamiang, Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Armia Fahmi. Ia menyampaikan penghargaan kepada seluruh peserta, khususnya ibu-ibu PKK/Forikan Aceh Tamiang, yang telah menunjukkan kerja keras dan kekompakan dalam membawa nama daerah sekaligus Provinsi Aceh ke tingkat nasional.

Menurutnya, keberhasilan menembus babak grand final merupakan prestasi yang patut dibanggakan dan menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan serta mempertahankan kekompakan tim pada kompetisi berikutnya.

Apresiasi juga disampaikan Kepala Dinas Perikanan Aceh Tamiang, drh. Asm'a, melalui Sekretaris Dinas, Syukri, S.P. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota tim atas kerja keras, dedikasi, dan kebersamaan selama mengikuti rangkaian perlombaan.

Ia berharap capaian tersebut tidak membuat tim cepat berpuas diri, meskipun telah berhasil membawa pulang penghargaan di tingkat nasional.

"Walaupun kali ini kita meraih Juara Harapan, jangan berkecil hati. Justru ini harus menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kemampuan, menjaga kekompakan, dan mempersiapkan diri lebih baik agar pada kesempatan berikutnya bisa meraih prestasi yang lebih tinggi, bahkan menjadi juara umum," ujarnya.

Sementara itu, Kasubkor P2HP Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, Fitriani, S.Pi., M.Si., menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Tim PKK/Forikan Aceh Tamiang yang telah mewakili Provinsi Aceh di tingkat nasional.

Pada kesempatan tersebut, DKP Aceh juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Ketua Forikan Aceh, Ny. Marlina Usman, atas dukungan penuh terhadap pembinaan dan pengembangan gerakan peningkatan konsumsi ikan di Aceh, termasuk dukungan kepada perwakilan Aceh dalam mengikuti LMSI tingkat nasional.

Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antara Forikan Aceh, DKP Aceh, dan Forikan kabupaten/kota untuk mendorong peningkatan konsumsi ikan serta mengembangkan kreativitas masyarakat dalam mengolah produk perikanan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Politikus Demokrat: Kemampuan 'Ngedabrus' Jokowi Patut Diacungi Jempol

Oleh Redaksi · 24 Nov, 10.41 WIB



BANDA ACEH - Politikus Partai Demokrat, Yan A. Harahap, melontarkan kritik tajam terhadap mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pernyataannya mengenai mobil nasional Esemka yang pernah digadang-gadang menjadi kebanggaan industri otomotif Indonesia.Melalui akun X miliknya, Selasa (24/11/2026), Yan A. Harahap menyindir kemampuan Jokowi dalam membangun narasi dan meyakinkan publik. Ia bahkan menyebut kepiawaian Jokowi dalam berbicara atau 'ngedabrus' patut diacungi jempol.

Pernyataan tersebut merujuk pada video Jokowi yang dengan penuh percaya diri menyampaikan bahwa sudah banyak pihak memesan mobil Esemka. Dalam video itu, Esemka seolah-olah tinggal menunggu waktu untuk mengaspal dan menjadi kebanggaan Indonesia.

Namun, menurut Yan, kenyataan kemudian berbicara berbeda. Hingga berakhirnya masa jabatan Jokowi sebagai presiden, Esemka tidak kunjung hadir sebagai mobil nasional seperti yang pernah dibayangkan dan dijanjikan kepada publik.

"Antara klaim dan kenyataan terbentang jurang yang begitu lebar," tulis Yan dalam kritiknya.

Ia menilai Jokowi memiliki kemampuan luar biasa dalam membangun narasi Politik dan meyakinkan masyarakat, bahkan ketika perkembangan berikutnya tidak sejalan dengan pernyataan yang pernah disampaikan.

Kritik Yan tidak berhenti pada persoalan Esemka. Ia juga menyoroti sikap sebagian masyarakat yang dinilainya tetap memberikan pujian kepada Jokowi tanpa mempertimbangkan secara kritis berbagai pernyataan dan rekam jejaknya.

Ironisnya, kata Yan, meskipun sejumlah pernyataan Jokowi berulang kali dipertanyakan dan tidak sesuai dengan kenyataan, masih ada kelompok masyarakat yang memberikan dukungan tanpa kritik.

"Fakta memang tidak pernah lebih penting daripada fanatisme," sindirnya.

NASIONAL

Polri Sebut Jenderal Listyo Sigit dan Lima Perwira Terlibat Aksi Demo Besar di Indonesia

Oleh Redaksi · 24 Nov, 08.28 WIB



BANDA ACEH - Polri menduga enam tersangka kasus dugaan makar, termasuk Jenderal Listyo Sigit Prabowo, terlibat dalam sejumlah aksi unjuk rasa besar yang terjadi di Indonesia. Keterlibatan tersebut kini masih didalami penyidik Bareskrim Polri.Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengatakan, berdasarkan hasil penyidikan, beberapa aksi demonstrasi besar diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka yang dijerat pasal tindak pidana makar.

"Apakah kegiatan-kegiatan unjuk rasa yang besar-besar itu ada hubungannya dengan para tersangka yang sekarang kita jerat dengan pasal pidana makar? Ada beberapa yang masuk, ada beberapa yang mereka terlibat," kata Asep dalam jumpa pers di Mabes Polri, Senin (23/11/2026).

Asep menegaskan, penyidik belum berhenti menelusuri dugaan keterlibatan para tersangka dalam berbagai kegiatan lainnya. Polri juga masih mendalami kemungkinan adanya aksi lain yang mendapat dukungan atau ditunggangi para tersangka.

"Namun terus kami dalami, kegiatan-kegiatan mana lagi yang ada hubungannya dengan tersangka yang ada. Kami tidak berhenti, kami terus menelusuri kegiatan apa yang mereka support, kegiatan apa yang mereka tunggangi dan lain sebagainya," ujarnya.

Enam Tersangka Kasus Dugaan Makar

Dalam perkara ini, Polri telah menetapkan enam orang sebagai tersangka. Mereka terdiri dari sejumlah perwira tinggi hingga perwira menengah kepolisian.Berikut daftar enam tersangka kasus dugaan makar:

- Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP)- Irjen Slamet Uliandi (SU)- Irjen Eko Hadi Santoso (EH)- Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN)- Kombes Iman Imanuddin (II)- Brigjen Tedjo Kusumo (TK)

Kasus dugaan makar tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh yang disebut terjadi sejak 2025.

Dalam perkara dugaan penyadapan, penghapusan data, dan akses ilegal tersebut, Polri sebelumnya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.

Dua Perwira Dipecat Melalui Sidang EtikSelain proses pidana, Polri juga telah menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap sejumlah tersangka.

Sidang etik terhadap Ahrie Sonta digelar pada 10 November 2026, sedangkan Eko Hadi menjalani sidang pada 17 November 2026.

Dalam kedua sidang tersebut, majelis KKEP menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Ahrie Sonta dan Eko Hadi.

NASIONAL

Waspada! Jaringan Makar LSP Diduga Masih Berkeliaran

Oleh Redaksi · 24 Nov, 09.44 WIB



BANDA ACEH -Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengajak publik mengawal pengusutan dugaan makar yang menyeret enam tersangka, termasuk mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Ia mengingatkan agar masyarakat tidak melupakan sejarah dan mewaspadai kemungkinan adanya pihak yang masih berupaya menghidupkan kembali aksi tersebut.

"Jas Merah. Jangan Lupakan Sejarah," kata Mardani lewat akun X resminya, Selasa, 24 November 2026.

Menurut Mardani, Polri telah menegaskan adanya bukti penyadapan yang ditemukan dalam penyelidikan sehingga perkara tersebut mengarah pada dugaan aksi makar.

"Ini bukan perkara kecil," tegasnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menilai, perkara tersebut perlu menjadi perhatian serius karena diduga melibatkan orang-orang yang memiliki kekuasaan besar.

"Dilakukan oleh orang yang punya kuasa luar biasa," sambungnya.

Ia juga mengingatkan kemungkinan masih ada pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut dan berupaya kembali menjalankan aksinya.

"Dan boleh jadi hingga saat ini masih ada yang berkeliaran dan berusaha bangkit kembali," pungkasnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkap dugaan motif enam tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo (LSP), Slamet Uliandi (SU), Eko Hadi (EH), Ahrie Sonta (ASN), Tedjo Kusumo (TK), dan Iman Imanuddin (II).

Berdasarkan konstruksi perkara, dugaan aksi tersebut mulai dilakukan pada Kamis, 3 Oktober 2024, ketika Joko Widodo masih menjabat sebagai Presiden RI atau beberapa hari sebelum Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden.

Bareskrim menyebut keenam tersangka diduga berupaya mempertahankan jabatan Kapolri dengan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.

NASIONAL

Sugiono Meminta Aparat Penegak Hukum Tidak Berikan Izin Peringatan Hari Guru Nasional

Oleh Redaksi · 24 Nov, 10.31 WIB



BANDA ACEH - Menjelang peringatan Hari Guru Nasional besok (25/11), konflik internal di tubuh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) masih belum usai.

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Pengurus Besar (PB) PGRI pun menolak agenda yang bakal diselenggarakan di Kota Tangerang, Banten.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) LKBH PB PGRI Sugiono Eksantoso bahkan sudah meminta seluruh anggota PGRI di level pusat hingga provinsi, kabupaten, dan kecamatan untuk tidak menyelenggarakan acara Hari Guru Nasional yang bertepatan dengan HUT ke-81 PGRI.

”Kegiatan yang mengatasnamakan PGRI, termasuk pendidikan ini, tidak boleh dilakukan karena PGRI lagi status quo, lagi berperkara,” ungkap Sugiono dalam keterangan resminya pada Selasa (24/11).

Menurut Sugiono, konflik internal di tubuh PGRI terjadi sejak Desember 2023. Kini konflik tersebut berlanjut sampai kasasi di Mahkamah Agung (MA). Dalam putusan banding bernomor 66/B/TF/2026/PTTUN/JKT pada 4 Mei 2026, PGRI kubu Unifah Rosyidi dinyatakan kalah dengan beberapa poin dalam putusan.

Pertama, gugatan banding yang diajukan oleh PGRI kubu Teguh Sumarno dikabulkan seluruhnya. Kedua, putusan PTUN tingkat pertama dibatalkan, persisnya putusan PTUN nomor 337/G/TF/2025/PTUN Jakarta tertanggal 5 Maret 2025.

Ketiga, pendaftaran badan hukum yang menjadi objek pembatalan, yaitu SKHU 8 Maret 2024 milik kubu Unifa secara otomatis ini dibatalkan.

”Poin penting yang keempat adalah Kemenkum wajib melakukan pencoretan atas SKHU 8 Maret 2024,” ucap Sugiono.

Karena itu, LKBH PB PGRI melarang kegiatan yang membawa nama PGRI. Termasuk agenda peringatan Hari Guru Nasional di Tangerang yang bakal diselenggarakan oleh PGRI kubu Unifah Rosyidi. Menurut dia, acara tersebut adalah tindakan inkonstitusional.

Dengan dasar itu pula, Sugiono meminta aparat penegak hukum tidak memberikan izin atas penyelenggaraan acara tersebut.

Jika dipaksakan, pihaknya menyarankan agar acara tersebut dibubarkan. Menurut dia, di tengah perkara yang berjalan semua pihak harus menghormati proses hukum.

”Kalaupun mau bertasyakuran silakan bertasyakuran di sekolah masing-masing saja, untuk menjaga kondusifitas keadaan PGRI,” kata dia

NASIONAL

Amran dan Sugiono Lebih Bagus dari Gibran

Oleh Redaksi · 24 Nov, 09.14 WIB



BANDA ACEH -Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono sebagai dua calon wakil presiden (cawapres) untuk mengisi jabatan Wapres RI sisa masa jabatan 2024-2029 yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.

Menanggapi usulan tersebut, Pengamat Politik sekaligus pendiri lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, menilai kedua nama yang diajukan Prabowo memiliki kesiapan untuk menduduki posisi orang nomor dua di Indonesia.

"Iya dua-duanya lebih bagus daripada Gibran dan lebih siap untuk dipertimbangkan jadi wapres," ujar Hensa, sapaan karibnya, kepada RMOL, Selasa, 24 November 2026.

Meski demikian, Hendri mengaku tidak mempermasalahkan siapa pun yang nantinya dipilih untuk mengisi posisi tersebut.

"Nanti terserahlah siapa yang dipilih, nothing to lose," sambungnya.

Sebelumnya, Prabowo mengaku telah berkonsultasi dengan partai-partai koalisi pengusung yang berada di parlemen, termasuk Dewan Pimpinan Partai Gerindra, sebelum mengajukan dua nama tersebut.

Prabowo menegaskan, pencalonan Amran dan Sugiono merupakan keputusan yang diambil setelah melalui proses konsultasi dengan partai-partai koalisi.

Selanjutnya, dua nama yang diusulkan Presiden akan menjalani proses verifikasi oleh MPR RI selama 14 hari kerja sebelum ditetapkan dalam Sidang Paripurna pada 11 Desember 2026.

Prabowo optimistis Amran dan Sugiono dapat mengemban amanah sebagai Wakil Presiden untuk kepentingan bangsa dan negara.

ACEH

7 BERITA

ACEH

Anggota Brimob Bawa Senpi Laras Panjang Rampok Toko Emas di Aceh, Diduga Terlilit Utang

Oleh Redaksi · 24 Nov, 19.45 WIB





BANDA ACEH - Kasus percobaan perampokan Toko Emas Nikko di Jalan Nasional, Desa Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Selasa (24/11/2026), menghebohkan masyarakat.Pasalnya, salah seorang dari dua terduga pelaku diduga merupakan anggota aktif Korps Brigade Mobil (Brimob) yang bertugas di wilayah Nagan Raya.

Kedua terduga pelaku berhasil diamankan setelah aksi perampokan bersenjata api laras panjang tersebut digagalkan oleh anak pemilik toko bersama masyarakat setempat.

Identitas dugaan keterlibatan anggota Polri itu terungkap berdasarkan laporan awal internal Polres Aceh Barat kepada Bidang Propam Polda Aceh.

Dalam laporan tersebut, salah seorang terduga pelaku disebut berinisial Ar, berpangkat Bripka, yang bertugas sebagai anggota Brimob di Batalyon Nagan Raya.

Sementara seorang lainnya diidentifikasi sebagai JS (44), warga Gampong Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang bekerja di sektor swasta.

Namun, dalam keterangan kepada media, Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto menyebutkan, sekitar pukul 09.55 WIB, kedua pelaku mendatangi Toko Emas Nikko.

Mereka diduga telah merencanakan aksi tersebut dengan membawa senjata api laras panjang jenis AK dan sebuah palu.

Setibanya di lokasi, pelaku langsung memecahkan kaca etalase toko menggunakan palu. Mereka kemudian berupaya mengambil perhiasan emas yang dipajang.

Saat menjalankan aksinya, salah seorang pelaku menodongkan senjata api kepada penjaga toko untuk mengancam korban agar tidak melakukan perlawanan.

Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto menjelaskan, dalam kejadian tersebut sempat terjadi satu kali letusan senjata api yang menyebabkan seseorang terkena serpihan.

“Penjaga toko emas tersebut sempat ditodong dengan senjata api. Kemudian terjadi letusan satu kali dan mengenai korban akibat serpihan,” ungkap Agus.

Perampokan bersenjata oleh oknum anggota Brimob di toko emas di Meulaboh, Aceh Barat, Selasa (24/11). Dua pelaku berhasil ditangkap berkat perlawanan pemilik toko dan warga. Senjata api laras panjang turut diamankan. https://t.co/iyfY0OsUoF

— Aceh ??????? (@Aceh) November 24, 2026

Anak Pemilik Toko Lakukan Perlawanan

Aksi kedua pelaku akhirnya gagal setelah anak pemilik Toko Emas Nikko melakukan perlawanan dengan berusaha merebut senjata api yang dibawa pelaku.

Perlawanan tersebut mengundang perhatian masyarakat di sekitar lokasi. Warga kemudian berdatangan dan ikut membantu menggagalkan aksi perampokan.

Situasi sempat berlangsung menegangkan. Berdasarkan rekaman video yang beredar di media sosial, terlihat perkelahian antara warga dan pelaku, disertai aksi kejar-kejaran.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

APBA Aceh 2027 Rp10,744 Triliun, Defisit Rp360 M

Oleh Van · 24 Nov, 22.37 WIB



BANDA ACEH – Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyepakati Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (Raqan APBA) Tahun Anggaran 2027 dengan total belanja mencapai Rp10,744 triliun. Di balik besarnya anggaran tersebut, pemerintah daerah masih menghadapi defisit sekitar Rp360,35 miliar yang harus ditutup melalui sumber pembiayaan.

Kesepakatan itu dicapai dalam rapat paripurna DPRA di Banda Aceh, Selasa, 24 November 2026, setelah pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRA dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). Rapat tersebut juga menjadi tahapan penting sebelum rancangan anggaran diserahkan kepada pemerintah pusat untuk dievaluasi.

Berdasarkan postur anggaran yang disepakati, pendapatan Aceh pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp10,384 triliun. Sementara belanja daerah ditetapkan dalam rancangan sebesar Rp10,744 triliun. Perbedaan kedua komponen itu menghasilkan defisit Rp360,35 miliar.

Untuk menutup kekurangan tersebut, Pemerintah Aceh mengandalkan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Nilai pembiayaan yang direncanakan sama dengan besaran defisit, sedangkan pengeluaran pembiayaan ditetapkan nihil.

Dengan skema tersebut, pembiayaan netto dirancang sebesar Rp360,35 miliar agar struktur APBA 2027 dapat diseimbangkan secara fiskal.

Dalam pembahasan anggaran, pemerintah dan legislatif juga menghadapi tuntutan agar belanja daerah benar-benar diarahkan pada kebutuhan mendesak masyarakat, terutama pemulihan pascabencana, penguatan ekonomi, pengurangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan pelayanan publik.

Besarnya anggaran belanja menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Aceh untuk memastikan setiap rupiah yang dialokasikan tidak berhenti pada angka dalam dokumen perencanaan, tetapi diwujudkan melalui program yang tepat sasaran, transparan, dan memberikan dampak nyata.

Raqan APBA 2027 selanjutnya akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menjalani evaluasi. Setelah tahapan evaluasi dan penyempurnaan selesai, rancangan tersebut dapat ditetapkan menjadi Qanun APBA 2027 sesuai ketentuan perundang-undangan.

ACEH

Mualem dan Forkopimda Perkuat Soliditas, Kawal Keamanan dan Percepatan Pemulihan Aceh

Oleh Redaksi · 24 Nov, 18.44 WIB



BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh memperkuat soliditas dan sinergi lintas lembaga dalam menjaga stabilitas keamanan, mempercepat pemulihan pascabencana, serta memastikan pembangunan Aceh berjalan optimal.

Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Gubernur Aceh bersama Forkopimda yang berlangsung di ruang kerja Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadhli, Selasa (24/11/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri Ketua DPRA Zulfadhli, Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, Kasdam Iskandar Muda Brigjen TNI Ali Imran, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Teuku Rahmatsyah, Satgas BAIS TNI wilayah Aceh, perwakilan BIN Daerah Aceh, Wakil Ketua DPRA Saifuddin Muhammad, serta Penjabat Sekretaris Daerah Aceh Taufik.

Dalam pertemuan itu, Mualem bersama Forkopimda membahas sejumlah isu strategis menyangkut kondisi dan perkembangan Aceh, terutama penguatan stabilitas keamanan, sinergi antarlembaga, serta upaya menjaga persatuan dan keharmonisan masyarakat.

Mualem menegaskan bahwa stabilitas dan perdamaian merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan pembangunan Aceh. Karena itu, seluruh unsur pimpinan daerah diharapkan terus menjaga komunikasi, memperkuat koordinasi, dan mengedepankan kepentingan masyarakat.

Selain itu, pembahasan juga mencakup keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh dan berbagai aspirasi masyarakat. Pemerintah Aceh bersama DPRA dan unsur Forkopimda berkomitmen memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat agar berbagai kepentingan strategis Aceh mendapatkan perhatian dan tindak lanjut.

Di tengah meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi, kesiapsiagaan daerah turut menjadi perhatian serius. Mualem menekankan pentingnya kesiapan seluruh unsur terkait, mulai dari personel, peralatan, logistik, hingga koordinasi penanganan di wilayah rawan bencana. Langkah antisipatif perlu diperkuat agar potensi bencana dapat ditangani secara cepat, terpadu, dan tepat sasaran.

Pertemuan tersebut juga membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, khususnya pemulihan infrastruktur, pengerukan sungai yang sudah dangkal, akses transportasi, serta kehidupan masyarakat terdampak. Sinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan di berbagai daerah.

Melalui penguatan koordinasi ini, Mualem bersama Forkopimda menegaskan pentingnya soliditas seluruh unsur pimpinan dalam menjaga Aceh tetap aman dan kondusif, sekaligus mengawal percepatan pembangunan serta pemulihan pascabencana demi kesejahteraan masyarakat. []

ACEH

Gubernur Mualem Sampaikan Pendapat Akhir terhadap Rancangan Qanun APBA 2027

Oleh Redaksi · 24 Nov, 15.34 WIB



BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Selasa (24/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRA atas sinergi dan kerja sama selama proses pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang APBA Tahun Anggaran 2027.

Ia mengatakan, seluruh rangkaian pembahasan telah diselesaikan melalui proses yang dinamis, namun tetap berlangsung dalam suasana harmonis.

"Berbagai usul, saran, masukan, dan koreksi konstruktif yang disampaikan akan menjadi perhatian Pemerintah Aceh untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Muzakir Manaf.

Gubernur juga mengapresiasi hasil yang telah dicapai bersama sebagai bentuk komitmen Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan serta pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat Aceh.

Ia berharap kerja sama dan sinergi antara Pemerintah Aceh dan DPRA dapat terus terjaga dalam mendukung berbagai upaya pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pada kesempatan itu, Gubernur turut mengajak seluruh pihak untuk mendoakan agar Aceh segera pulih dari bencana dan perdamaian terus terjaga demi masa depan Aceh yang lebih baik.

Usai penyampaian pendapat akhir gubernur Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh bersama Pemerintah Aceh secara resmi menyepakati dan menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2027.

Para pihak kemudian menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama antara Pimpinan DPRA dan Gubernur Aceh terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang APBA Tahun Anggaran 2027.

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRA Ali Basrah tersebut turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRA, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh, Sekretaris Daerah Aceh, para asisten, staf ahli, kepala SKPA, kepala biro, serta perwakilan kantor wilayah dan lembaga daerah. []

ACEH

FEBI UIN Ar-Raniry dan BPS Aceh Perkuat Kolaborasi

Oleh FEBI · 24 Nov, 13.10 WIB



BANDA ACEH – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh resmi menjalin kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh dalam pengembangan Program Pojok Statistik.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Kantor BPS Provinsi Aceh, Selasa (24/11/2026).

PKS ditandatangani oleh Dekan FEBI UIN Ar-Raniry, Prof. Dr. Azharsyah, S.E., Ak., M.S.O.M., dan Kepala BPS Provinsi Aceh, Agus Andria, SST., M.Si. Kerja sama ini diarahkan untuk meningkatkan literasi statistik, memperkuat kapasitas akademik, serta memperluas pemanfaatan data statistik di lingkungan perguruan tinggi dan masyarakat.

Dekan FEBI UIN Ar-Raniry, Prof. Dr. Azharsyah, menyambut baik kerja sama tersebut dan menegaskan bahwa kolaborasi antarlembaga harus diwujudkan melalui program-program konkret yang memberikan manfaat nyata.

Menurutnya, penandatanganan PKS bukanlah tujuan akhir, melainkan langkah awal untuk membangun sinergi yang produktif dan berkelanjutan.

“Kerja sama ini tidak boleh berhenti sebagai dokumen di atas kertas. Hal terpenting adalah bagaimana program-program yang telah disepakati dapat dilaksanakan secara nyata dan memberikan dampak bagi mahasiswa, sivitas akademika, serta masyarakat,” tegasnya.

Kegiatan penandatanganan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Dekan I, II, dan III FEBI UIN Ar-Raniry, Ketua Pojok Statistik, Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi, sejumlah dosen, serta agen Pojok Statistik UIN Ar-Raniry.

Melalui kerja sama ini, kedua pihak menyepakati sejumlah program edukasi dan pengembangan kapasitas statistik. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain Datalogi dengan tema Berbicara dengan Data, Berpikir dengan Logika; LESpro (Les Statistik dan Hard Skill sampai Pro) yang dijadwalkan setiap dua bulan; Workshop Haba Statistik; Goes to Dayah; Webinar Let's Deal with Data; serta Bisik Data (Membedah Ekonomi, Bisnis, dan Sosial dengan Kekuatan Data).

Selain itu, direncanakan pula program Saweu Gampong yang dilaksanakan setiap semester untuk memperluas edukasi statistik dan meningkatkan pemanfaatan data dalam kehidupan masyarakat.

Kerja sama ini juga membuka peluang bagi mahasiswa FEBI UIN Ar-Raniry untuk mengikuti program magang di lingkungan BPS Aceh.

Program tersebut diharapkan dapat memberikan pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi profesional, serta memperkenalkan mahasiswa secara langsung pada praktik pengelolaan dan analisis data statistik.

Mahasiswa yang memenuhi kualifikasi juga berpeluang memperoleh kesempatan kerja sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Dramatis! Pemilik Toko Emas Niko Meulaboh Gagalkan Aksi Dua Perampok Bersenjata

Oleh Biro Meulaboh · 24 Nov, 14.53 WIB



Pelaku perampokan bergulat dengan pemilik Toko, FOTO/ist

MEULABOH– Aksi dugaan percobaan perampokan toko emas Niko yang berada di Jalan Nasional, Kota Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, pada Selasa (24/11/26), terekam kamera pengawas (CCTV).

Dalam rekaman CCTV tersebut, terlihat dua orang terduga pelaku datang berboncengan menggunakan sepeda motor dan berhenti tepat di depan toko emas. Tak lama kemudian, keduanya langsung memasuki toko dan diduga menodongkan senjata laras panjang ke arah pemilik toko.

Namun, aksi kedua pelaku tidak berjalan mulus. Pemilik toko emas Niko melakukan perlawanan sehingga terjadi pergulatan dan kedua terduga pelaku berhasil didesak hingga ke bagian depan toko.

Pemilik toko kemudian berteriak meminta pertolongan dengan meneriakkan kata "maling". Teriakan tersebut sontak mengejutkan warga yang sedang melintas di sekitar lokasi kejadian.

Warga yang mendengar teriakan itu kemudian turut merespons hingga kedua terduga pelaku akhirnya berhasil diamankan.

Peristiwa tersebut menjadi perhatian warga sekitar, mengingat aksi dugaan perampokan itu terjadi di kawasan Jalan Nasional Kota Meulaboh.

Hingga berita ini ditulis, kronologi lebih lanjut, identitas kedua terduga pelaku, serta keterangan resmi dari pihak kepolisian masih perlu dikonfirmasi.[]

Editorial : Biro Meulaboh.

ACEH

Ibu Profesional Indonesia Kunjungi Rumoh Manuskrip Aceh, Pelajari Jejak Kemandirian Perempuan Aceh

Oleh Hamdani · 24 Nov, 09.34 WIB



Founder Ibu Profesional Indonesia, Septi Peni Wulandani, bersama Cek Midi saat melihat koleksi manuskrip kuno di Rumoh Manuskrip Aceh, Banda Aceh, Senin (23/11/2026). Kunjungan tersebut menjadi ajang mengenal sejarah dan jejak kemandirian perempuan Aceh dari masa ke masa

BANDA ACEH – Komunitas perempuan yang tergabung dalam Ibu Profesional Indonesia mengunjungi Rumoh Manuskrip Aceh milik kolektor manuskrip kuno, Tarmizi A. Hamid atau yang akrab disapa Cek Midi, di Gampong Ie Masen Kayee Adang, Jalan Seroja, Banda Aceh, Senin (23/11/2026).

Kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi Founder Ibu Profesional Indonesia, Septi Peni Wulandani, bersama jajaran pengurus Ibu Profesional (IP) untuk mengenal lebih dekat sejarah, pemikiran, serta peran strategis perempuan Aceh dari masa ke masa melalui koleksi manuskrip kuno.

Kedatangan rombongan yang didampingi Sekretaris Regional Aceh, Mirzayanti, dan pengurus IP Aceh itu disambut langsung oleh Cek Midi bersama istrinya, Nurul Husna. Turut hadir Kabid Pengembangan Syariah Islam Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, Wirzaini Usman, beserta sejumlah staf.

Dalam kunjungan tersebut, Cek Midi memperlihatkan sejumlah koleksi bersejarah Rumoh Manuskrip Aceh, mulai dari kronik-kronik manuskrip, mushaf, hingga karya ulama besar Aceh. Di antaranya *Mir'atut Thullab* karya Syekh Abdurrauf As-Singkili atau Teungku Syiah Kuala dan *Bustanussalatin* karya Syekh Nuruddin Ar-Raniry.

Cek Midi menjelaskan, perempuan Aceh telah memiliki ruang dan kedudukan penting sejak masa kesultanan. Peran tersebut tidak hanya terlihat dalam kepemimpinan politik, tetapi juga dalam bidang pendidikan, pemerintahan, ekonomi, dan perkembangan literasi.

Salah satu bukti keterlibatan perempuan dalam perkembangan keilmuan dan literasi Aceh, menurutnya, dapat ditelusuri melalui karya Mir'atut Thullab yang ditulis Syekh Abdurrauf As-Singkili atas perintah Sultanah Tajul Alam Safiatuddin.

Jejak tersebut menunjukkan bahwa perempuan Aceh pada masa lalu tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan sosial, tetapi juga memiliki pengaruh dalam perkembangan pemikiran dan tradisi intelektual.

Dalam pemaparannya, Cek Midi juga mengaitkan sejarah kemandirian perempuan Aceh dengan realitas kepemimpinan perempuan pada masa sekarang. Ia menyebut Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal, sebagai salah satu figur perempuan masa kini yang merepresentasikan nilai-nilai kemandirian dan ketangguhan.

Menurutnya, kemampuan perempuan Aceh mengambil peran strategis di berbagai bidang, mulai dari politik, pendidikan, kepemimpinan, pemerintahan hingga ekonomi, merupakan bukti bahwa perempuan mampu berdiri mandiri sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

"Dari jejak perempuan hebat dalam manuskrip kuno Aceh, hingga sosok perempuan tangguh masa kini. Bunda Illiza menjadi salah satu inspirasi penentu arah perubahan," ujar Cek Midi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ANEKA BERITA

10 BERITA

INTERNASIONAL

Bocorkan Puluhan Rahasia Negara, Pejabat China Ini Divonis Mati dan Hartanya Disita

Oleh Van · 24 Nov, 17.55 WIB



Keheningan yang mendalam di tengah suasana ruang sidang yang megah.

JAKARTA — Seorang pejabat pemerintah China dijatuhi hukuman mati setelah terbukti membocorkan puluhan informasi rahasia negara kepada badan intelijen asing. Seluruh harta miliknya juga diperintahkan untuk disita.

Kasus tersebut diungkap melalui publikasi akun Baomiguan yang dikelola Jincheng Press, penerbit yang terafiliasi dengan otoritas perlindungan rahasia negara China, pada Senin, 23 November 2026.

Pejabat yang hanya disebut dengan nama keluarga Ma itu disebut menyerahkan lebih dari 100 laporan informasi kepada pihak asing, dengan 35 di antaranya dikategorikan sebagai rahasia negara.

Pejabat China Direkrut Intelijen Asing

Menurut pengungkapan tersebut, Ma awalnya didekati seorang agen intelijen asing ketika bertugas di luar negeri. Agen bernama Kailin itu disebut menjalin kedekatan dengan Ma dengan dalih ingin belajar bahasa Mandarin.

Kailin kemudian rutin mengajak Ma bertemu dan memberikan sejumlah uang. Seiring waktu, percakapan keduanya mulai beralih ke isu politik sensitif dan perkembangan internasional.

Kailin juga mulai menanyakan informasi mengenai personel serta aktivitas lembaga tempat Ma bekerja di negara tersebut, hingga Ma diduga membagikan sejumlah informasi sensitif, termasuk daftar kontak internal.

Kailin kemudian memperkenalkan Ma kepada seorang agen lain bernama Tang Zheng. Sosok tersebut diduga mengancam akan membongkar keterlibatan Ma sebelumnya jika ia menolak bergabung dengan jaringan intelijen asing.

Ma akhirnya menerima tugas dari jaringan tersebut dan menandatangani dokumen kerja sama yang memuat klausul kerahasiaan serta loyalitas. Ia juga disebut menerima pembayaran bulanan tetap.

Lebih dari 100 Laporan Intelijen Dikirim

Setelah kembali ke China, Ma diduga tetap mengumpulkan dokumen rahasia yang diakses melalui pekerjaannya. Informasi tersebut kemudian dikirim kepada pihak asing melalui sebuah situs yang digunakan untuk menyampaikan data intelijen.

Dalam pengungkapan Baomiguan, Ma disebut menyerahkan lebih dari 100 laporan informasi. Sebanyak sembilan informasi dikategorikan sebagai rahasia dan 26 lainnya masuk kategori rahasia tingkat lebih tinggi atau classified.

Ma juga disebut menerima lebih dari satu juta yuan atau sekitar 150.000 dolar AS dari aktivitas tersebut, termasuk pembayaran dan bonus berdasarkan informasi yang disampaikan.

Pengadilan yang identitasnya tidak diungkap menjatuhkan hukuman mati kepada Ma atas tindak spionase. Ia juga dijatuhi hukuman pencabutan hak politik seumur hidup dan penyitaan seluruh harta pribadi.

Kaitannya dengan Isu Penyadapan

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

INTERNASIONAL

Kejam! Israel Sulap Gaza Jadi Tempat Pembuangan Limbah Beracun

Oleh Redaksi · 24 Nov, 13.00 WIB



BANDA ACEH - Serangan militer Israel telah mengubah Jalur Gaza menjadi kawasan yang tercemar racun. Hampir seluruh wilayah Palestina tersebut terindikasi mengalami kontaminasi, mulai dari tanah, udara hingga sumber air yang menjadi kebutuhan hidup penduduk.

Laporan terbaru Oxfam and the Conflict and Environment Observatory (CEOBS) mengungkap, lebih dari 99 persen wilayah Gaza berpotensi mengalami pencemaran. Sementara itu, sekitar 78 persen daratan Gaza telah terdampak langsung oleh skala dan intensitas bombardir Israel.

Temuan yang dipublikasikan pada Senin (23/11/2026) tersebut memperingatkan bahwa penggunaan senjata peledak dan pembakar secara masif, serangan udara, serta kebakaran telah menyebabkan pencemaran lingkungan yang membahayakan kehidupan warga Palestina. Dampaknya bahkan diperkirakan bisa berlangsung selama puluhan tahun.

Direktur Eksekutif Oxfam International Amitabh Behar mengatakan, kehancuran dan pencemaran di Gaza telah merusak secara mendasar kondisi lingkungan yang diperlukan untuk keselamatan dan kelangsungan hidup manusia.

"Penghancuran dan kontaminasi Gaza telah secara fundamental menurunkan kondisi lingkungan yang diperlukan untuk keselamatan dan kelangsungan hidup manusia," kata Behar, seperti dikutip dari CNN.

Dia menilai kondisi tersebut berpotensi melanggar kewajiban Israel berdasarkan hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia.

Para peneliti juga memperingatkan, kehancuran lingkungan dalam skala sebesar itu dapat menjadi bagian dari, memfasilitasi, atau memberikan bukti kuat atas dugaan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida.

Behar menambahkan, warga Palestina terpapar berbagai zat beracun melalui udara yang mereka hirup, makanan dan air yang dikonsumsi, hingga kontak langsung dengan tanah serta puing-puing bangunan yang tercemar.

Risiko tersebut tidak akan hilang dalam waktu singkat. Menurut Oxfam, paparan racun dapat terus mengancam kesehatan dan keselamatan penduduk selama proses pemulihan lingkungan tidak menjadi prioritas.

Pembersihan Puing Gaza Terhambat

Upaya membersihkan Gaza dari puing-puing bangunan dan material berbahaya juga menghadapi hambatan. Israel menolak mengizinkan masuknya alat berat yang dibutuhkan untuk melakukan pembersihan berskala besar dengan alasan Hamas berpotensi memanfaatkannya untuk kepentingan militer.

Kantor militer Israel yang bertanggung jawab mengoordinasikan bantuan ke Gaza menyatakan pembangunan kembali wilayah tersebut baru akan dimulai setelah Hamas sepenuhnya melucuti senjata.

Kondisi ini membuat upaya pemulihan lingkungan dan pembangunan kembali Gaza berjalan tersendat, meskipun kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas telah ditandatangani lebih dari setahun lalu.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LINGKUNGAN

Kebakaran Hutan 160 Hektare di Riau, Bareskrim Tetapkan PT MAS sebagai Tersangka

Oleh Van · 24 Nov, 22.52 WIB



RIAU — Bareskrim Polri menetapkan PT MAS sebagai tersangka korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut diduga membuka lahan dengan cara membakar hingga menyebabkan kebakaran meluas mencapai 160 hektare.

Penetapan tersangka dilakukan penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa kebakaran yang terjadi pada Februari 2026.

Dirtipidter Bareskrim Polri Kombes Bismo Teguh Prakoso dalam keterangan resminya pada Selasa, (24/11/2026) mengatakan, kebakaran terjadi di kawasan green belt sekitar Afdeling III PT MAS yang berbatasan langsung dengan garis pantai di dalam area konsesi hak guna usaha (HGU) perusahaan.

"Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, kami menetapkan PT MAS sebagai tersangka korporasi dalam perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di area green belt di wilayah Kabupaten Bengkalis, Riau," ujar Bismo.

Peristiwa kebakaran tersebut berlangsung pada Rabu, (11/2/2026). Menurut penyidik, api kemudian merembet ke area tanaman kelapa sawit Afdeling IV PT MAS hingga menimbulkan kabut asap dengan jarak pandang sekitar 2–3 kilometer.

Bismo menyebut perusahaan diduga tidak menjalankan ketentuan mengenai pembukaan lahan perkebunan tanpa membakar.

Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/KB.410/1/2018 yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 6 Tahun 2025.

"PT MAS tidak melaksanakan ketentuan di Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 6 Tahun 2025 perihal Sistem Pengendalian Kebakaran Lahan, sehingga mengakibatkan dilampauinya baku kriteria kerusakan lingkungan," jelasnya.

Selain dugaan pembukaan lahan dengan cara membakar, PT MAS juga diduga membiarkan kebakaran meluas tanpa pengendalian yang memadai.

Penyidik menyoroti tidak berfungsinya sistem peringatan dini atau early warning system dan sistem deteksi dini atau early detection system.

Perusahaan juga diduga tidak memiliki sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang diwajibkan.

"Hal itu terjadi karena early warning system dan early detection system PT MAS tidak bekerja, serta tidak didukung oleh sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang merupakan kewajiban perusahaan untuk dipenuhi, sehingga dilampauinya baku kriteria kerusakan lingkungan," jelas Bismo.

Kebakaran tersebut berlangsung selama beberapa hari dan baru berhasil dipadamkan pada Selasa, (17/2/2026).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EKONOMI

Apresiasi Nasabah Setia, Bank Aceh Gelar Gerakan Menabung Akhir Tahun (GEMA) Berhadiah Langsung

Oleh Redaksi · 24 Nov, 15.20 WIB



Ayo menabung di Bank Aceh dan menangkan hadiah impian Anda melalui Promo GEMA 2026! Penawaran spesial ini berlaku hingga akhir Desember 2026. FOTO/Dok. BAS untuk HAI.

BANDA ACEH - Sebagai bentuk apresiasi mendalam kepada para nasabah setia, Bank Aceh menghadirkan program spesial akhir tahun bertajuk Gerakan Menabung Akhir Tahun (GEMA).

Program ini dirancang untuk memberikan kejutan istimewa sekaligus mendorong budaya menabung yang lebih positif di tengah masyarakat.

Melalui program GEMA, Bank Aceh menawarkan skema penghargaan yang transparan dan pasti.

Nasabah dapat mengikuti program ini dengan melakukan penempatan dana minimal Rp20 juta paling lambat 31 Desember 2026.

Keistimewaan utama dari inisiatif ini adalah mekanisme pemberian hadiah yang dilakukan secara langsung, tanpa proses undian, sehingga memberikan kepastian dan kemudahan bagi para peserta.

Berbagai pilihan hadiah premium telah disiapkan oleh Bank Aceh untuk memanjakan para nasabah yang berpartisipasi.

Rangkaian hadiah tersebut mencakup kendaraan roda empat, sepeda motor, logam mulia (emas), smartphone terkini, hingga berbagai peralatan elektronik rumah tangga berkualitas.

Hadirnya program GEMA tidak hanya sekadar memberikan kejutan di penghujung tahun, melainkan juga merefleksikan komitmen Bank Aceh dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan.

Dengan mengaitkan kebiasaan menabung dengan apresiasi yang nyata, bank ini berupaya memberikan pengalaman perbankan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga membahagiakan secara emosional.

Bank Aceh mengajak seluruh masyarakat dan nasabah setia untuk memanfaatkan momentum akhir tahun ini sebagai langkah strategis dalam merencanakan keuangan yang lebih sehat.

Melalui GEMA, nasabah tidak hanya mengamankan masa depan finansial melalui budaya menabung, tetapi juga berkesempatan menutup tahun 2026 dengan penuh kebahagiaan dan hadiah yang istimewa.

EKONOMI

Prabowo Bawa Kabar Positif dari MSCI, IHSG Berpeluang Tembus 5.360 hingga 5.442

Oleh Van · 24 Nov, 17.23 WIB



Pantau pergerakan pasar saham yang dinamis melalui visualisasi data real-time.

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang melanjutkan penguatan dan menembus level 5.360 pada perdagangan Selasa, 24 November 2026.

Salah satu sentimen yang menopang optimisme pasar adalah terbukanya peluang Indonesia mempertahankan status emerging market dalam evaluasi MSCI.

Kabar tersebut muncul setelah Presiden Prabowo Subianto berkomunikasi dengan CEO MSCI Henry Fernandez.

Perkembangan itu dinilai dapat meredakan kekhawatiran investor terhadap risiko penurunan status pasar saham Indonesia menjadi standalone market.

Pada perdagangan Senin, 23 November 2026, IHSG ditutup menguat 1,35 persen atau 69,52 poin ke level 5.215,85. Penguatan tersebut mengakhiri tren pelemahan indeks selama lima hari perdagangan berturut-turut.

Peluang IHSG Menuju 5.360 hingga 5.442

BRI Danareksa Sekuritas memperkirakan IHSG memiliki peluang melanjutkan penguatan setelah kembali bergerak di atas rata-rata pergerakan 20 hari atau MA20 pada level 5.152.

"Secara teknikal, IHSG membentuk bullish candle dan kembali bergerak di atas MA20 (5.152), mengindikasikan perbaikan momentum jangka pendek," tulis BRI Danareksa Sekuritas dalam riset perdagangan Selasa, 24 November 2026.

Sekuritas tersebut menetapkan level resistance terdekat IHSG di 5.230. Jika berhasil menembus batas tersebut, indeks berpeluang bergerak menuju kisaran 5.360 hingga 5.442.

Sementara itu, area 5.152–5.100 menjadi level support yang perlu dipertahankan untuk menjaga momentum pemulihan. Indikator MACD masih berada di zona negatif, tetapi bullish crossover dengan histogram positif menunjukkan momentum rebound masih terjaga.

MSCI Belum Menutup Peluang Indonesia

Wealth Management Advisory Head OCBC, Diamond Stole, menilai peluang Indonesia mempertahankan status emerging market masih terbuka. Menurutnya, pelaku pasar belum memiliki alasan kuat untuk langsung menyimpulkan Indonesia akan turun menjadi standalone market.

"MSCI itu menurut pernyataan resminya juga membuka peluang bagi Indonesia untuk masih berada di dalam emerging market," ujar Diamond dalam acara Media Gathering: Navigating Wealth Towards 2027 di Jakarta, Senin, 23 November 2026.

Meski demikian, peluang tersebut masih bergantung pada tindak lanjut reformasi pasar modal. MSCI menyoroti transparansi struktur kepemilikan saham, dugaan perdagangan terkoordinasi, serta konsistensi penegakan aturan.

MSCI membuka periode konsultasi atas usulan reklasifikasi Indonesia hingga 30 April 2027. Keputusan final mengenai klasifikasi pasar Indonesia dijadwalkan diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.

Karena itu, sentimen positif dari komunikasi pemerintah dan MSCI belum menghapus seluruh risiko yang dihadapi pasar modal.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

HIBURAN

Viral Pengakuan Mantan Manajer Musisi Ternama, Ada Cerita Diajak ke Kamar Hotel

Oleh Redaksi · 24 Nov, 15.27 WIB



BANDA ACEH - Jagat media sosial tengah diramaikan oleh pengakuan sejumlah perempuan yang mengungkap dugaan perilaku tidak pantas seorang musisi ternama Tanah Air.Perbincangan ini bermula dari unggahan mantan manajer seorang musisi, Marsya Ditia, melalui akun Threads pada Selasa (24/11/2026).

Dalam unggahannya, Marsya menceritakan pengalaman buruk yang diduga dialaminya selama bekerja dengan musisi tersebut. Ia mengaku pernah mendapat perlakuan tidak pantas ketika istri sang musisi sedang tidak berada di lokasi.

Pengalaman itu disebut meninggalkan dampak psikologis serius. Marsya bahkan mengaku harus menjalani perawatan intensif ke psikiater akibat tekanan yang dialaminya.

Pengakuan tersebut kemudian memancing perempuan lain untuk ikut buka suara. Sejumlah warganet membagikan pengalaman serupa melalui kolom komentar dan unggahan balasan.

Salah satu pengakuan menyebut adanya ajakan masuk ke kamar hotel ketika korban masih duduk di bangku SMA, sekitar 2015-2016.

Ada pula warganet yang menceritakan dugaan tindakan tidak pantas saat menghadiri sebuah acara kampus pada rentang 2014-2015.

Banyaknya pengakuan yang bermunculan membuat isu tersebut semakin ramai diperbincangkan. Namun, identitas musisi yang dimaksud belum diungkap secara terbuka.

Seluruh cerita yang beredar di media sosial juga masih sebatas pengakuan dan belum terverifikasi secara independen. Karena itu, kebenaran tuduhan tersebut masih memerlukan penelusuran lebih lanjut.

LIFESTYLE

Jadi Calon Wapres, Harta Amran Sulaiman Tembus Rp1,72 Triliun

Oleh Redaksi · 24 Nov, 09.48 WIB



BANDA ACEH - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tercatat memiliki harta kekayaan mencapai Rp1,72 triliun. Angka tersebut berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikannya pada 16 Maret 2026.

Kekayaan Amran menjadi sorotan setelah namanya bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono diusulkan Presiden Prabowo Subianto sebagai calon Wakil Presiden untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka pada Senin (23/11/2026).

Dalam laporan tersebut, total kekayaan Amran tercatat sebesar Rp1.721.413.658.505. Sebagian besar berupa surat berharga

Selain itu, Amran melaporkan kas dan setara kas sebesar Rp595.749.878.155, tanah dan bangunan Rp304.120.937.750, harta bergerak lainnya Rp2.814.812.500, serta harta lainnya Rp38.520.100.

Di sisi lain, Amran juga mencatatkan utang sebesar Rp313.869.250.000.

Punya 60 Properti

Dalam LHKPN tersebut, Amran melaporkan kepemilikan 60 bidang tanah dan bangunan dengan nilai total Rp304,12 miliar.

Aset properti itu tersebar di sejumlah daerah, yakni Makassar, Gowa, Bone, Pangkajene dan Kepulauan, Jakarta Selatan, serta Konawe Utara.

Tak hanya properti, Amran juga melaporkan kepemilikan 10 unit kendaraan dengan nilai keseluruhan Rp18.664.760.000.

Koleksi kendaraannya mencakup Hummer Jeep, Toyota Camry Sedan, Toyota Fortuner Jeep, Toyota Kijang Innova Minibus, Mini Cooper, Honda Brio, Mercedes-Benz Maybach, serta tiga unit Toyota Alphard

LIFESTYLE

Selingkuh dan Punya 18 Pacar, Ternyata Ini Alasan dari Kasus Pria di Malang

Oleh Van · 24 Nov, 17.42 WIB



Setiap hubungan memiliki tantangannya sendiri. Penting untuk saling memahami saat menghadapi konflik bersama pasangan.

JAKARTA — Kasus seorang pria di Malang, Jawa Timur, yang disebut memiliki hingga 18 pacar sekaligus ramai diperbincangkan di media sosial. Peristiwa ini memunculkan pertanyaan tentang alasan seseorang bisa berselingkuh meski sudah memiliki pasangan.

Kasus tersebut mencuat setelah seorang perempuan mengunggah pengalamannya melalui Threads dan meminta bantuan warganet untuk mencari tahu dugaan hubungan lain kekasihnya.

Unggahan itu kemudian memancing sejumlah perempuan lain mengaku pernah menjalin hubungan dengan pria yang sama. Namun, klaim mengenai jumlah pasangan tersebut belum terverifikasi secara independen.

Perselingkuhan sendiri dapat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi hubungan hingga motivasi pribadi. Sebuah penelitian mengidentifikasi delapan alasan yang mendorong seseorang melakukan perselingkuhan.

Delapan Alasan Seseorang Selingkuh

Penelitian yang dipimpin Dylan Selterman dari University of Maryland dan dipublikasikan dalam The Journal of Sex Research melibatkan 495 orang yang mengaku pernah berselingkuh.

Studi tersebut menemukan delapan motivasi utama, yakni kemarahan, rendah diri, kurangnya kasih sayang, rendahnya komitmen, kebutuhan akan variasi, merasa diabaikan, hasrat seksual, serta faktor situasi.

Kemarahan dapat mendorong seseorang berselingkuh sebagai bentuk balas dendam terhadap pasangan. Sementara itu, rendahnya rasa percaya diri dapat membuat seseorang mencari perhatian atau pengakuan dari orang lain.

Kurangnya kasih sayang dan perasaan diabaikan juga dapat menjadi pemicu. Seseorang mungkin merasa kebutuhan emosionalnya tidak terpenuhi dalam hubungan yang sedang dijalani.

Faktor lainnya adalah rendahnya komitmen, keinginan mencoba pengalaman berbeda, serta dorongan seksual yang tidak terpenuhi. Situasi tertentu, seperti berada di bawah tekanan atau pengaruh alkohol, juga ditemukan dalam penelitian tersebut.

Selain delapan motivasi itu, paparan internet, munculnya kesempatan, dan batasan pribadi yang lemah dapat menjadi faktor tambahan yang membuka peluang perselingkuhan.

Perselingkuhan Tidak Selalu Berarti Hubungan Bermasalah

Dylan Selterman menjelaskan bahwa alasan seseorang berselingkuh tidak selalu berkaitan langsung dengan kondisi hubungannya.

“Penelitian kami menunjukkan bahwa masalahnya tidak sesederhana itu: orang berselingkuh karena berbagai alasan, yang banyak di antaranya bukan merupakan cerminan langsung dari kesehatan suatu hubungan,” ujar Selterman dalam keterangan penelitian University of Maryland.

Temuan tersebut menunjukkan perselingkuhan tidak bisa dijelaskan hanya melalui satu penyebab. Motivasi setiap individu dapat berbeda, termasuk ketika hubungan yang dijalani terlihat baik-baik saja.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

HIBURAN

Laskar Cinta Jokowi: Barang Bukti Dugaan Makar Listyo Sigit Cs tak Masuk Akal

Oleh Redaksi · 24 Nov, 10.17 WIB



BANDA ACEH - Koordinator Laskar Cinta Jokowi, Suhandono Baskoro, mempertanyakan relevansi barang bukti yang diperlihatkan Bareskrim Polri dalam pengusutan kasus dugaan makar yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira Polri lainnya.Menurut Suhandono, sejumlah barang yang dipamerkan polisi, mulai dari kaus bertuliskan All Cops Are Bastard (ACAB), kaus bertagar #IndonesiaSadar, bendera One Piece, CPU, hingga hard disk, belum dengan sendirinya dapat menjelaskan adanya tindak pidana makar.

“Kalau hanya melihat barang-barang yang dipamerkan ke publik, sangat tidak masuk akal apabila semuanya langsung dikaitkan dengan dugaan makar. Apa hubungan kaus, bendera One Piece, CPU, dan hard disk dengan upaya menggulingkan pemerintahan? Itu harus dijelaskan secara terang kepada masyarakat,” kata Suhandono Baskoro kepada wartawan, Selasa (24/11/2026).

Pernyataan tersebut muncul setelah Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin membeberkan sejumlah barang bukti dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Senin (23/11/2026).

Berdasarkan pemberitaan sejumlah media, polisi menyita 39 perangkat elektronik yang terdiri atas telepon genggam, laptop, CPU, dan hard disk. Selain itu, terdapat 250 kaus hitam bertuliskan ACAB, 251 kaus bertuliskan “Sadar Dipalak, Sadar Dibakar, Sadar Dimiskinkan” dengan tagar #IndonesiaSadar, 20 bendera One Piece, satu buku catatan analisis dan evaluasi satgas, serta uang tunai Rp735 juta.

Menurut Suhandono, keberadaan barang-barang tersebut harus diuji berdasarkan hubungan langsung dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan. Penyidik tidak cukup hanya memperlihatkan benda-benda hasil penyitaan, tetapi juga harus menerangkan siapa pemiliknya, siapa yang membuat atau memesannya, apa tujuan penggunaannya, dan bagaimana kaitannya dengan dugaan makar.

“CPU dan hard disk adalah perangkat elektronik yang digunakan masyarakat dalam berbagai aktivitas. Kaus merupakan produk pakaian, sedangkan bendera One Piece merupakan simbol budaya populer. Barang-barang itu tidak otomatis menjadi bukti makar tanpa adanya penjelasan mengenai isi, tujuan, dan kaitannya dengan perbuatan pidana,” ujarnya.

Suhandono menilai persoalan paling mendasar dalam perkara ini adalah pembuktian unsur makar. Menurutnya, kritik terhadap institusi kepolisian, penggunaan simbol tertentu, maupun persiapan atribut demonstrasi tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai tindakan menggulingkan pemerintahan.

Ia mengingatkan bahwa KUHP Nasional telah mengatur secara spesifik tindak pidana makar.

Dalam Pasal 191 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, makar terhadap Presiden berkaitan dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan Presiden, atau menjadikan Presiden tidak mampu menjalankan …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ISLAM

Bangga Dengan Jati Diri Islam

Oleh rutyuyun · 24 Nov, 09.50 WIB



Temukan kedamaian dan jati diri dengan kembali kepada syariat Islam sebagai sistem yang sempurna.

IREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri pada Maret 2026, merilis jumlah penduduk muslim Indonesia mencapai 251.257.898 jiwa atau 87,15 persen dari total penduduk.

Dari angka di atas, jelas pemuda muslim pun jumlahnya banyak. Nyatanya, meski sudah muslim sejak lahir, namun banyak anak muda belum tahu tujuan hidup sebagai muslim.

Fenomena ini memang nyata, karena status "Islam KTP" atau muslim keturunan sering membuat agama hanya diwariskan sebagai rutinitas budaya, bukan kesadaran yang dicari dan dipahami sendiri.

Banyak hal yang disebut sebagai faktor penyebabnya, di antaranya pendidikan agama sebatas hafalan.

Pembelajaran di masa kecil sering fokus pada tata cara ritual dan hafalan doa, tanpa menyentuh alasan filosofis di balik perintah tersebut.

Kemudian krisis identitas di era modern akibat tekanan media sosial, standar kesuksesan duniawi, dan arus informasi global yang sering bertabrakan dengan nilai agama yang belum mengakar kuat.

Pemuda hari ini hidup dengan media sosial, berbagai informasi membanjiri otaknya setiap detik, tak ada filter yang cukup kuat untuk menghadang dan menuntunnya kepada kebaikan hakiki. Karena konten agama pun hari ini rentan disalahgunakan. Hanya sebatas meninggikan FYP, dan enggament, dan algoritma.

Ditambah minimnya ruang diskusi terbuka. Banyak anak muda takut bertanya hal-hal mendasar tentang iman karena khawatir dianggap kurang religius atau dihakimi oleh lingkungan sekitar.

Komunitas yang menjamur pun lebih sekadar memuaskan harga diri bukan intelektualitas yang kemudian mampu memuaskan akal, menentramkan hati dan sesuai fitrah

Akar Masalah Pada Sistem Kapitalisme

Semua faktor penyebab di atas bermuara pada satu asas yaitu sekulerisme, atau ide pemisahan agama dari kehidupan.

Dari mulai sistem pendidikan sekuler yang justru membentuk generasi muslim memiliki pola fikir dan pola sikap selain Islam, meski muslim tapi tidak otomatis memiliki kepribadian Islam.

Bahkan, mempelajari Islam terkesan kuno hingga radikal.

Tak heran jika output pendidikan yang berasas sekuler akhirnya berkutat pada ktivitas generasi muslim yang disibukkan mengejar kesuksesan duniawi semata, kosong nilai ruhiyah dan tak punya arah untuk mengejar sukses akhirat.

Bangga jika menjadi duta pariwisata, Miss universe, duta HAM , berpacaran hingga hamil di luar nikah dan lainnya.

Dan rancangan itu bukan semata untuk menggali potensi pemuda yang luarbiasa, sebagai agen of change peran itu sangat …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

REDAKSI

PENERBIT PT. Harian Aceh Indonesia
PEMIMPIN REDAKSI Muhammad Saman
REDAKTUR PELAKSANA Adam
REDAKTUR Hayat
SEKRETARIS REDAKSI Ola

Jurnalis
Banda Aceh:
1. IRWAN SAPUTRA - NOMOR 12334-PWI/WDa/DP/XII/2017/01/01/912.
2. Hamdani

Bireuen:
1. M. Ilham Sakubat

Lhokseumawe:
1. Yoppi

Aceh Barat:
1. Kurniawan

Jawa Timur:
1. Rut Sriwahyuni

Fotografer:
1. Mishabul Amin
2. Nazaruddin

Social Media Manager:
1. Syukur M. Amin